

M. Taufiq Rahman, Ph.D

Glosari Teori Sosial

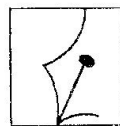


Ibnu Sina Press

GLOSARI TEORI SOSIAL

Oleh :

MOHAMMAD TAUFIQ RAHMAN, Ph.D.



IBNU SINA PRESS

Jl. Raya Pacet No. 114 Andir RT.1/11
Pakutandang, Ciparay Kab. Bandung 40381
Jawa Barat Telp. (022) 5959015 - 081318122021

GLOSARI TEORI SOSIAL

Penulis :

M. Taufiq Rahman, Ph.D

Editor

Mohamad Mustari, Ph.D

Sampul dan Tata Letak

.....

Diterbitkan Oleh :

.....

Cetakan ke I Juli 2011

ISBN : 978-602-99802-0-2

Tahun :

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Right Reserve

KATA PENGANTAR

Masyarakat telah berkembang dari semenjak Adam dan anak-anaknya menghuni bumi ini. Dengan berkembangnya masyarakat itu, banyak sekali perubahan yang terjadi. Penambahan barang berarti penambahan istilah. Penambahan hubungan berarti pula penambahan terma. Dan penambahan aktivitas berarti pula penambahan jargon. Walhasil, penambahan ide tentang yang ada di masyarakat terus berkembang.

Ide-ide itu diberi isi oleh para pembuat ide itu. Itulah yang disebut dengan definisi. Walaupun seringkali terjadi perbedaan kandungan ide atau konsepsi, ide-ide atau konsep-konsep itu terus berkembang pesat meresponse perkembangan manusia yang secara *evolutif* maupun *revolutif* berubah. Rekaman tentang konsep-konsep itu selalu ada di tiap zaman, untuk mengingatkan bahwa kita sepakat akan konsep-konsep itu dan kita bahasakan dalam pergaulan kehidupan kita.

Sementara itu, sebagai suatu ilmu tentang masyarakat, sosiologi pun berkembang pesat sejak teorisasinya oleh para filosof seperti *Aristoteles* sampai para ilmuwan Barat yang kemudian menamakan ilmu kemasyarakatan ini sebagai sosiologi. Sosiologi pun menjadi ilmu yang penting guna mengikuti roda zaman yang mempengaruhi dan dipengaruhi masyarakat. Untuk itu, pemahaman

tentang definisi, struktur, dan contoh-contoh mengenai konsep sosiologi menjadi penting untuk dipahami, terutama oleh mereka yang menggelutinya, yaitu para sosiolog dan calon-calon sosiolog.

Buku ini tidak terlalu berkehendak banyak, apalagi menggurui mereka yang sudah menjadi sosiolog mapan. Buku ini hanya mengantarkan apa-apa yang menjadi konsep-konsep dasar dalam sosiologi. Di buku ini, ada 76 entri dari konsep-konsep sosiologi yang sangat perlu untuk dipahami oleh mahasiswa. Konsep-konsep ini penting untuk memetakan problematika sosial dalam kerangka keilmuan. Konsep-konsep ini sudah berumur panjang, sepanjang ilmu sosiologi dan teori sosial yang diciptakan oleh manusia.

Buku ini sengaja mengambil gaya kamus atau glosari agar dapat mudah dicerna dan untuk digunakan secara instant oleh para mahasiswa. Dengan demikian, apa yang penting diingat oleh para mahasiswa adalah apa arti dari konsep-konsep sosiologis tersebut. Setelah itu, setelah buku ini, mereka dapat lebih bebas dan leluasa untuk mendiskusikan dan membanding-bandingkan antara satu pengertian dari seorang tokoh ke pengertian lain dari tokoh lain. Maka, jadilah buku ini modal awal untuk berdiskusi tentang masalah-masalah sosial.

Selain itu, buku ini pun merujuk pada teori-teori sosiologi yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh klasik. Menjadi klasik bukan berarti kuno. Menjadi klasik berarti sudah diakui secara umum. Menjadi klasik berarti sudah mapan, atau menjadi bagian dari *body of knowledge*.

Penjelasan seperti buku ini sudah ada di internet, bahkan internet terbuka terhadap pembaruan. Dengan demikian, internet, misalnya dengan *Wikipedia*, bisa lebih kaya dan maju pembahasannya. Namun hidup kita bukan hanya internet. Di Indonesia, pada saat sekarang, internet hanya dapat diakses oleh sebagian orang. Lagi pula, buku lebih mudah dibawa daripada *laptop* dengan modem *internet*-nya. Demikian juga, buku bukan barang curian yang mahal dan berharga dibanding dengan *notebook* atau *handphone*. Yang terakhir, buku anti-listrik. Komputer masih perlu listrik, sedangkan buku dapat dibaca bahkan ketika listrik padam. Maklumlah, listrik

masih menjadi masalah di negeri kita yang miskin-papa walaupun diurus oleh kaum “cerdik-pandai” ini. Maka, buku seperti ini masih diperlukan, lebih praktis daripada internet.

Berkenaan dengan penerbitan buku ini, saya sangat perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada kawan saya Pak Mustari (Mohamad Mustari, Ph.D.) dari Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional yang telah mengedit buku ini dan membantu menerbitkannya. Semoga amal baiknya dibalas Allah SWT. Amien. Terima kasih juga kepada istri saya, dr. Fauziah Fatma yang telah memaklumi dan memberikan saya keleluasaan untuk menulis buku ini. Untuk kedua anak saya, Fathan dan Fakhra, buku ini merupakan persembahan kecil yang merupakan tanda mata dorongan orang tua untuk memajukan anaknya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang saleh dan pintar. Amien.

Sumedang, 22 Juni 2011

M. Taufiq Rahman, Ph.D.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	V
Akomodasi.....	1
Alienasi.....	2
Amalgamasi.....	4
Anomi.....	6
Asimilasi.....	8
Birokrasi.....	10
Definisi Situasi.....	12
Diskriminasi.....	13
Elit.....	15
Empirisisme.....	16
Estet.....	17
Etnosentrisme.....	19
Evolusi Sosial.....	20
Fakta Sosial.....	21
Feodalisme.....	23
Fungsi.....	24
Generalisasi.....	27
Hipotesis.....	28
Holisme.....	29
Ideologi.....	30
Institusi Sosial.....	32
Integrasi Sosial.....	34
Interaksi Sosial.....	35
Interaksionisme Simbolik.....	36
Jarak Sosial.....	37
Kasta.....	40
Kebudayaan.....	42

Kekurangan Relatif.....	43
Kelas Sosial.....	44
Kelompok Rujukan.....	47
Kelompok Sosial.....	48
Kemestian Fungsional.....	50
Kerjasama.....	51
Keseimbangan Sosial.....	52
Kharisma.....	53
Kohesi Sosial.....	54
Komunitas/Masyarakat.....	56
Konflik Sosial.....	57
Konsensus.....	60
Konsep.....	61
Kontrol Sosial.....	62
Korelasi.....	64
Kuasa.....	65
Makna.....	66
Masalah Sosial.....	67
Masyarakat Majemuk.....	69
Masyarakat Massa.....	72
Mobilitas Sosial.....	75
Nilai.....	77
Norma Sosial.....	79
Objektivitas.....	80
Observasi.....	82
Otoritas.....	83
Pembagian Kerja.....	85
Pengertian.....	87
Penjelasan.....	89
Penyimpangan.....	90
Peran Sosial.....	95
Pertukaran Sosial.....	94
Perubahan Sosial.....	96
Positivisme.....	99
Prasangka.....	100
Ramalan.....	101
Ras, Rasisme.....	104
Rasionalisasi.....	107
Sanksi Sosial.....	108

Segregasi.....	109
Sekularisasi.....	112
Sistem Sosial.....	114
Sosialisasi.....	116
Status.....	117
Stratifikasi Sosial.....	118
Struktur Sosial.....	120
Teori Sosiologi.....	122
Tindakan Sosial.....	124
Tipe ideal.....	127
Variabel Pola.....	128
Daftar Pustaka.....	131
Biografi Penulis.....	138

Akomodasi

Akomodasi ataupun penyesuaian adalah satu keadaan atau proses ketika kelompok-kelompok yang sedang konflik setuju untuk menghentikan atau menghindari konflik dengan mengadakan interaksi secara aman damai baik untuk sementara atau selama-lamanya. Interaksi sosial seperti ini menjadikan kelompok-kelompok yang terlibat untuk tetap melangsungkan identitas serta sikap mereka yang berlainan. Proses ini bisa terjadi dalam keadaan hubungan ras atau etnik yang menekankan unsur negosiasi dan perundingan untuk suatu kepentingan tertentu.

Akomodasi perlu dibedakan dari asimilasi, walaupun keduanya merupakan proses interaksi. Akomodasi yang menitikberatkan proses kerjasama dan negosiasi biasanya tidak mengakibatkan kehilangan identitas suatu kelompok. Sebaliknya, asimilasi berarti pencantuman dua kelompok ataupun lebih yang seringkali melibatkan kehilangan identitas kelompok yang diresapi atau diasimilasi.

Proses akomodasi kerap terjadi terutama dalam keadaan interaksi yang melibatkan berbagai suku. Dalam hubungan antar suku, konflik dan perselisihan seringkali menjadi masalah utama. Salah satu cara untuk mengurangi konflik dan menjadikan berbagai suku hidup berdampingan adalah melalui akomodasi.

Contoh akomodasi pada tingkat nasional adalah pengalaman masyarakat Belanda. Masyarakat Belanda dianggap unik karena organisasi pluralisme yang sengaja diadakan. Seluruh masyarakat Belanda dibagi ke dalam empat blok: Katolik, Protestan yang terdiri dari *Dutch Reformed* dan *Re-reformed* dan Sekular. Tiap-tiap blok ini mempunyai institusi dan organisasi tersendiri yang merangkumi hampir semua bidang kehidupan. Pendek kata, seluruh masyarakat dibagi ke dalam blok-blok yang berdasarkan kepada perbedaan agama.

Walaupun segmentasi terjadi di kalangan masyarakat Belanda, hubungan di antara berbagai blok itu harmonis. Ini terjadi karena beberapa syarat telah dipenuhi. Syarat-syarat ini adalah: Pertama, sistem yang ada sekarang diterima dan tidak ada percobaan yang melampaui garis-garis blok.

Kedua, adanya raja sebagai lambang integrasi. Ketiga, adanya perundingan elit secara diplomatik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Keempat, perwakilan seimbang dalam politik. Akhirnya terdapat peluang yang sama untuk memperoleh kekayaan, anggaran, pendidikan, perumahan dan layanan sosial lainnya. Aturan-aturan ini telah terbukti sebagai hal yang paling mengesankan dari Belanda.

Oleh karena itu, pada dasarnya, ciri utama masyarakat Belanda adalah penyesuaian di antara berbagai kelompok. Penyesuaian telah menghasilkan satu keseimbangan yang memuaskan, dengan menekankan hak untuk melanggengkan kebudayaan dan identitas kelompok masing-masing.

Proses penyesuaian juga terjadi di Indonesia. Penggunaan berbagai bahasa, pengamalan berbagai agama dan kepercayaan secara bebas bagi tiap-tiap kelompok masyarakat tanpa gangguan dari kelompok lain adalah beberapa contoh penyesuaian yang begitu unik, yaitu terjadinya keseimbangan. Penyesuaian ini sangat perlu untuk diutamakan sebagai satu kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Kesuksesan atau terjadinya penyesuaian sebagai satu kebijakan bermasyarakat, seperti kebijakan-kebijakan lain, sebagian besarnya bergantung kepada sikap kalangan pemerintah serta kelompok-kelompok etnik yang ada. **Lihat Asimilasi.**

Alienasi

Alienasi atau keterasingan merupakan kondisi ketika manusia merasa terpisah, atau bahkan terputus dari masyarakat dan kebudayaannya. Akibatnya, segala nilai dan norma masyarakat tidak lagi memberikan makna apa-apa kepada individu. Oleh karena itu, individu itu merasa terpencil serta kecewa.

Konsep ini banyak digunakan oleh *Karl Marx*, terutama sekali dalam tulisan-tulisan awalnya. Menurut Marx, alienasi berarti suatu keadaan manusia yang dikuasai oleh kuasa yang diciptakan oleh dirinya sendiri –kuasa itu menghadapinya sebagai suatu kuasa luar. Akibatnya, individu itu terhalangi untuk menjadi manusia seutuhnya.

Alienasi, demikian Marx, merupakan keburukan masyarakat kapitalis. Segala institusi dalam masyarakat kapitalis seperti institusi agama, ekonomi dan pemerintahan dicirikan oleh suatu keadaan alienasi. Agama diciptakan oleh manusia dan selanjutnya ia menjadi suatu kuasa luar yang menguasai manusia atau penganutnya. Keadaan serupa terjadi dalam bidang ekonomi. Manusia menciptakan sistem mata uang dan uang menjadi kuasa luar yang menguasai manusia dan manusia memujanya. Jadi keadaan alienasi terjadi dalam segala institusi tempat manusia bergerak. Tetapi bagi Marx, alienasi dalam tempat kerja adalah suatu hal yang paling penting.

Alienasi dari segi ekonomi di bawah sistem kapitalis melibatkan bukan saja pemikiran manusia tetapi juga kegiatan manusia sehari-hari. Alienasi dari segi agama, misalnya, hanya terjadi dalam lingkungan kesadaran, yakni batin seseorang. Tetapi alienasi ekonomi bersifat lebih menyeluruh. Keadaannya melibatkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu aspek lahir dan batin.

Alienasi dalam bidang pekerjaan dapat dibagi ke dalam empat aspek. Manusia mengalami alienasi dari hasil yang diproduksinya, dari proses produksi, dari diri sendiri, dan dari masyarakatnya.

Produk yang dihasilkan oleh seorang buruh merupakan kuasa asing yang seolah-olah menentangnya. Makin banyak buruh itu menghabiskan waktunya bekerja, semakin luas kuasa objek yang dihasilkannya, dan seterusnya buruh itu menghadapi semakin banyak kekurangan baik jiwa maupun kehidupan rohaniannya.

Demikian juga dalam proses produksi. Kegiatan yang dijalankan oleh buruh itu hanya merupakan suatu cara untuk mendapatkan nafkah, bukan lagi satu karya kemampuan manusia.

Selain manusia terasing dari hasil dan proses produksinya, ia juga terasing dari dirinya sendiri. Ini berarti bahwa ia tidak dapat mengembangkan kepribadiannya dengan sepenuhnya. Kerja menjadi hal di luar, bukan bagian dari, sifatnya. Ia tidak mendapat kepuasan dari kerjanya. Sewaktu bekerja, buruh merasa tidak senang dan tidak puas, seolah-oleh

ia bukan lagi dirinya sendiri. Hanya pada masa istirahat, barulah buruh itu merasa senang dan tenang.

Yang terakhir adalah manusia terasing satu sama lainnya. Ini berarti manusia seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, hubungan manusia menjadi semakin renggang.

Ringkasnya, alienasi merupakan satu keadaan buruk yang dihadapi oleh masyarakat industri kapitalis. Dalam keadaan alienasi, manusia tidak lagi sebagai manusia sepenuhnya dan sempurna. Ia seolah-olah tidak mengenali diri sendiri dan tidak ada dalam kolektivitasnya.

Konsep alienasi sangat berhubungan dengan konsep-konsep Marx yang lain seperti 'kesadaran palsu' dan 'ideologi'. Bagi Marx, kesadaran palsu (*false consciousness*) adalah kesadaran individu dalam keterasingan sedangkan ideologi adalah sistem kepercayaan yang dihasilkan oleh kesadaran palsu tadi.

Dalam konteks modern, konsep alienasi digunakan dengan makna yang berlainan. Seringkali konsep ini digunakan untuk merujuk kepada keadaan estrangement, yaitu satu keadaan ketika seorang individu seolah-olah tidak mengenali diri sendiri. Alienasi juga digunakan untuk menunjukkan perasaan ketiadaan kuasa, ketiadaan makna, ketiadaan norma dan keterpencilan. (Lihat, misalnya M. Seeman, "On the Meaning of Alienation", *American Sociological Review*, Vol, 24, 1959). **Lihat Anomi, Ideologi.**

Amalgamasi

Amalgamasi berarti penyatuan biologis antar anggota-anggota kelompok etnik atau ras yang berlainan, sehingga muncullah bangsa yang baru.

Dalam konteks Amerika Serikat, teori amalgamasi menyatakan bahwa orang-orang Inggris, Irlandia, Jerman, Itali, Polandia dan Yahudi menjadi orang Amerika --satu kelompok baru hasil dari penyatuan biologis semua kelompok di atas tetapi sifatnya berbeda dengan kelompok asal.

Dalam konteks Indonesia, amalgamasi berarti orang-orang

Indonesia dari berbagai suku asli, Cina, India, Arab, dan kelompok-kelompok etnis yang lain bercampur, biasanya melalui perkawinan campur dan menghasilkan satu suku yang baru.

Pada dasarnya ide amalgamasi merupakan satu respon kelompok minoritas terhadap berbagai kondisi masyarakat. Di Amerika Serikat, ide amalgamasi sering dinyatakan atau disamakan dengan istilah “periuk mencair” (*melting pot*), yang berasal dari judul drama Israel karya Zangwill, seorang imigran Yahudi Amerika Serikat. Ide dasar “periuk mencair” adalah kebudayaan yang beraneka ragam dalam suatu masyarakat bercampur dan melahirkan satu kebudayaan baru.

Amalgamasi, seperti asimilasi, hanya bisa terjadi dengan syarat kelompok dominan membenarkan dan membebaskan kelompok minoritas berbuat demikian, dan kelompok minoritas mau atau terpaksa berbuat demikian. Kedua keadaan itu jarang terjadi secara serentak. Selain itu, untuk memudahkan amalgamasi, kelompok dominan perlu melepaskan kedudukan istimewanya dalam masyarakat –satu hal yang jarang dilakukan dengan sukarela oleh kelompok dominan.

Oleh sebab itu, amalgamasi adalah suatu proses yang tidak mudah terjadi. Tetapi ini tidak juga berarti bahwa amalgamasi mustahil terjadi. Pada hakikatnya amalgamasi terjadi dalam masyarakat tertentu meskipun derajatnya berbeda-beda. Penduduk Hawaii bisa dikatakan mengalami amalgamasi yang agak lengkap. Kemunculan kalangan *Mestizo* di Meksiko juga bisa dianggap sebagai contoh amalgamasi.

Contoh yang terdapat di Hawaii dan Meksiko menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa memupuk amalgamasi. Pertama, amalgamasi biasanya tidak melibatkan banyak kelompok pada satu waktu tertentu. Kedua, seperti dalam kasus amalgamasi antara orang Spanyol dan suku asli di Meksiko, jenis kelamin yang tidak seimbang dalam salah satu kelompok dapat menjadi satu faktor yang penting. Kurangnya jumlah perempuan Spanyol di Meksiko menambah kemungkinan perkawinan campur dan amalgamasi.

Ketiga, keadaan di Hawaii menunjukkan bahwa keterpencilan atau

isolasi yang melampaui batas dari kelompok luar mengakibatkan saling ketergantungan (*interdependensi*) dari segi sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok yang hidup bertetangga dalam jangka waktu yang panjang.

Teori amalgamasi bisa dinyatakan dalam bentuk formula $A+B+C=D$, di mana, A, B dan C mewakili kelompok etnik yang berlainan dan D mewakili amalgam, satu kelompok baru hasil dari penyatuan biologis antara A, B dan C. **Lihat Asimilasi, Integrasi.**

Anomi

Konsep anomie mula-mula diperkenalkan dalam sosiologi oleh Emile Durkheim. Konsep ini telah mengalami banyak perubahan dari segi pengertiannya, dan digunakan dalam berbagai cara untuk mencakup berbagai situasi sosial yang dicirikan dengan disorganisasi (*disorganization*), keruntuhan norma, nilai dan lain-lain. Dengan demikian, adalah sukar untuk memberikan satu pengertian yang tegas dan tepat mengenai konsep ini.

Namun, pada umumnya konsep anomie menggambarkan satu situasi sosial di mana norma-norma sosial telah hilang atau menjadi lemah, atau norma-norma sosial itu kurang jelas atau bertentangan satu sama lain. Individu yang terperangkap dalam keadaan anomie biasanya kehilangan pandangan moral, kontrol sosial dan menjadi serba salah.

Konsep ini mula-mula digunakan oleh Durkheim dalam pembahasannya mengenai bentuk pembagian kerja yang patologis dan pengaruh-pengaruhnya. Menurut Durkheim, pembagian kerja yang semakin bertambah kerap kali diikuti dengan penyelarasan yang kurang lengkap di antara kelas dan persatuan sosial yang lemah. Keadaan ini menyebabkan kurangnya hubungan di antara anggota masyarakat dan seterusnya tidak membantu mengembangkan satu sistem nilai dan norma bersama. Keruntuhan nilai dan norma bersama ini mengakibatkan disintegrasi sosial serta keruntuhan kesatuan sosial. Keadaan ini disebut Durkheim sebagai anomie.

Konsep anomie dibicarakan dengan lebih detail oleh Durkheim dalam bukunya *Suicide*. Durkheim membedakan tiga jenis bunuh diri: anomik, egoistik dan altruistik. Hanya jenis bunuh diri yang pertama yang berkaitan erat dengan konsep anomie.

Menurut Durkheim, kadar bunuh diri anomik bertambah bukan saja dalam keadaan krisis bahkan juga dalam keadaan makmur. Dalam keadaan krisis, individu tidak dapat mencapai apa yang diharapkan, dan tidak dapat meneruskan taraf hidup yang ada. Ini melahirkan perasaan kecewa, putus asa, kegelisahan dan merasakan hidup seolah-olah tidak bermakna lagi.

Dalam keadaan aman, sebagian individu dapat mencapai kemakmuran atau kekayaan secara mendadak. Individu tersebut seolah-olah merasakan segala keinginannya bisa dicapai. Ketika keadaan ini terjadi, kontrol-kontrol terhadap nafsu manusia, norma-norma dan kedudukan masyarakat mungkin akan runtuh. Keadaan ini akan mengakibatkan bunuh diri anomik.

Kedua keadaan tadi —kekrisisan dan kemakmuran—bisa mengakibatkan bunuh diri anomik karena keduanya menimbulkan berbagai situasi serta nilai baru. Sementara itu, individu yang terlibat tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru itu. Dalam kedua situasi itu, individu mengalami perasaan kekacauan dan menjadi terpisah dari dunia mereka akibat keruntuhan norma sosial dan susunan kolektifnya.

Konsep anomie kemudian dipopulerkan oleh sosiolog lain seperti R. K. Merton. Merton meluaskan konsep ini kepada bentuk perilaku lain yang bersifat *deviant* (menyimpang dari kebiasaan). Merton menganggap anomie sebagai satu keadaan munculnya pemisahan atau disjunction di antara cita-cita yang ditentukan oleh suatu kebudayaan (*cultural goals*) dengan ikhtiar untuk mencapainya (*institutionalized means*). Teori Merton mengenai anomie dan perilaku menyimpang telah banyak dikritik oleh para sosiolog. Salah satu kritik tersebut menyatakan bahwa tidak semua perilaku yang berbentuk *devian* berasal dari keadaan anomie.

Konsep anomie berkaitan erat dengan konsep alienasi. Tidak

terdapat perbedaan yang jelas di antara kedua konsep ini. Namun, anomie biasanya berkaitan dengan kekurangan norma dan kontrol sosial dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, individu mengalami penderitaan akibat kurangnya keterlibatan sosial. Sebaliknya, alienasi lebih menitikberatkan penguasaan dan tekanan yang melampaui individu sehingga individu tersebut tidak dapat mengembangkan kebisaannya dengan sepenuhnya. Ringkasnya, individu menderita karena kurang kebebasan. **Lihat Alienasi, Pembagian Kerja, Penyimpangan.**

Asimilasi

Asimilasi adalah satu proses penyatuan di antara kelompok atau individu yang berlainan budaya yang kemudian membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identitas yang sama. Dalam kajian hubungan ras atau kajian sosiologi umumnya, konsep ini berhubungan dengan penyerapan individu atau kelompok ke dalam kelompok lain. Asimilasi juga berarti kebudayaan saling menyerapi atau perjumpaan kebudayaan. Asimilasi mempunyai ciri-ciri yang sama dengan akulturasi yaitu keadaan ketika suatu kebudayaan disesuaikan akibat hubungan dengan kebudayaan lain, tetapi asimilasi biasanya melibatkan penghapusan sepenuhnya atas perbedaan-perbedaan kebudayaan. Berbeda dengan kawin campur atau penyatuan (*amalgamation*), asimilasi tidak semestinya memerlukan penyatuan biologis.

Proses asimilasi bergantung kepada dua faktor yang penting. Pertama, pengaruhgupan kalangan minoritas untuk menghilangkan identitas mereka. Kedua, pengaruhgupan kalangan mayoritas menerima kalangan lain. Tanpa pengaruhgupan ini proses asimilasi sukar terjadi, kecuali dengan cara pemaksaan. Di samping kedua faktor di atas, proses asimilasi juga berkaitan erat dengan ukuran kelompok minoritas, tingkat perbedaan kalangan minoritas dengan kalangan mayoritas dan juga kadar imigrasi. Pada umumnya kelompok minoritas yang kecil jumlahnya lebih mudah diasimilasikan atau diresapi dibandingkan dengan kelompok minoritas yang jumlah anggotanya lebih besar. Minoritas yang mempunyai

kebudayaan dan tradisi yang jauh berbeda dengan kalangan mayoritas sukar diasimilasikan. Kalangan pendatang yang datang secara berbondong-bondong dalam suatu jangka waktu pendek lebih sukar untuk diresapi dibanding mereka yang datang secara kecil-kecilan dalam jangka waktu panjang.

Asimilasi menjadi tujuan yang dicita-citakan oleh kebanyakan masyarakat, terutama masyarakat majemuk. Oleh karena latar belakang yang berbeda-beda, maka masyarakat mempunyai kadar asimilasi yang berbeda-beda pula. Tetapi tidak ada masyarakat yang telah mencapai tingkat asimilasi sepenuhnya. Di Amerika Serikat, kalangan minoritas seperti Cicano, Jepang dan Cina masih melanggengkan identitas dan tradisi masing-masing walaupun mereka menganggap diri mereka sebagai warganegara Amerika. Di Asia Tenggara, beberapa kajian telah menunjukkan bahwa bangsa Cina masih belum diresapi dengan sepenuhnya. Di Indonesia, Thailand dan Filipina, bangsa Cina telah banyak membuat penyesuaian dengan keadaan lokal, seperti mempelajari bahasa lokal dan cara hidup orang lokal, bahkan kawin dengan orang lokal. Namun, mereka tetap tinggal sebagai bangsa Cina dalam hal-hal tertentu dan tetap menganggap diri mereka sebagai orang Cina. Inilah sebabnya *Richard Coughlin* menganggap orang Cina di Asia Tenggara sebagai mempunyai dua kepribadian: sebagai orang Cina dan sebagai penduduk Asia Tenggara.

Malaysia adalah satu kasus yang agak istimewa. Oleh karena jumlah bangsa Cina sebagai minoritas begitu besar (lebih dari satu pertiga jumlah penduduk), maka bangsa Cina paling sukar diasimilasikan. Di antara faktor utama yang menjadi penghalang terjadinya proses asimilasi di Malaysia adalah agama Islam, sekolah dan pelajaran Cina, dan pemisahan fisik. (Lihat Ting Chew Peh, "Some Problems of Chinese Assimilation in Peninsular Malaysia" dalam H.M. Dahlan [ed.], *The Nascent Malaysian Society*, 1976).

Tidak terjadi asimilasi yang lengkap memang kenyataan yang terjadi di masyarakat. Barangkali ini disebabkan tiap-tiap kelompok manusia mempunyai tekad yang kuat untuk mempertahankan serta melanggengkan

kebudayaan dan identitas masing-masing. Melihat hakikat ini, maka teori apapun tentang hubungan ras yang menganggap asimilasi sebagai satu hal yang pasti terjadi adalah lemah dan kurang memuaskan. Salah satu contoh teori itu adalah dari Robert E. Park yang menyatakan bahwa dalam situasi interaksi sosial, pertemuan akan diikuti dengan persaingan, penyesuaian dan akhirnya asimilasi. **Lihat Akomodasi.**

Birokrasi

Masyarakat modern mempunyai satu ciri yang paling nyata yaitu terjadinya organisasi-organisasi formal yang besar. Cita-cita organisasi ini adalah untuk menjalankan tugas-tugas administrasi dan mencapai kecakapan dalam segala bidang kehidupan. Organisasi ini dibentuk untuk menjalankan fungsi administrasi dengan menyelaraskan tugas-tugas individu secara sistematis. Organisasi ini dikenal sebagai birokrasi.

Jadi, birokrasi bisa dipahami sebagai satu organisasi formal yang diselenggarakan berdasarkan kepada peraturan-peraturan serta bagian atau biro yang terdiri dari administrator yang terlatih. Biasanya organisasi seperti ini mempunyai pemusatan otoritas, dan menekankan unsur tatasusila, pengetahuan teknik dan tatacara yang impersonal.

Konsep ini diartikan juga sebagai aspek-aspek administrasi organisasi formal, yaitu alat kontrol yang mempunyai hierarki, yang perlu dibedakan dari organisasi itu. Sebagai contoh, walaupun buruh pabrik merupakan sebagian dari organisasi formal, mereka tidak dianggap sebagai sebagian dari birokrasi, karena mereka bukan sebagian dari administrasi.

Konsep birokrasi mula-mula dikemukakan oleh ahli ekonomi, *Vincent de Gournay* (1712-1759), diikuti oleh *John Stuart Mill* dan *Gaetano Mosca*. Tetapi Max Weberlah yang mengkaji konsep birokrasi secara terperinci. Menurut Weber, birokrasi mempunyai beberapa ciri seperti berikut:

1. *Pembagian tugas.* Segala kegiatan dan tugas dalam birokrasi dibagi menurut peraturan dan tatacara yang formal.
2. *Sistem peraturan.* Segala tugas dijalankan menurut satu sistem

peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu. Peraturan ini perlu dipelajari oleh para pegawai yang bekerja dalam birokrasi tersebut. Sistem peraturan diperlukan, tidak hanya untuk memastikan keseragaman dari segi pelaksanaan tugas, tetapi juga untuk menyelaraskan berbagai jenis tugas itu.

3. *Otoritas tersusun secara hierarkis*. Semua jabatan disusun berdasarkan hierarki. Orang yang berjabatan rendah menerima arahan serta diawasi oleh orang yang berjabatan lebih tinggi. Seorang pegawai bertanggungjawab kepada atasannya mengenai tindakannya sendiri serta tindakan pegawai-pegawai di bawah pengawasannya. Hubungan antara atasan dan bawahan ditentukan oleh peraturan tertentu.
4. *Tatacara impersonal*. Seorang pegawai menjalankan tugasnya secara formal dan impersonal, yaitu berdasarkan kepada peraturan tertentu tanpa menurut perasaan, suka-tidak suka, cinta atau benci. Pemisahan tugas-tugas resmi dari pertimbangan pribadi sangat perlu untuk mencapai keadilan dan ketepatan. Di samping itu, hubungan pribadi yang ada di antara pegawai-pegawai di luar kantor tidak semestinya mempengaruhi suatu keputusan resmi.
5. *Pengambilan pegawai*. Seorang calon dilantik berdasarkan kelayakan. Pegawai itu tidak bisa dikerjakan secara serampangan. Pekerjaan birokrasi merupakan kerja tetap bagi seorang individu. Gaji pegawai ditetapkan, demikian juga hal-hal lainnya. Selain itu, peraturan-peraturan juga dibuat berhubungan dengan kenaikan pangkat yang biasanya berdasarkan keahlian dan prestasi.

Ciri-ciri tersebut di atas adalah aspek-aspek formal suatu birokrasi. Aspek-aspek atau organisasi yang tidak formal dalam birokrasi tidak disentuh oleh Weber. Sebenarnya, aspek-aspek yang tidak formal serta pekerjaan-pekerjaan yang tidak resmi merupakan hal biasa dalam birokrasi.

Birokrasi, apabila digunakan dengan sebaik-baiknya dapat menghasilkan kecakapan administrasi organisasi atau negara. Oleh karena itulah masyarakat modern dan kompleks, dewasa ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa birokrasi. Namun, fungsi negatif atau ketidakcakapan juga bisa ada dalam birokrasi. Ini terjadi ketika timbul terlalu banyak *red tape*; misalnya peraturan-peraturan terlalu ketat dan *impersonal*, terlambat membuat keputusan, pegawai kurang bertanggungjawab, dan sebagainya. Ketidakcakapan juga bisa timbul akibat kekurangan tenaga kerja yang terlatih untuk menjalankan tugas, permusuhan di kalangan pegawai, penyelewengan dan sebagainya.

Birokrasi adalah suatu contoh tipe ideal (*ideal type*) dalam pengertian Max Weber. Sebagai suatu tipe ideal, birokrasi dalam bentuk yang ideal tidak ada dalam masyarakat. Organisasi-organisasi formal yang ada dalam masyarakat hanya mendekati tipe ideal tadi dengan derajat yang berlainan. **Lihat Tipe Ideal.**

Definisi Situasi

Definisi situasi diartikan sebagai penafsiran mengenai suatu keadaan atau makna yang diberikan oleh anggota masyarakat terhadap situasi sosial. Pada umumnya seorang individu menilai atau menafsirkan keadaan sebelum tindakan yang dianggapnya tepat diambil. Penafsiran orang terhadap situasi pada umumnya ditentukan oleh kebudayaannya, terutama sekali oleh nilai dan norma sosialnya. Karenanya, individu yang mempunyai kebudayaan, nilai dan pengalaman yang sama biasanya memberi definisi atau penafsiran yang lebih kurang sama terhadap suatu situasi. Sebaliknya, individu yang mempunyai nilai dan pengalaman yang berbeda menafsirkan situasi sosial dengan cara yang berlainan. Sebagai contoh, reaksi dan penafsiran orang dewasa terhadap suatu situasi berbeda dengan reaksi dan penafsiran anak-anak karena anak-anak belum mengalami proses sosialisasi yang lengkap mengenai nilai dan norma.

Dalam suatu situasi sosial tertentu, perbedaan penafsiran oleh pihak-pihak yang terlibat mungkin menimbulkan salah paham atau konflik.

Sebagai contoh, suatu unjuk rasa yang damai bisa dianggap oleh pihak berkuasa sebagai sebuah ancaman, dalam hal ini polisi diperintah untuk membubarkan unjuk rasa itu.

Perilaku seseorang dalam suatu situasi berkaitan erat dengan penafsirannya terhadap situasi. Oleh sebab itu, pengertian mengenai penafsiran situasi itu sangat penting untuk memahami suatu perilaku sosial.

Diskriminasi

Diskriminasi artinya layanan yang berbeda-beda terhadap individu atau kelompok atas dasar-dasar tertentu, seperti ras, kebudayaan, jenis kelamin, agama atau kelas sosial. Dasar-dasar tersebut biasanya tidak berkaitan dengan kemampuan atau perilaku individu.

Perbedaan layanan yang berdasarkan kepada perbedaan ras atau fisik dikenal sebagai diskriminasi ras. Fenomena ini merupakan masalah rumit yang dihadapi oleh kebanyakan masyarakat majemuk. Di Amerika Serikat misalnya, diskriminasi ras mempunyai hubungan yang erat dengan sistem perbudakan yang ada di negara itu pada abad ke-18 dan ke-19. Walaupun perbudakan telah dihapuskan, tetapi ini tidak berarti ketidaksetaraan di antara suku telah dihapuskan juga. Pada masa sekarang, pendapat umum serta *American Creed* (cita-cita bangsa Amerika untuk mencapai kesamaan, demokrasi, kebebasan, keadilan dan ajaran Kristen lainnya), mengecam diskriminasi dan prasangka ras dalam bentuk apapun. Tetapi pada prakteknya diskriminasi dan prasangka berdasarkan warna kulit ternyata masih berlangsung. Bangsa kulit hitam masih didiskriminasikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan peluang mendapat rumah, pekerjaan dan pendidikan. Pada awalnya, modernisasi dan pembangunan ekonomi nampaknya tidak banyak memberi manfaat kepada bangsa kulit hitam di Amerika karena begitu banyak dari mereka masih tinggal di kawasan-kawasan kumuh.

Diskriminasi ras di Amerika Serikat telah mendorong kemunculan beberapa organisasi untuk menentang dan menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu contoh organisasi ini adalah Gerakan Kuasa Hitam (*Black Power*

Movement) yang didirikan oleh orang-orang Negro dan sebagian besar anggotanya terdiri dari bangsa Negro juga. Tujuan utama Gerakan Kuasa Hitam adalah untuk mempersatukan orang Negro dalam satu organisasi politik yang kuat bagi menentang diskriminasi ras. Gerakan ini mendesak supaya Negro diberi lebih banyak kuasa ekonomi, politik dan sosial.

Inggris juga tidak terlepas dari masalah diskriminasi walaupun etnis pendatang di Inggris (yang terdiri dari penduduk yang berasal dari Hindia Barat, India, Pakistan dan lain-lain) tidak melebihi dua persen dari jumlah penduduknya dan diskriminasi ras dilarang secara hukum. Bentuk-bentuk diskriminasi yang tidak resmi masih terjadi, terutama sekali dalam bidang pekerjaan dan perumahan.

Diskriminasi ras juga banyak terjadi di Afrika Selatan. Sebelum Mandela menjadi presiden, kalangan kulit putih yang memerintah melakukan berbagai jenis penindasan dan eksploitasi ke atas kalangan bukan kulit putih, terutama sekali bangsa Negro.

Berbeda dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat lain seperti Amerika Serikat dan Inggris di mana diskriminasi dan prasangka ras dilarang oleh pemerintah, dulu di Afrika Selatan, diskriminasi didukung oleh pihak pemerintah melalui hukumnya. Di sini diskriminasi dan rasisme telah menjadi satu cara hidup. Ini terbukti dengan kebijakan *apartheid* (pemisahan). Bangsa Negro dianggap sebagai *inferior* dan diberi layanan yang berbeda dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Keadaan ini didukung oleh hukum. Waktu itu hukum digunakan oleh pihak pemerintah (kalangan kulit putih) untuk memastikan supremasi mereka.

Di Asia Tenggara, corak diskriminasi yang terjadi berbeda dengan keadaan di Amerika Serikat, Inggris atau Afrika Selatan dalam dua aspek. Pertama, masalah ras di Amerika Serikat, Inggris dan Afrika Selatan melibatkan hubungan kalangan kulit putih dengan kalangan kulit hitam, berdasarkan pada perbedaan fisik. Sedangkan keadaan di Asia Tenggara melibatkan ras “kuning” dengan ras “coklat”, yang berdasarkan kepada perbedaan etnik dan kebudayaan.

Kedua, hampir di seluruh negara Asia Tenggara diskriminasi ras

melibatkan bangsa lokal dengan bangsa cina pendatang. Bangsa cina sebagai bangsa minoritas yang berpengaruh dalam bidang perdagangan menghadapi berbagai bentuk diskriminasi baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi.

Diskriminasi perlu dibedakan dari prasangka. Diskriminasi merujuk kepada hubungan sosial atau perilaku yang kentara, sementara prasangka lebih merupakan perasaan atau sikap yang subjektif. Namun, kedua fenomena ini saling berkaitan walaupun tidak semestinya mempunyai hubungan sebab akibat. Sebagai contoh, orang yang berprasangka tidak semestinya melakukan diskriminasi. **Lihat Prasangka, Ras.**

Elit

Dalam pengertian yang luas, elit adalah satu kalangan minoritas cerdas pandai yang berpengaruh dalam masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial, administrasi dan moral.

Para sosiolog generasi awal seperti V. Pareto dan G. Mosca menyempitkan pengertian konsep ini dengan mengalamatkan pada satu kalangan cerdas pandai yang memerintah (*governing elite*). Pareto, dalam bukunya *Mind and Society*, membedakan elit yang memerintah (yang menjadi tumpuan perhatiannya) dari elit yang tidak memerintah dan kalangan bukan elit. Mosca, dalam bukunya *The Ruling Class*, menekankan bahwa semua masyarakat terbagi kepada dua kalangan yang memerintah (*ruler*) dan yang diperintah (*ruled*) walaupun ia tidak menggunakan istilah elit.

Sirkulasi elit merupakan satu proses penting dalam masyarakat. Dalam proses ini kalangan elit yang memerintah diganti oleh kalangan elit yang lain. Kalangan elit, menurut Pareto, dapat dibagi menjadi dua jenis: *speculator* dan *rentier*. Tiap-tiap kalangan ini dicirikan dengan satu residu yang dominan. Kalangan *speculator* mempunyai banyak *residue for combinations* dan justru itu mereka lebih progresif dan cenderung kepada perubahan dan pembaruan serta siasat. Kalangan *rentier* mempunyai lebih banyak residu yang berkaitan dengan *persistence of aggregates*, dan

mereka lebih terikat dengan tradisi, lebih konservatif dan lebih cenderung menggunakan kekerasan. Pucuk pimpinan suatu masyarakat biasanya terdiri dari kedua kalangan itu secara bergiliran.

Teori Pareto dan Mosca mengenai elit sekaligus dapat menyangkal teori kelas Karl Marx dalam dua hal yang penting. *Pertama*, untuk menunjukkan bahwa konsep Marx mengenai satu 'kelas pemerintah' itu salah, karena perputaran elit yang tidak putus-putus dapat menghindarkan pendirian satu kelas pemerintah yang stabil dan tertutup. *Kedua*, untuk menunjukkan bahwa keadaan masyarakat tanpa kelas adalah suatu hal yang mustahil, karena dalam tiap-tiap masyarakat pasti ada satu kalangan minoritas yang betul-betul memerintah.

Analisis Pareto dan Mosca mengenai kalangan elit mempunyai pengaruh yang luas di kalangan ahli ilmu sosial sesudahnya seperti C. Wright Mills. Dalam bukunya *The Power Elite*, Mills menerangkan alasan kenapa ia lebih suka menggunakan istilah *power elite* daripada istilah yang lain. Ia kemudian membedakan tiga kalangan elit utama di Amerika Serikat: pemimpin politik, pemimpin organisasi, dan pemimpin tentara.

T. B. Bottomore, dalam bukunya *Elites and Society* mencoba menganalisis teori-teori elit yang dikemukakan oleh Mosca, Pareto, C. Wright Mills dan lain-lain. Ia mendefinisikan elit sebagai kelompok pekerjaan yang berfungsi serta mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat.

Empirisisme

Sebagai satu doktrin filsafat, empirisisme berarti semua pengetahuan itu muncul dari pengalaman. Dalam bidang ilmu, konsep ini berhubungan dengan pandangan bahwa semua rumusan hanya dianggap sah setelah diuji dengan teknik-teknik yang objektif dan disahkan oleh pengalaman panca indera. Empirisisme berdasarkan kepada anggapan bahwa hanya apa yang dapat kita rasakan dengan indera lah yang benar. Maka, ujian terakhir suatu kebenaran ilmu adalah pengalaman panca indera.

Dalam bentuk yang berlebihan, konsep ini bermakna satu percobaan untuk mengabaikan model dan konsep teoretis dalam penelitian ilmiah. Ahli-ahli empirik menekankan definisi yang bercorak operasional dan korelasi statistik di antara variabel untuk mengkaji hubungan sosial dan aspek-aspek kehidupan sosial lain tanpa orientasi teori. Inilah hal yang banyak dikritik oleh para sosiolog.

John Rex, misalnya dalam *Key Problems of Sociological Theory*, mengkritik sosiologi empirik dan meragukan apakah kajian empirik itu dapat dianggap sebagai sosiologi. Dia menegaskan bahwa sosiologi empirik jarang sekali sampai pada tingkat deskripsi. Jika sekiranya sosiologi empirik mencoba berbuat demikian dengan menggunakan metode perbandingan, biasanya tidak jelas variabel yang diperbandingkannya karena memang kekurangan orientasi teori.

Namun, penelitian empirik juga mempunyai fungsi tertentu. Terdapat korelasi antara penelitian empirik dengan teori dalam sosiologi. Keduanya memberi sumbangan timbal-balik. Teori dapat memberikan garis panduan terhadap penelitian empirik. Penelitian empirik yang didorong oleh teori mungkin membangkitkan teori-teori baru, yang kemudian akan membawa pada penelitian yang lebih lanjut. Peranan timbal-balik di antara teori dan penelitian nampaknya tidak ada ujungnya. **Lihat Teori Sosiologi.**

Estet

Estet ialah satu bentuk stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat Eropa pada Zaman Pertengahan (*Medieval*). Berbeda dengan sistem kasta atau kelas, sistem estet berdasarkan kepada hukum dalam masyarakat. Ini berarti bahwa semua hak dan tanggung jawab anggota masyarakat ditentukan oleh hukum secara jelas.

Satu estet juga bisa dianggap sebagai satu lapisan sosial. Tiap-tiap lapisan atau estet mempunyai hak dan tugas serta keistimewaan dan beban yang tersendiri. Lapisan itu biasanya terdiri dari keluarga dan bukan individu. Status orang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi.

Dalam sistem estet, peluang mobilitas terbatas. Dibandingkan

dengan sistem kasta di kalangan masyarakat Hindu yang bercorak tradisi, sistem estet agak kurang ketat dan lebih terbuka, yaitu terdapat sedikit peluang untuk mobilitas ke atas, terutama sekali dalam suatu estet tertentu. (Tiap-tiap satu estet terdiri dari berbagai jenis pekerjaan dan tingkat sosioekonomi).

Sistem estet mempunyai sejarah yang agak panjang. Sistem ini mula-mula muncul dalam Imperium Romawi Kuno dan kemudian merebak ke merata masyarakat Eropa yang bercorak feodal pada waktu itu. Sistem ini berkaitan erat dengan pemilikan tanah. Dalam masyarakat ini tanah bukan saja menjadi pangkal kekayaan tetapi menjadi ukuran kedudukan status dan kekuasaan.

Oleh karena perbedaan keadaan sosial di kalangan masyarakat di Eropa, kesemua sistem estet yang ada juga berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Selanjutnya, jumlah estet yang ada juga berubah dari satu tempat ke satu tempat. Namun, pada umumnya kita bisa membedakan tiga estet atau lapisan yang utama, kalangan paderi (*clergy*), kalangan bangsawan (*nobility*) dan rakyat biasa (*commoners*).

Kalangan paderi adalah kalangan yang teratur, berpengetahuan dan berkuasa terutama sekali dalam soal agama. Mereka mempunyai status yang istimewa dalam masyarakat. Oleh karena kalangan ini tidak dibenarkan berumahtangga, maka statusnya hanya dapat diperoleh melalui pencapaian (prestasi). Anggota estet lain bisa menjadi paderi melalui proses mobilitas ke atas.

Kalangan bangsawan adalah kalangan pemerintah dan kebanyakannya terdiri dari para pahlawan. Kalangan ini juga dianggotai oleh bangsawan yang berlainan statusnya. Seringkali konflik yang ada di antara anggota-anggota kalangan ini berpangkal dari persaingan untuk memperleh tanah. Sebagai satu kalangan yang istimewa dan yang memerintah, kalangan bangsawan ini mempunyai cara hidup yang tersendiri dan jarang sekali bercampur gaul dengan kalangan rakyat biasa.

Kalangan rakyat biasa adalah kalangan yang diperintah dan tertindas. Mereka tidak mempunyai kuasa politik. Kebanyakan mereka

terdiri dari kalangan tani, tukang, orang suruhan, dan budak.

Seperti sistem kelas dan sistem kasta, estet pada dasarnya merupakan satu sistem ketidaksetaraan (*inequality*) yang didukung kuat oleh sistem hukum. **Lihat Stratifikasi Sosial.**

Etnosentrisme

Istilah ini diciptakan oleh antropolog W.G. Sumner. Etnosentrisme adalah sikap atau kepercayaan bahwa kebudayaan kita sendiri lebih baik dan lebih tinggi nilainya dari kebudayaan kelompok lain. Suatu kelompok dikatakan etnosentrik di mana anggotanya menilai kebudayaan lain berdasarkan kepada standard dan nilai kebudayaannya sendiri, dan menganggap nilai kebudayaan lain lebih rendah. Etnosentrisme membayangkan keengganan atau ketidakmampuan suatu kelompok untuk menghargai pandangan kelompok dari kebudayaan atau masyarakat yang lain.

Manusia yang etnosentrik menganggap dirinya sebagai 'manusia' sedangkan orang lain kurang dari manusia, di anggap biadab atau hantu. Orang luar diberi sebutan yang kurang sedap seperti hantu asing, babi, orang biadab yang berbulu, pemakan ular, dan sebagainya. Ketika orang asing dilihat berdasarkan nilai dan standard kita sendiri, mereka tentu sekali kelihatan ganjil, kurang ajar, malahan tidak mempunyai tatasusila.

Kalau kita menganggap etnosentrisme sebagai penilaian dan penghakiman yang berdasarkan kepada keutamaan yang tidak rasional dan tidak dapat dibuktikan sah atau tidaknya dengan cara rasional, maka unsur-unsur etnosentrisme bisa dikatakan ada dalam semua masyarakat dan kebudayaan. Teori modern mengenai rasisme dan nasionalisme yang ekstrem adalah bentuk etnosentrisme yang buruk.

Keutamaan yang tidak kritis terhadap kebudayaan diri sendiri dan prasangka terhadap kebudayaan asing, dan anggapan bahwa hanya masyarakat kita sendiri menghargai nilai-nilai rohaniah, manakala masyarakat lain dicemari dengan nilai-nilai material merupakan beberapa contoh etnosentrisme. Perlu juga ditegaskan bahwa etnosentrisme bukan

saja berarti memberi keutamaan kepada kebudayaan sendiri, tetapi juga berarti perasaan mengagung-agungkan kebudayaan sendiri di samping meremehkan kebudayaan yang lain.

Akibat dari *etnosentrisme*, kerap kali anggota masyarakat plural gagal memahami tujuan dan gerak-gerik anggota masyarakat lainnya. Salah paham bisa ada terutama sekali dalam bidang-bidang yang dianggap suci. Perilaku yang melanggar nilai-nilai suci bisa menimbulkan kemarahan, ataupun reaksi lain yang menguatkan lagi ide stereotipe yang ada terhadap kalangan lain.

Walaupun begitu, etnosentrisme juga mempunyai fungsi tertentu. Etnosentrisme dapat memperkuat unsur-unsur budaya suatu masyarakat dengan memberi perhatian serta penekanan kepada perbedaan kebudayaan. Dengan itu, etnosentrisme dapat memupuk persatuan di antara anggota masyarakat. Etnosentrisme juga dapat membantu melanggengkan disiplin dan semangat perjuangan (*morale*) suatu kelompok tertentu. Dengan demikian, etnosentrisme seringkali ditekankan ketika ada konflik antar kelompok. Sebagai contoh, ketaatan partai sering ditekankan pada masa pemilu. Demikian juga dalam masa revolusi, permusuhan kelas menjadi persoalan yang paling banyak ditekankan.

Selama manusia menjadi etnosentrik sepenuhnya, maka selama itulah mereka akan melihat orang lain berdasarkan ide-ide *stereotipe* yang ada. Tetapi, dalam dunia modern ini, kemajuan teknologi dan kerjasama internasional telah memudahkan perhubungan di antara manusia dari berbagai keturunan yang bagi individu melihat bukti-bukti yang bertentangan dengan ide-ide stereotipe dan seterusnya ini mungkin dapat memunculkan pengertian. **Lihat Rasisme.**

Evolusi Sosial

Evolusi sosial merupakan satu teori perubahan sosial yang berdasarkan anggapan bahwa masyarakat berkembang melalui tahap-tahap tertentu, dari bentuk yang mudah kepada bentuk yang lebih kompleks.

Ide evolusi sosial diambil secara langsung dari teori evolusi

biologi, dan perkembangan masyarakat disamakan dengan pertumbuhan organisme biologi. Herbert Spencer adalah sosiolog yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologi. Ia berpendapat masyarakat berubah dari bentuk yang mudah kepada bentuk yang kompleks, dan dari bentuk yang seragam kepada bentuk yang beraneka ragam.

Ide Auguste Comte tentang perubahan masyarakat juga bercorak evolusi. Teori evolusi sosialnya diuraikan dalam “Hukum Tiga Tingkatan”. Menurut hukum ini masyarakat atau pemikiran manusia berkembang melalui tiga tahap yaitu primitif atau teologi, metafisik, dan positif. Comte menganggap masyarakat sebagai organisme sosial yang mempunyai harmoni dari segi struktur dan fungsi. Kemajuan sosial, menurutnya, dicirikan dengan pengkhususan fungsi yang semakin bertambah dan kecenderungan ke arah penyesuaian organ yang lebih sempurna.

Para pemikir lain dalam abad ke-19 menumpukan perhatian kepada berbagai aspek evolusi sosial. Sebagai contoh, Henry Maine dalam karyanya *Ancient Law* (1861), berpendapat bahwa masyarakat berkembang dari bentuk organisasi yang hubungannya didasarkan kepada status dan bentuk yang berdasarkan kontrak.

Tokoh-tokoh lain yang menggunakan rangka dasar evolusi dalam analisis mereka adalah Edward Tylor, Emile Durkheim dan L.H. Morgan. Teori evolusi sosial kerap dikaitkan dengan kepercayaan bahwa kemajuan sosial adalah hal yang tidak dapat dielakkan dan pasti akan ada dalam proses evolusi. Malah pada tingkatan awal perkembangan teori sosiologi, istilah “evolusi” terkadang diasosiasikan dengan “perubahan”, “pembangunan”, dan “kemajuan”. Oleh karena seolah-olah terdapat “*value bias*” dalam teori evolusi dan ia tidak terbuka kepada pembuktian empirik, maka konsep evolusi sosial kini jarang digunakan oleh para sosiolog. **Lihat Perubahan Sosial.**

Fakta Sosial

Istilah ini mula-mula diperkenalkan dalam sosiologi oleh Emile Durkheim. Menurutnya, sosiologi pada dasarnya adalah satu bidang ilmu

yang mengkaji fakta-fakta sosial. Fakta sosial adalah: “Satu cara bertindak, apakah tetap atau tidak, yang mempunyai satu sekat (*constraint*) luar; atau satu cara bertindak yang umum dalam suatu masyarakat, yang ada dengan sendirinya, yaitu bebas dari manifestasi individunya.”

Menurut definisi Durkheim ini, fakta sosial mempunyai empat ciri yang membedakannya dari fakta bukan sosial.

Ciri-ciri tersebut adalah:

1. Fakta sosial merupakan suatu yang ada di luar orang perseorangan.
2. Fakta sosial mengenakan paksaan atau sekat ke atas individu.
3. Fakta sosial bersifat umum.
4. Fakta sosial bebas dari manifestasi atau melampaui manifestasi individu.

Contoh fakta sosial termasuklah undang-undang, adat istiadat, sistem bahasa, kepercayaan, upacara agama, sistem keuangan, sistem profesi, dan sebagainya. Semua ini dikatakan fakta sosial karena terdapatnya kuasa paksaan dan kuasa ini ada di luar kesadaran individu. Usaha Durkheim untuk menarik perhatian kita kepada keistimewaan fakta-fakta sosial itu merupakan sumbangan yang besar dalam bidang sosiologi. Usahanya ini timbul karena kesediaan dan rasa tidak puas hatinya terhadap keadaan sosiologi pada awal abad kesembilan belas, yang merangkumi aspek-aspek manusia begitu luas seperti aspek biologi, psikologi dan sosial. Durkheim melihat perlunya mengubah keadaan yang tidak sehat itu dengan membatasi ruang lingkup sosiologi sehingga tinggal fakta-fakta yang bisa dibedakan (*distinguishable facts*). Ini karena ia berpendapat, tidak ada satu bidang ilmu pun yang dapat mencapai ketepatan kalau bidang itu mencoba merangkumi bidang yang begitu luas.

Durkheim mendesak bahwa fakta-fakta sosial mesti dianggap sebagai “benda”. Desakan ini agak menyesatkan karena ia seolah-olah membayangkan bahwa segala fakta sosial dan kuasa paksaannya bisa dilihat secara langsung. Adalah lebih mudah diterima kalau apa yang

Durkheim maksudkan adalah fakta-fakta sosial dan kuasa paksaannya perlu dikaji secara objektif. **Lihat Institusi Sosial, Norma Sosial.**

Feodalisme

Feodalisme sebuah sistem sosial yang ada di Eropa Barat dari pada abad ke-10 hingga abad ke-14. Sistem ini tidaklah seragam; berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Namun, pada umumnya feodalisme berdasarkan pada hubungan di antara kalangan bangsawan (*lord*) dengan *vassal* (orang-orang yang mengerjakan tanah kepunyaan bangsawan). Hubungan ini bersandarkan kepada satu sistem pemegangan tanah (*land tenure*). Tanah dimiliki oleh kalangan bangsawan dan tanah itu biasanya dipecahkan kepada bagian-bagian tertentu yang dikenal sebagai *fief*. Bagian tanah ini dikerjakan oleh *vassal* dengan syarat *vassal* memberi layanan tentara kepada kalangan bangsawan. Penerimaan hak untuk mengerjakan tanah kepunyaan bangsawan juga berarti *vassal* mesti mengangkat sumpah setia kepada kalangan bangsawan, di samping memberikan layanan tentara ketika diperlukan.

Perlu juga ditegaskan bahwa dalam sistem feodal kalangan *vassal* tidak memiliki tanah yang dikerjakan (*fief*). *Fief* yang diterima oleh seorang *vassal* dari *lord* dapat dibagikan lagi dan diberikan kepada orang-orang lain. Jadi seorang *vassal* bisa juga menjadi *lord* kepada *vassal* lain.

Dari segi prinsipnya *fief* mesti dikembalikan kepada *lord* sekiranya *vassal* meninggal dunia. Tetapi pada praktiknya *fief* itu biasanya diwarisi oleh anak si mati setelah diberi sedikit bayaran.

Ciri-ciri utama sistem feodal adalah:

1. Ada taat setia yang bercorak pribadi di antara kalangan bangsawan dengan *vassalnya*. Hubungan di antara mereka yang bercorak kontrak melibatkan hak dan tugas-tugas tertentu.
2. Kuasa politik juga bersifat pribadi. Fungsi-fungsi politik tertumpu kepada beberapa orang saja tanpa banyak pembagian tugas.
3. Tanah merupakan dasar ekonomi dan faktor utama yang

menentukan hubungan sosial.

4. Munculnya satu elit tentara serta satu angkatan tentara pribadi.

Feodalisme di Eropa mencapai kegemilangannya dalam abad ke-12 dan ke-13. Keruntuhannya dalam abad ke-14 sebagian besarnya disebabkan oleh kemunculan kota-kota, kelas menengah, ekonomi perdagangan, komunikasi yang lebih baik, serta sentralisasi politik.

Walaupun konsep feodalisme berdasarkan masyarakat feodal di Eropa, konsep ini juga digunakan untuk merujuk kepada masyarakat lain yang mempunyai sistem organisasi yang menyerupai sistem feodal di Eropa. Contoh sistem feodal di luar Eropa adalah sistem di Jepang dari abad ke-11 hingga abad ke-19, terutama sekali dalam abad ke-16.

Fungsi

Istilah fungsi merujuk kepada konsekuensi objektif (*objective consequence*) suatu fenomena sosial terhadap fenomena yang lain atau sistem keseluruhannya. Durkheim, misalnya, menggunakan pengertian ini ketika ia mengatakan bahwa fungsi pelaksanaan agama dalam masyarakat adalah untuk memupuk dan memelihara persatuan sosial.

Pengertian fungsi di atas membawa implikasi bahwa fenomena sosial adalah saling berkaitan dan saling bergantung. Oleh karena itu perubahan dalam satu hal menimbulkan pengaruh tertentu ke atas yang lain.

Konsep fungsi juga membawa maksud tujuan. Penggunaan fungsi didasarkan kepada analogi yang dibuat dengan organisme biologi. Masyarakat, seperti halnya organisme biologi, mempunyai keperluan tertentu. Tiap-tiap fenomena sosial dianggap mempunyai fungsi untuk memenuhi keperluan atau tujuan tertentu dalam masyarakat.

Fungsi suatu kegiatan atau fenomena dianggap berkaitan erat dengan kelanjutan dan pemeliharaan suatu sistem sosial. Seperti kata Radcliffe Brown: Fungsi kegiatan yang berulang-ulang, seperti hukuman ke atas satu perbuatan kriminal, ataupun upacara pengkebumian, adalah

peranan yang dimainkan dalam kehidupan sosial secara keseluruhan dan juga merupakan sumbangan yang diberikan ke arah pemeliharaan kelangsungan struktur.

Fungsi suatu kegiatan mungkin disengaja dan diakui oleh mereka yang terlibat. Sebaliknya kegiatan itu mungkin juga mendatangkan pengaruh yang tidak disengaja dan diakui. Jenis fungsi yang pertama dikenal sebagai fungsi yang nampak (*manifest*) dan jenis yang kedua dikenal sebagai fungsi terpendam (*latent*). (Lihat Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*).

Berdasarkan kepada analogi organisme biologi kepada organisme sosial, ada pula anggapan bahwa masyarakat, seperti organisme biologi, merupakan sistem yang bersifat integrasi atau penyatuan fungsi (*functional unity*), dalam arti bahwa hubungan di antara bagian-bagiannya berada dalam keadaan harmoni. Fungsi tiap-tiap kegiatan adalah untuk melanggengkan keadaan harmoni itu. Tetapi jika sekiranya suatu kegiatan itu didapati tidak memberi sumbangan ke arah integrasi, malahan menimbulkan disintegrasi, maka kegiatan itu dianggap mempunyai fungsi negatif (*dysfunctional*).

Satu istilah yang berkaitan adalah prasyarat fungsi (*functional prerequisites*) yang merujuk kepada syarat atau keadaan yang diperlukan untuk meneruskan suatu sistem sosial. Di antara prasyarat itu termasuk sistem ekonomi, sistem politik, sistem komunikasi, sistem nilai dan norma, sistem sosial dan sebagainya.

Konsep fungsi banyak digunakan oleh sosiolog dan antropolog awal dalam penelitian mereka mengenai masyarakat sederhana (*simple*), yang tidak banyak mengalami perubahan sosial. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam hal ini di antaranya Radcliffe-Brown dan Malinowski. Pendekatan mereka kemudian dikenal sebagai fungsionalisme.

Pada umumnya, fungsionalisme merupakan pendekatan yang menganalisis fenomena sosial dari segi fungsi atau tujuan yang dipenuhi dalam suatu sistem sosial. Masyarakat, menurut pendekatan ini, terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan dan saling tergantung. Oleh karena itu, suatu bagian itu hanya dapat dipahami dalam konteks keseluruhan.

masyarakat itu. Karena ada keadaan yang saling berkaitan, maka perubahan dalam satu bagian memberi pengaruh ke atas bagian yang lain. Perubahan itu mungkin menimbulkan keadaan tidak seimbang dalam masyarakat. Walaupun begitu, keadaan itu akan disesuaikan sehingga ada keadaan seimbang (*balance*). Dengan kata lain, anggapan dasar fungsionalisme adalah sistem sosial itu berada dalam keadaan yang bersifat integrasi.

Pendekatan fungsionalis telah banyak dibicarakan, dikembangkan dan diperbarui oleh para sosiolog dan antropolog. Dalam bentuk yang lebih baru dan canggih, seperti yang dinyatakan oleh Parsons, Merton dan Davis, fungsionalisme mengandung beberapa anggapan yang dasar seperti berikut:

1. Masyarakat terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan, oleh karena itu masyarakat hendaklah dilihat secara holistik.
2. Hubungan sebab-musabab (kausalitas) adalah majemuk dan bersifat timbal-balik (*multiple and reciprocal*).
3. Sistem sosial atau masyarakat berada dalam keadaan seimbang yang dinamis akibat dari penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan.
4. Integrasi sosial berdasarkan kepada konsensus nilai.

Pendekatan fungsionalis, baik bentuk lama seperti yang dikemukakan oleh Malinowski, maupun bentuk baru, telah banyak dikritik oleh para sosiolog. Di antara kritik itu adalah apa yang dikemukakan oleh Percy Cohen, dalam bukunya *Modern Social Theory*:

1. Kelemahannya karena pendekatan tersebut berdasarkan kepada analogi organik.
2. Teleologis, yaitu menganggap pengaruh sebagai sebab.
3. Tidak dapat menguraikan perubahan sosial dan konflik secara memuaskan.
4. Sukar untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji.
5. Menghalangi usaha perbandingan dan generalisasi.

Namun, pendekatan ini juga mempunyai kelebihan. Pendekatan ini, misalnya, menyatakan bahwa institusi-institusi sosial adalah saling berkaitan satu sama lain. Di samping itu, pembagian yang dilakukan oleh Merton (yakni di antara fungsi yang nampak dan yang tersembunyi) bahwa fungsi suatu institusi sosial tidak semestinya nampak dan tidak semestinya seperti apa yang diharapkan. Dengan ini, para peneliti didorong untuk meninjau dengan lebih teliti tentang perjalanan dan pergerakan suatu institusi sosial. Pembagian Merton juga menunjukkan kemungkinan bahwa suatu institusi bisa mempunyai beberapa fungsi tertentu. **Lihat Struktur, Konsensus, Keseimbangan Sosial.**

Generalisasi

Ada beberapa jenis generalisasi:

1. Korelasi atau pertalian empirik antara fenomena sosial yang konkrit, seperti kehidupan kota dan persentase perceraian.
2. Generalisasi yang menformulasikan keadaan yang memunculkan institusi atau pembentukan sosial yang lain, seperti berbagai penjelasan tentang asal usul kapitalisme.
3. Generalisasi yang menegaskan bahwa perubahan dalam institusi tertentu sering berkaitan erat dengan perubahan dalam institusi yang lain, seperti kaitan antara perubahan dalam struktur kelas dengan perubahan sosial yang lain.
4. Generalisasi yang menegaskan berbagai jenis tahap perkembangan, seperti percobaan untuk mengetahui tahap perkembangan dalam bidang ekonomi.
5. Generalisasi yang menerangkan arah (*trend*) utama dalam evolusi kemanusiaan secara umum, seperti "Hukum Tiga Tingkatan" oleh Auguste Comte dan Teori Marx tentang perubahan masyarakat dari tingkatan primitif ke tingkatan komunis.
6. Generalisasi yang menyatakan anggapan tertentu mengenai perilaku manusia serta implikasi anggapan itu, seperti sebagian

teori ekonomi.

Jenis pertama dianggap generalisasi empirik. Jenis (2) dan (3) bisa dianggap sebagai formulasi hukum universal mengenai *trend*. Jenis (4) dan (5) tidak bisa dianggap sebagai generalisasi teoretis. Keduanya adalah kenyataan deskriptif-historis dan penafsiran. Akhirnya, jenis (6) hanya ada dalam bidang ekonomi. Dalam bidang sosiologi, anggapan tentang perilaku manusia sebenarnya menjadi tumpuan kajian kita.

Menurut Bottomore, sosiolog nempaknya tidak begitu berminat membangun generalisasi yang lebih luas dari korelasi empirik yang telah mereka bangun, padahal generalisasi yang lebih luas bisa dilakukan. Bottomore juga berpendapat sosiolog perlu menumpukan perhatian kepada pembangunan generalisasi yang luas. Generalisasi yang luas itu kemudian perlu diuji dengan penelitian yang lanjut. Dengan cara demikian sosiologi mungkin lebih mirip kepada pembentukan teori yang saling mengoreksi dan membangun, seperti sifat bidang atau disiplin yang lain.

Hipotesis

Dalam pengertian yang paling memuaskan, hipotesis adalah kenyataan tentang hubungan yang dipercaya adanya di antara satu fenomena dengan fenomena yang lain, atau tentang sifat suatu fenomena. Dalam penelitian ilmiah, hipotesis adalah kenyataan yang bersifat sementara tentang hubungan di antara fenomena yang tertentu, yang bisa diuji secara empirik.

Hipotesis bisa dibangun dari berbagai dasar. Ia bisa dibangun berdasarkan intuisi atau gerak hati seorang individu. Ia juga bisa dibangun berdasarkan penemuan kajian yang telah lalu. Ataupun ia juga bisa berpangkal dari teori, melalui proses deduksi logis.

Apapun dasarnya, hipotesis memainkan dua peran penting dalam suatu kajian. Pertama, ia memberi panduan tentang jenis data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah kajian. Kedua, ia memberi panduan tentang cara bagaimana data yang dikumpulkan itu bisa diatur

secara berpengaruh dalam analisis.

Pembentukan hipotesis yang berguna adalah langkah yang cukup penting dalam penelitian. William Goode dan Paul Hatt dalam *Methods in Social Research* (1952), berpendapat bahwa hipotesis yang berguna perlu mempunyai sifat-sifat berikut:

1. Konsep dan definisi dalam hipotesis mestilah jelas dan tepat.
2. Hipotesis perlu mempunyai referensi empiris. Hipotesis tidak bisa berisi pandangan moral.
3. Hipotesis perlu khusus. Segala indeks yang digunakan perlu dinyatakan dengan jelas.
4. Hipotesis perlu dikatkan dengan teknik-teknik yang ada.
5. Hipotesis perlu dikatkan dengan teori-teori yang ada.

Hipotesis berkaitan erat dengan teori. Dalam penelitian ilmiah, hipotesis diterbitkan dari teori melalui proses deduksi logis. Kemudian, hipotesis tersebut diuji (dengan cara test, penelitian, dan sebagainya). Sekiranya hipotesis itu tidak disahkan atau hanya sebagian saja yang disahkan, maka langkah yang sering diambil adalah mengkaji kembali hipotesis, membuat kembali pernyataan atau penjelasan, dan memperbarui teori tersebut. Sekiranya hipotesis itu disahkan, akan didapatkan hukum (*laws*), pernyataan probabilitas, atau pernyataan kecenderungan (*tendency statements*). **Lihat Teori, Generalisasi.**

Holisme

Prinsip ini menjelaskan bahwa kelompok atau masyarakat merupakan satu keseluruhan (*totalitas*) yang unik. Oleh sebab itu, kelompok atau masyarakat itu hanya dapat dipahami melalui keseluruhannya. Kelompok atau masyarakat ini tidak dapat dipahami kalau dikaji hanya unsur-unsur atau atom-atom yang menjadikan keseluruhan itu.

Dalam sosiologi, holisme atau pendekatan holistik telah disamakan dengan pendekatan fungsionalis (lihat, misalnya Percy Cohen, *Modern Social Theory*). Pada dasarnya, pendekatan ini menyatakan bahwa

masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan. Tiap-tiap bagian tidak bisa dikaji secara berlawanan. Suatu bagian perlu dikaji dalam hubungannya dengan bagian-bagian yang lain. Dengan kata lain, setiap bagian itu mesti dikaji dalam konteks keseluruhan masyarakat.

Pendekatan holistik berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sosiologi lain seperti Comte, Herbert Spencer dan Durkheim. Durkheim, misalnya, pernah menekan bahwa satu keseluruhan adalah lebih dari bagian-bagiannya. Menurutnya, satu keseluruhan tidak sama dengan jumlah bagian-bagiannya. Keseluruhan adalah sesuatu yang berbeda, dan sifatnya berbeda pula dengan sifat bagian-bagiannya.

Berdasarkan pada prinsip di atas, masyarakat, menurut Durkheim, bukanlah sekadar jumlah individu. Walaupun masyarakat ada akibat dari pertalian dan persekutuan individu, namun masyarakat mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Apa yang ditekankan oleh Durkheim adalah keseluruhan itu jauh lebih penting dari bagian-bagiannya. Penguraian bagian-bagian itu mesti berpandukan kepada keseluruhan dan bukan sebaliknya.

Ideologi

Ideologi adalah satu sistem ide yang saling bergantung (tradisi, kepercayaan, dan prinsip) dan mencerminkan serta mempertahankan kepentingan-kepentingan suatu kelompok atau masyarakat. Dengan kata lain, ideologi adalah suatu pola ide yang bukan saja menguraikan dan mengesahkan struktur sosial dan kebudayaan suatu kelompok sosial atau masyarakat, tetapi juga memberi justifikasi terhadap pola-pola perilaku, sikap, dan cita-cita kelompok atau masyarakat itu.

Istilah ideologi mula-mula diperkenalkan oleh ahli filsafat Perancis Destutt de Tracy (1755-1836). Menurutnya, ideologi adalah suatu ilmu atau kajian mengenai ide-ide. Tetapi tidak lama kemudian istilah ini berubah pengertiannya dan digunakan untuk merujuk kepada satu set ide bagi mempertahankan kepentingan tertentu.

Konsep ini banyak terdapat dalam tulisan Karl Marx. Marx menganggap ideologi sebagai suatu sistem ide dan kepercayaan untuk melanggengkan dan mempertahankan kepentingan kelas sosial tertentu. Sistem ide dan kepercayaan, menuntut pengertian Marx, biasanya berisi berbagai ide dan kepentingan kelas pemerintah atau aspirasi-aspirasi kelas yang diperintah. Bagi Marx, ideologi melibatkan gumpalan ide dan kepercayaan. Ideologi juga mewakili suatu bentuk kesadaran kelas yang terdistorsi dan menyesatkan. Seperti kata Raymond Aron:

Pada umumnya ideologi dipahami Marx sebagai kesadaran palsu atau mita palsu suatu kelas sosial mengenai diri dan mengenai masyarakat seluruhnya. Dia (Marx) sebagian besarnya menganggap teori ahli ekonomi borjuis sebagai ideologi kelas.

Menurut Aron juga, Marx bukan menuduh ahli ekonomi borjuis sebagai mempunyai niat untuk menipu para pelajar atau pembaca ataupun memberi suatu penafsiran palsu mengenai realitas. Marx lebih menganggap bahwa suatu kelas hanya dapat melihat dunia dari kaca mata kelas itu sendiri.

Konsep ideologi juga dikaitkan oleh Marx dengan alienasi. Seperti kata Bottomore dan Rubel (1963:21)

Konsep Marx mengenai “kesadaran palsu” dan “ideologi” berkaitan dengan konsep “alienasi”. Kesadaran palsu adalah kesadaran individu yang timbul dalam keadaan alienasi, dan ideologi adalah sistem kepercayaan yang dihasilkan oleh kesadaran palsu tadi.

Jadi, dapatlah dikatakan bahwa ideologi adalah sistem ide atau makna yang kita berikan terhadap dunia, masyarakat atau manusia, terutama sekali dalam bidang struktur politik. Sebagai satu contoh, ideologi kapitalis mungkin mengandung unsur-unsur seperti, antara lain:

1. Bekerja merupakan suatu hal yang baik dan kemalasan adalah sebaliknya.
2. Rajin dan usaha biasanya mendatangkan ganjaran dan keuntungan.
3. Kemiskinan itu disebabkan oleh sifat malas dan boros.

Di samping Marx, Karl Mannheim juga banyak membicarakan konsep ideologi (lihat *Ideology and Utopia*, 1936). Menurut Mannheim, ideologi merupakan segala ide dan pikiran yang diputar-balikkan begitu rupa untuk mempertahankan serta melanggengkan status quo. Jadi, ideologi adalah menifestasi kalangan yang mempunyai kepentingan sendiri. Konsep ideologi dikaitkan oleh Mannheim dengan konsep utopia, yaitu suatu doktrin yang menekankan pemberontakan dan perubahan.

Adakalanya perbedaan antara ideologi dan kebudayaan kurang jelas. Pada umumnya ideologi melibatkan penilaian, sedangkan kebudayaan lebih menitikberatkan kecakapan dan pengetahuan teknik. Terlebih lagi, kebudayaan biasanya dianut oleh semua lapisan masyarakat, sementara ideologi mungkin hanya dipegang oleh kalangan tertentu saja.

Kajian mengenai ideologi merupakan sebagian dari kajian Sosiologi Agama dan Sosiologi Politik. Kajian ini merupakan hal yang utama dalam Sosiologi Pengetahuan. **Lihat Alienasi, Kebudayaan.**

Institusi Sosial

Institusi adalah salah satu konsep sosiologi yang paling luas digunakan dan mempunyai beberapa pengertian yang berlainan. Ada kalangan yang menggunakan konsep ini untuk merujuk kepada suatu organisasi seperti universitas, perpustakaan atau asosiasi. Ada pula yang menganggapnya sebagai organisasi khusus seperti penjara, rumah sakit dan sekolah berasrama (dikenal sebagai institusi total). Konsep ini pun dimaksudkan sebagai suatu pola perilaku yang telah menjadi kebiasaan (*established*), atau suatu pola hubungan sosial yang mempunyai cita-cita sosial tertentu.

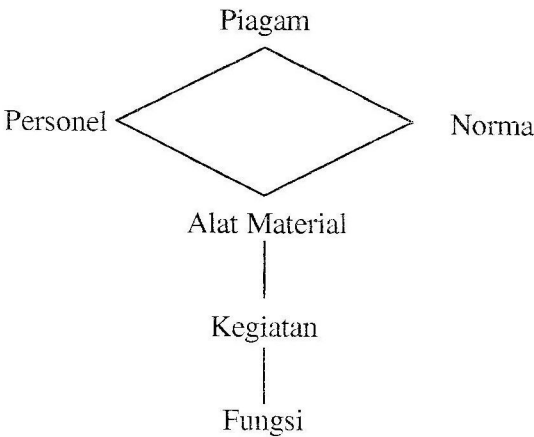
Pengertian yang paling banyak digunakan dan diterima dalam bidang sosiologi adalah pengertian yang ketiga. Namun sosiolog dan antropolog masih belum mencapai kesepakatan tentang penggunaan konsep ini.

E. Chinoy (*Society*, 1962) berpendapat bahwa istilah institusi perlu dikhususkan kepada pola perilaku yang telah disetujui. Oleh karena

itu, istilah lain hendaklah digunakan untuk menunjukkan aspek-aspek organisasi perilaku dan kelompok-kelompok yang terlibat. Contoh institusi yang diberikan oleh Chinoy adalah hukum pembunuhan dan kebiasaan yang menentukan interaksi sosial sehari-hari.

A. W. Gouldner dan H. Gouldner dalam buku mereka *Modern Sociology* melihat institusi sebagai cara yang standard untuk mengatasi berbagai masalah masyarakat, seperti upacara penguburan.

R. M. Maclver dan C. H. Page dalam buku mereka *Society* mencoba membedakan institusi dari persatuan. Institusi, bagi mereka adalah *established forms or conditions of procedure characteristic of group activity*. Kelompok yang terlibat dalam tatacara yang diterima secara meluas itu dikenal sebagai persatuan. Jadi gereja adalah persatuan, sedangkan sembahyang dan bentuk-bentuk pemujaan adalah institusi. Demikian juga kesatuan sekerja adalah persatuan, dan tawar menawar secara kolektif dan pemogokan adalah institusi. Seorang individu bisa menjadi anggota persatuan, tetapi tidak bisa menjadi anggota suatu institusi.



Gambar 1: Struktur Institusi

Institusi sosial yang utama adalah institusi perkawinan, institusi politik, institusi pelajaran, institusi ekonomi, dan institusi agama. Tiap-tiap institusi ini saling berkaitan dan masing-masing mempunyai fungsinya yang tersendiri. Institusi perkawinan, misalnya berfungsi mengontrol pola hubungan seks serta melahirkan generasi baru. Institusi ekonomi mempunyai fungsi untuk mengontrol produksi dan penggunaan barang dan layanan. Fungsi utama institusi pelajaran adalah mendidik anggota suatu kelompok serta melanggengkan warisan budaya sosialnya. **Lihat: Kebudayaan, Struktur Sosial.**

Integrasi Sosial

Integrasi sosial adalah proses mempersatukan berbagai kelompok dalam masyarakat melalui satu identitas bersama dengan menghilangkan perbedaan dan identitas masing-masing. Integrasi sosial merupakan harapan kebanyakan masyarakat terutama sekali bagi masyarakat majemuk atau masyarakat plural. Sebagian besar sosiolog mengatakan bahwa integrasi sosial perlu demi keharmonian, kesejahteraan dan kestabilan masyarakat, tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang dasar-dasar integrasi sosial. Pada umumnya sosiolog yang terlibat dalam persoalan ini dapat dibagi menjadi dua kalangan, kalangan fungsionalis dan kalangan konflik.

Kaum fungsionalis berpendapat bahwa pada dasarnya masyarakat berada dalam keadaan integrasi dari segi norma dan nilai. Mereka menekankan kemestian integrasi normatif yang mempunyai dua ciri utama. *Pertama*, adanya keselarasan di antara norma-norma yang berhubungan dengan berbagai perilaku dalam situasi-situasi yang berlainan. *Kedua*, adanya tingkat kepatuhan atau *congruence* yang tinggi di antara harapan-harapan mengenai perilaku seperti yang ditentukan oleh norma-norma dengan perilaku yang sebenarnya dari anggota masyarakat tersebut. Adakalanya istilah "konsensus nilai" yang merujuk kepada suatu persetujuan di kalangan anggota masyarakat mengenai nilai-nilai utama digunakan secara longgar untuk menggantikan integrasi normatif. Bagi kalangan fungsionalis, konsensus nilai menjadi dasar integrasi sosial suatu

masyarakat.

Pendapat kalangan fungsionalis ini banyak dikritik oleh sosiolog yang cenderung kepada teori konflik. Bagi kalangan ini, dasar integrasi sosial bukannya konsensus dari segi nilai, tetapi konflik, pembatasan dan paksaan. Salah seorang dari kalangan ini, P. L. Van den Berghe, dalam kajiannya mengenai masyarakat Afrika Selatan, membuat kesimpulan bahwa masyarakat Afrika Selatan penuh dengan konflik dan paksaan dari bangsa kulit putih terhadap bangsa bukan kulit putih. Konsensus nilai tidak ada sama sekali. Yang menjadi dasar integrasi sosial bukannya konsensus nilai, tetapi sebaliknya, paksaan politik dan saling ketergantungan dari segi ekonomi. Penyertaan kelompok-kelompok ras dalam satu sistem produksi yang sama merupakan suatu faktor integrasi yang penting dalam semua masyarakat majemuk. **Lihat Fungsi, Asimilasi.**

Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah satu proses sosial yang melibatkan dua atau lebih individu atau kelompok. Interaksi sosial melibatkan tindakan saling merespons perilaku seorang individu terhadap individu lain, dan selanjutnya, saling mempengaruhi satu sama lain.

Dalam proses mempertimbangkan perilaku seorang individu terhadap individu lain, saling berharap (*mutual expectation*) muncul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi. Tiap-tiap individu mencoba melaksanakan apa yang akan dilakukan oleh orang lain, serta mencoba menyesuaikan perilakunya dengan harapan individu lain. Pola saling berharap ini lama-kelamaan akan menjadi norma yang diterima oleh individu-individu yang terlibat untuk menentukan keadaan interaksi mereka.

Interaksi manusia berbeda dengan bentuk interaksi lain, karena interaksi ini melibatkan norma serta kewajiban yang responsif. Interaksi sosial juga melibatkan alat komunikasi seperti bahasa dan simbol, agar antar individu dapat saling bertukar makna dan pemikiran satu sama lain.

Di kalangan sosiolog, George Simmel merupakan tokoh awal

yang menumpukan perhatian kepada sangat pentingnya proses interaksi. Menurutnya, interaksi di antara manusia adalah asal usul segala kehidupan sosial. Masyarakat terdiri dari berbagai bentuk hubungan dan interaksi di antara individu. Ia berpendapat bahwa bidang kajian sosiologi meliputi bentuk-bentuk dan pola-pola interaksi. Ini pun menjadi dasar segala perilaku. Pendekatan yang menumpukan kepada bentuk-bentuk interaksi ini kemudian dikenal sebagai “sosiologi formal” atau “mikro sosiologi.” Contoh beberapa bentuk interaksi adalah konflik, kerja sama, persaingan, pembagian tugas, dan hubungan superioritas dengan inferioritas.

Kajian secara terperinci mengenai interaksi sosial itu penting untuk memahami kelompok manusia atau masyarakat. Ini disebabkan oleh kemunculan norma-norma sosial, peraturan-peraturan dan perbedaan otoritas, kuasa, dan status dalam interaksi sosial. **Lihat Pertukaran Sosial, Norma Sosial.**

Interaksionisme Simbolik

Interaksi simbolik (*symbolic interaction*) berarti bentuk komunikasi dan interaksi yang khas dalam kehidupan manusia, yang melibatkan bahasa dan gerak tubuh (*gesture*) simbolik.

Sedangkan interaksionisme simbolik (*symbolic interactionism*) adalah pendekatan dalam psikologi sosial yang menerangkan komunikasi linguistik dan gerak tubuh, khususnya menekankan peranan bahasa dalam pembentukan pemikiran (*mind*), diri (*self*), dan masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa interaksionisme simbolik bukan satu perspektif yang bersatu dalam arti kata mewakili satu himpunan anggapan dan konsep yang diterima oleh semua orang yang menggunakan pendekatan itu. Banyak sosiolog yang disebut “*symbolic interactionists*” tidak begitu suka menerima sebutan itu. Mereka lebih suka dianggap sebagai peneliti yang bebas. Namun begitu, terdapat beberapa sifat pendekatan yang membedakannya dari pendekatan yang lain.

Pertama, pendekatan interaksionisme simbolik menganggap bahwa pengelolaan kehidupan sosial itu berasal dari masyarakat itu sendiri

dan merupakan hasil proses interaksi di kalangan anggota masyarakat. Ia tidak menerima ide bahwa bentuk organisasi sosial ditentukan oleh pengaruh faktor eksternal seperti ekonomi dan geografi.

Kedua, para pendukung atau kalangan yang menggunakan pendekatan ini tidak melihat masyarakat sebagai sistem yang integral. Sebaliknya masyarakat dianggap sebagai susunan yang agak longgar, yang terdiri dari kelompok-kelompok yang beraneka ragam pekerjaan, etnik, ras, kelas, politik, agama dan sebagainya. Tidak ada kelompok yang paling dasar dalam masyarakat. Kegiatan masyarakat melibatkan interaksi dan hubungan antar kelompok yang beraneka ragam.

Sifat *ketiga* dapat dirumuskan dengan kata-kata W. I. Thomas yang menyatakan, "Sekiranya manusia mendefinisikan suatu situasi sebagai benar, maka situasi itu akan menjadi benar pada akhirnya". Dengan kata lain, pendekatan interaksionisme simbolik menekankan proses di mana anggota-anggota masyarakat melihat dan menafsirkan situasi dan kedudukan mereka dalam masyarakat.

Keempat, interaksionisme simbolik menekankan "*actor's point of view*" atau pandangan dan pikiran aktor. Pendekatan ini mencoba membicarakan ide dan pikiran yang dinyatakan oleh aktor dalam interaksi sosial mereka, diikuti pula dengan usaha untuk memahami ide dan pikiran tersebut, dari sudut pandangan orang yang terlibat, bukan dari perspektif peneliti atau pengamat dari luar.

Akhirnya, karena pendekatan interaksionisme simbolik menumpukan perhatian kepada butir-butir terperinci tentang interaksi, kehidupan dan keadaan orang-orang yang dikaji, maka kajian yang dilakukan itu bercorak intensif dan metode kualitatif sering digunakan. Lihat **Tindakan Sosial, Definisi Situasi**.

Jarak Sosial

Jarak sosial (*social distance*) adalah perasaan adanya pemisahan atau pemisahan sosial yang benar-benar ada di antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.

Istilah ini digunakan untuk menganalisis hubungan dalam suatu kelompok atau di antara kelompok.

Sebelum konsep ini ditemukan, analisis mengenai hubungan antara kelompok banyak berdasarkan kepada pembagian perilaku yang bercorak diskriminasi dan bukan diskriminasi. Pembagian berdasarkan dua kategori ini agak kurang memuaskan. Konsep jarak sosial lebih berguna karena ini menjadikan peneliti dapat menilai tingkat diskriminasi dalam bentuk satu kontinum.

Emory S. Bogardus merupakan orang yang pertama kali memberikan analisis yang teratur atas konsep jarak sosial. Ia menciptakan ukuran yang kemudian dikenal sebagai *The Bogardus Scale* untuk mengukur dan membandingkan sikap anggota masyarakat terhadap kelompok-kelompok ras atau etnik yang lain. Caranya adalah responden diberi daftar yang berisi berbagai pernyataan mengenai hubungan sosial yang berlainan tingkat kerapatannya bersama-sama dengan jenis-jenis kelompok sosial. Responden itu kemudian diminta untuk menentukan tingkat hubungan sosial yang dapat diterimanya terhadap suatu kelompok tertentu. Terdapat delapan jenis hubungan sosial menurut jarak sosial yang berlainan seperti di bawah ini.

1. Mengusirnya dari negara saya.
2. Menerimanya hanya sebagai turis ke negara saya.
3. Menerimanya sebagai warganegara.
4. Menerimanya untuk bekerja di tempat yang sama.
5. Menerimanya sebagai teman setingkat di sekolah saya.
6. Menerimanya sebagai tetangga saya.
7. Menerimanya dalam klub sebagai sahabat karib saya.
8. Menerimanya sebagai anggota keluarga saya melalui perkawinan.

Dengan menggunakan ukuran tersebut, maka dapatlah diukur dan dibandingkan sikap seorang individu terhadap kelompok-kelompok yang lain. Jarak sosial, menurut Bogardus, berasal dari beberapa sebab tertentu.

Diantaranya termasuk tiga fakta yang utama:

1. Jarak sosial itu mungkin disebabkan oleh sikap negatif yang timbul dari ide-ide yang kurang menyenangkan mengenai anggota-anggota kelompok lain.
2. Jarak sosial bisa juga merupakan ciri hubungan sosial tertentu, terutama hubungan di antar pihak atasan dengan bawahan, dan di antara senior dengan junior. Pada umumnya orang enggan mengadakan hubungan dengan pihak yang kira-kira tidak akan menyambutnya.
3. Jarak sosial juga mencerminkan kurangnya kepentingan bersama atau pengalaman bersama. Kebanyakan jenis pekerjaan mempunyai bahasa teknis tertentu dan kelompok-kelompok kecil mungkin mempunyai cita-cita tertentu. Kelompok-kelompok ini mungkin juga mempunyai kebudayaan yang istimewa. Oleh karena itu, kelompok-kelompok seperti ini mungkin tidak mempunyai tempat bagi orang-orang yang tidak dapat turut serta dalam kegiatannya. Bentuk jarak ini lebih bercorak budaya. Namun begitu, jarak seperti ini juga bisa ada dalam suatu kebudayaan yang sama, seperti di sekolah guru-guru dari kelas menengah mengajar murid yang datang dari kalangan kelas buruh, mereka masih tidak bekerja sama dengan nilai yang sama.

Sebenarnya jarak sosial berkaitan erat dengan interaksi dan pengertian antar kelompok. Makin besar jarak sosial di antara dua kelompok, maka makin kurang hubungan interaksi dan pengertian di antara keduanya. Dalam masyarakat yang mempunyai hierarki status seperti yang terdapat dalam sistem kasta, jarak sosial adalah sebagian dari struktur peranan masyarakat. Hal ini dianggap perlu dan sah dalam satu sistem stratifikasi yang bercorak tradisi dan stabil. **Lihat Diskriminasi; Interaksi Sosial.**

Kasta

Pada dasarnya kasta merupakan sistem stratifikasi yang berdasarkan kepada tradisi di India. Satu kasta adalah satu lapisan masyarakat yang berdasarkan pada warisan dan dikekalkan dengan agama dan hukum.

Masyarakat Hindu tradisional terbagi kepada empat kasta utama: *Brahmin* (padri), *Kshatriya* (pahlawan), *Vaishnya* (pedagang) dan *Sudra* (petani), dengan kalangan *Harizan* atau *Paria* sebagai kalangan terbawah sekali. Kasta-kasta utama ini masih dapat dibagi menjadi kasta-kasta yang lebih kecil. Keanggotaan dalam tiap-tiap kasta bercorak turun-temurun, yaitu berdasarkan kepada warisan. Dengan kata lain, masyarakat yang bersistem kasta adalah masyarakat tertutup, karena status seseorang ditentukan secara warisan.

Di antara ciri-ciri utama sistem kasta seperti yang dilaksanakan dalam masyarakat Hindu tradisional adalah seperti berikut:

1. Keanggotaan. Keanggotaan ditentukan secara warisan, yaitu status seorang individu yang dilahirkan dalam suatu kasta tertentu tidak dapat diubah.
2. Endogami. Perkawinan hanya dibenarkan di kalangan anggota kasta yang sama. Misalnya seorang lelaki *Brahmin* mesti kawin dengan perempuan *Brahmin* juga. Tetapi dalam keadaan tertentu, lelaki pada kasta tinggi dibenarkan kawin dengan perempuan kasta rendah. Bentuk perkawinan ini dikenal sebagai *hypergamy*.
3. Pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu faktor utama yang membedakan satu kasta dari kasta lain. Tiap-tiap kasta mempunyai jenis-jenis pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, biasanya, seorang individu itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka sukai melainkan menerima pekerjaan yang telah ditentukan.
4. Hubungan Sosial. Sistem ini mempunyai peraturan yang ketat mengenai hubungan sosial di antar kasta terutama tentang hubungan fisik dan makan di tempat yang sama. Anggota dari

kasta-kasta yang berlainan tidak dibenarkan makan di tempat yang sama.

5. Mobilitas Sosial. Mobilitas sosial paling terbatas. Ini disebabkan sistem kasta tertutup dan status ditentukan secara warisan.

Konsep kasta juga banyak digunakan dalam konteks di luar masyarakat Hindu dengan beberapa pengertian yang berlainan, seperti:

1. Untuk merujuk kepada sistem stratifikasi yang ekstrem dan tertutup.
2. Untuk merujuk kepada stratifikasi yang berdasarkan kepada agama.
3. Untuk disamakan dengan sistem stratifikasi ras atau segmentasi ras.

Sebagai contoh istilah kasta banyak digunakan untuk menganalisis hubungan di antara bangsa kulit putih dengan bangsa Negro di Amerika Serikat, terutama di bagian selatan pada masa-masa yang lalu. Istilah kasta digunakan karena hubungan ras di Amerika Serikat memperlihatkan beberapa ciri kasta. Misalnya, mobilitas sosial bagi bangsa Negro paling terbatas. Seorang Negro tetap dianggap sebagai Negro walaupun ada di antara kakek neneknya terdiri dari bangsa kulit putih. Endogami masih didukung kuat oleh kedua bangsa, dan perkawinan campur jarang sekali terjadi. Di samping itu, segregasi atau pemisahan di antara bangsa meluas oleh karena adanya peraturan yang agak ketat mengenai hubungan sosial. Pengkhususan kerja juga ada, pengaruh dari segregasi ini. Bangsa Negro hanya bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu.

Salah seorang sosiolog yang menggunakan istilah kasta dalam konteks hubungan ras di Amerika Serikat adalah Lloyd Warner. Warner berpendapat bahwa hubungan antara bangsa kulit putih dengan bangsa Negro merupakan hubungan kasta dan kedua kalangan itu dipisahkan oleh satu "garis kasta". Tiap-tiap kasta bisa dibagi-bagi kepada kelas-kelas

yang berlainan.

Penggunaan istilah kasta dalam sosiologi umumnya dan dalam hubungan ras khususnya telah banyak menimbulkan perbincangan. Sebagian sosiolog, Oliver Cox misalnya, berpendapat bahwa sistem kasta yang terdapat di kalangan masyarakat Hindu di India itu unik dan tidak sesuai digunakan dalam situasi di luar India. Dengan demikian, Cox menentang penggunaan istilah kasta dalam konteks Amerika Serikat seperti yang dilakukan oleh Lloyd Warner.

Walaupun begitu, ada sosiolog yang berpendapat bahwa tidak ada salahnya menggunakan istilah kasta untuk merujuk kepada situasi-situasi yang memperlihatkan ciri-ciri kasta, seperti di Afrika Selatan dan Amerika. Van den Berghe, misalnya menegaskan bahwa istilah kasta bisa digunakan sebagai satu konsep analisis dan komparasi. **Lihat Ras, Diskriminasi.**

Kebudayaan

Dalam pengertian yang paling umum, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup masyarakat atau seluruh aspek pemikiran dan perilaku manusia yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain melalui proses pembelajaran. Edward B. Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* (1971) telah memberikan satu definisi yang klasik mengenai konsep kebudayaan:

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, adat istiadat dan kemampuan serta kebebasan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Kebanyakan definisi antropologi dan sosiologi mengenai kebudayaan dibuat berdasarkan kepada definisi tersebut. Begitu banyak ahli antropologi dan sosiologi yang menekankan hakikat bahwa kebudayaan atau perilaku itu dipelajari. Dengan demikian proses pembelajaran mesti dijadikan tumpuan analisis. Clyde Kluckhohn menganggap aspek ide sebagai yang paling penting dari kebudayaan.

Robert Redfield juga menekankan aspek ide dalam konsepsinya

mengenai kebudayaan ketika ia menganggap kebudayaan sebagai "pengertian yang disetujui bersama" (*The Folk Culture of Yucatan*, 1941). Malinowski dalam *A Scientific Theory of Culture* (1944) berpendapat bahwa kebudayaan pada dasarnya adalah suatu respon terhadap keperluan-keperluan manusia.

Sebagai keseluruhan cara hidup manusia, kebudayaan meliputi kehidupan kelompok yang bercorak material dan immaterial. Budaya kebendaan atau artifact merupakan ciptaan manusia yang berbentuk objek-objek tertentu seperti alat, bangunan, senjata, kendaraan, dll. Budaya bukan material atau mentifact adalah suatu ciptaan manusia yang berbentuk abstrak seperti kepercayaan, adat istiadat, hukum, dan sebagainya.

Tiap-tiap masyarakat mempunyai kebudayaan, tetapi kebudayaan itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Namun, beberapa aspek yang sama terdapat di kalangan semua masyarakat seperti bahasa, objek-objek material, pelaksanaan keagamaan, sistem kekeluargaan, nilai, kesenian, dan lain-lain). Inilah yang dikatakan dengan pola kebudayaan universal (*universal pattern of culture*).

Perubahan merupakan sifat penting bagi suatu kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah satu proses revisi bagian-bagian atau aspek-aspek kebudayaan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kebudayaan yang mengalami perubahan yang paling lambat dikatakan statis sementara kebudayaan yang mengalami perubahan pesat dikatakan dinamis. **Lihat Institusi Sosial, Kelompok Rujukan.**

Kekurangan Relatif

Konsep kekurangan relatif (*relative deprivation*) ini berkaitan dengan penafian, batasan atau keadaan yang kurang baik akibat dari perbandingan dengan individu atau kelompok lain yang lebih superior, bukan diukur berdasarkan kriteria yang objektif. Tingkat batasan yang dialami berbeda antara individu dengan individu yang lain, tergantung pada jenis individu atau kelompok yang dipilih sebagai dasar perbandingan itu, yang disebut sebagai kelompok rujukan bandingan.

Keadaan kekurangan relatif hanya ada ketika perbandingan dilakukan dengan individu atau kelompok yang lebih superior dan lebih tinggi statusnya. Jadi seorang guru sekolah dasar bisa mengalami keadaan kekurangan relatif ketika dia membandingkan kedudukannya dengan pengurus besar sebuah asosiasi yang terkemuka.

Tingkat kekurangan relatif juga berkaitan dengan aspirasi individu yang terlibat. Sebagai contoh, seorang anak petani yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas tetapi hanya berhasil mendapatkan kerja sebagai tata usaha sekolah akan mengalami perasaan kekurangan relatif yang lebih banyak dibandingkan dengan rekan setingkatnya yang tidak bercita-cita sepertinya.

Konsep ini juga berkaitan erat dengan ciri-ciri konservatif kalangan miskin dan konsep “revolusi harapan melambung” (*revolution of rising expectations*). Dalam keadaan tidak adanya kemungkinan untuk memperbaiki keadaan diri sendiri, kalangan miskin membandingkan keadaan mereka dengan kalangan miskin yang lain, dan seterusnya hingga mereka tidak merasakan kekurangan atau penafian yang besar. Tetapi ketika keadaan mereka menjadi lebih baik, mereka membandingkan keadaan mereka dengan keadaan yang mungkin terjadi kelak, dan besar kemungkinan mereka mengalami kekurangan yang hebat. Keadaan inilah yang seringkali menjadi daya penggerak dalam pergerakan sosial dan politik yang bercorak radikal.

Konsep ini mula-mula diperkenalkan oleh S.A. Stouffer dan rekan-rekannya dalam *The American Soldier* (1949). **Lihat Kelompok Rujukan.**

Kelas Sosial

Kelas sosial salah satu konsep yang paling banyak digunakan dalam sosiologi. Konsep ini juga agak sukar untuk diberi definisi yang tepat karena konsep ini digunakan dalam berbagai cara. Dalam kehidupan sehari-hari, kelas sosial mungkin berarti kuasa politik, kekayaan, pendapatan, martabat, pekerjaan atau hubungan dengan alat-alat produksi.

Penggunaan konsep kelas sosial dalam sosiologi perlu dihubungkan dengan tulisan Karl Marx dan Max Weber. Menurut Karl Marx, kelas sosial adalah kategori individu yang mempunyai hubungan yang sama terhadap alat-alat produksi (*means of production*) serta hubungan produksi seperti sistem pembagian dan pertukaran. Masyarakat kapitalis, menurut Marx, terbagi kepada dua kalangan atau kelas yang bertentangan, yaitu: borjuis yang memiliki alat-alat produksi, pembagian serta pertukaran; dan proletar, kalangan yang tidak memiliki alat-alat produksi melainkan hanya tenaga untuk bekerja.

Sebenarnya konsep Marx mengenai kelas menekankan dua unsur. Pertama, kelas perlu dilihat dalam hubungannya dengan proses produksi. Kedua, kelas merupakan kelompok sosial yang paling aktif dalam masyarakat. Dengan kata lain, kelas adalah penggerak sejarah. Menurut Marx, sejarah semua masyarakat yang ada sementara ini, adalah sejarah perjuangan kelas. Konsep ini juga berkaitan dengan konsep kesadaran kelas (*class consciousness*).

Kesadaran kelas adalah keadaan di mana anggota kelas menyadari persamaan mereka dari segi kepentingan dan kedudukan. Kesadaran kelas juga melibatkan perasaan permusuhan dan pertentangan terhadap kelas yang lain. Marx menganggap kesadaran kelas sebagai faktor yang penting dalam mewujudkan kelas. Segolongan manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dalam struktur ekonomi tetapi tidak mempunyai kesadaran terhadap situasi bersama mereka dianggap *class-in-itself*, akan menjadi *class-for-itself* ketika anggota-anggotanya mempunyai kesadaran kelas, yaitu menyadari tentang identitas, kepentingan serta peranan sosial mereka.

Marx Weber, seperti Marx, juga mengakui pentingnya faktor-faktor ekonomi dalam analisisnya mengenai kelas.

Istilah “kelas” berkaitan dengan satu kelompok manusia yang mempunyai peluang yang sama dalam penawaran barang, keadaan-keadaan kehidupan eksternal, dan pengalaman hidup individu, selagi peluang ini ditentukan oleh kuasa untuk memperoleh pendapatan dengan menjual barang atau

keahlian dalam satu susunan ekonomi tertentu. Harta benda, atau kurangnya harta benda, merupakan kategori-kategori dasar dalam semua situasi kelas. “situasi kelas”, pada akhirnya merupakan “situasi pasar”.

Weber juga berpendapat bahwa syarat dasar suatu kelas terletak pada pembagian kuasa ekonomi yang tidak seimbang dan seterusnya hingga pembagian peluang yang tidak sama rata.

Fenomena kelas dalam masyarakat modern telah dianalisis secara terperinci oleh Lloyd Warner berdasarkan kajiannya di kota Yankee, Amerika Serikat. Warner mengukur kelas dan sistem stratifikasi kelas Amerika Serikat berdasarkan pada dua teknik utama: *evaluated participation* dan indeks mengenai sifat-sifat status (*Indexes of Status Characteristics*).

Evaluated participation berdasarkan kepada ukuran kelas (*class rating*) yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang komunitas itu dan meliputi beberapa hal berikut:

1. Ukuran melalui persetujuan yang dicapai oleh beberapa orang informan.
2. Ukuran berdasarkan *symbolic placement*.
3. Ukuran berdasarkan status.
4. Ukuran melalui perbandingan dengan individu-individu lain yang kelasnya telah ditentukan terlebih dahulu.
5. Ukuran berdasarkan keanggotaan dalam gereja, perkumpulan, persatuan dan sebagainya.

Indeks mengenai sifat-sifat status adalah berdasarkan kepada sifat sosio-ekonomi anggota komunitas itu. Ini termasuk pekerjaan, pendapatan (*income*), jenis rumah, dan kawasan kediaman. Berdasarkan kepada teknik-teknik di atas, Warner menemukan bahwa sistem stratifikasi di kota Yankee itu terdiri dari enam kelas: kelas atas atas, atas bawah, menengah atas, menengah bawah, bawah atas, dan kelas bawah bawah. Sistem ukuran ini terlalu banyak menekankan dimensi prestasi sehingga ditinggalkan dimensi stratifikasi yang lain seperti kuasa. **Lihat Ideologi, Konflik, Stratifikasi Sosial.**

Kelompok Rujukan

Kelompok rujukan (*reference group*) merupakan satu kelompok atau kategori yang memberi garis panduan kepada individu dalam mewarnai kepercayaan, sikap, nilai dan perilakunya. Konsep ini mula-mula diperkenalkan oleh Herbert H. Hyman dan kemudian diperluas oleh segolongan ahli psikologi sosial dan sosiologi seperti M. Sharif, T.M. Newcomb dan R.K. Merton.

Kelompok rujukan yang berbentuk kelompok yang darinya seorang individu mengambil standard dan membentuk sikapnya. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok rujukan normatif. Kelompok rujukan bisa juga bercorak kelompok yang situasi dan sifat-sifatnya digunakan oleh individu untuk membandingkan kedudukannya sendiri. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok rujukan bandingan.

Kelompok rujukan biasanya dibedakan dari kelompok keanggotaan (*membership group*), karena kelompok yang pertama itu merupakan kelompok yang mempengaruhi perilaku seseorang, sementara kelompok yang kedua merupakan kelompok yang dianggotai oleh orang tersebut. Namun, kedua jenis kelompok itu seingkali koinsiden, yaitu kelompok keanggotaan seorang itu juga merupakan kelompok rujukannya.

Sesungguhnya bagi seorang individu, satu kelompok yang sama bisa bergerak sebagai kelompok keanggotaan, kelompok rujukan normatif dan kelompok rujukan bandingan pada saat yang sama. Sebagai contoh, seorang individu dari kelas menengah dianggap oleh orang lain sebagaimana ia menganggap dirinya sebagai anggota kelas menengah. Ia mempelajari serta mengambil nilai dan normanya dari kelas itu, serta membandingkan pencapaian dan perilakunya dengan anggota-anggota kelas menengah.

Ada juga kemungkinan bagi anggota kelompok A mengambil standardnya dari anggota kelompok B serta membandingkan dirinya dengan mereka. Misalnya seorang anggota kelas menengah, meniru standardnya serta membandingkan dirinya dengan anggota kelas menengah itu.

Dalam masyarakat perindustrian modern yang mengutamakan mobilitas

ke atas melalui pencapaian prestasi, seringkali terdapat individu-individu dari kelompok tertentu bercita-cita untuk menjadi anggota kelompok lain. Kedudukan individu tersebut dikenal sebagai kedudukan pinggiran (*marginal*). Dalam masyarakat terbuka yang mempunyai kemungkinan besar terjadinya mobilitas, masalah kepinggiran (*marginality*) dapat diselesaikan melalui penerimaan oleh kelompok-kelompok yang dicita-citakannya itu. Dalam masyarakat tertutup, keadaan individu pinggiran tidak dapat begitu saja masuk ke dalam kelompok lain. Misalnya, bangsa-bangsa berkulit berwarna atau berkulit hitam tidak bisa mendapatkan status yang sama rata dengan bangsa kulit putih di Afrika Selatan.

Penggunaan konsep kelompok rujukan telah dikritik oleh sebagian sosiolog. Mereka menyatakan bahwa pembagian yang jelas tidak dibuat di antara kelompok rujukan yang merupakan kelompok sebenarnya dengan kelompok yang hanya merupakan kategori sosial atau ide-ide abstrak. Jadi agak sukar untuk memastikan asal usul sumber pengaruh sosial dan motivasi.

Namun begitu, konsep ini berguna dalam kajian mengenai mobilitas sosial, aspirasi sosial dan masalah marginalitas sosial individu yang mengalami adanya "jurang" antara aspirasi dengan pencapaiannya. Di samping itu konsep ini juga digunakan dalam kajian mengenai kekurangan relatif (*relative deprivation*). **Lihat Norma Sosial, Kekurangan Relatif.**

Kelompok Sosial

Kelompok sosial (*social group*) merupakan kelompok individu yang mempunyai identitas yang sama, perasaan kekitaan, cita-cita yang sama serta hubungan sosial tertentu. T. B. Bottomore dalam bukunya *Sociology: A Guide to Problems and Literature*, mendefinisikan kelompok sosial sebagai saatu kelompok individu yang mempunyai dua ciri utama, yaitu:

1. Ada hubungan tertentu di antara individu-individu tersebut.
2. Tiap-tiap individu sadar akan kelompok itu beserta simbol-simbolnya. Dengan kata lain, kelompok sosial mempunyai

struktur dan organisasinya yang dasar (termasuk peraturan-peraturan dan upacara) dan satu dasar psikologi mengenai kesadaran anggota-anggotanya.

Contoh kelompok sosial adalah keluarga, partai politik, kesatuan sekerja dan negara. Dalam sejarah pemikiran sosiologi, banyak percobaan telah dilakukan untuk membagi kelompok sosial ke dalam beberapa jenis dengan ukuran-ukuran yang berlainan. Ukuran-ukuran yang digunakan di antaranya adalah sifat hubungan di antara anggota kelompok yang terlibat, ukuran kelompok, dan tujuan adanya suatu kelompok.

Misalnya, Tonnies membedakan *gemeinschaft* (komunitas; paguyuban) dari *gesellschaft* (masyarakat; patembayan) berdasarkan kepada jenis dan sifat hubungan sosial, yaitu *gemeinschaft* berdasarkan kepada hubungan rapat dan berhadap-hadapan sementara *gesellschaft* lebih bersandarkan kepada hubungan yang bercorak impersonal.

C.H. Cooley juga membedakan kelompok primer dari kelompok-kelompok lain seperti kelompok sekunder. Kelompok primer mempunyai ciri-ciri kerjasama dan hubungan yang berhadap-hadapan. Akibat dari hubungan yang erat itu adalah penyatuan sifat-sifat individu ke dalam satu keseluruhan. Sebenarnya pengertian Cooley mengenai kelompok primer melibatkan tiga keadaan: kerapatan hubungan (*proximity*) di antara anggota-anggotanya, kecilnya ukuran kelompok, dan hubungan yang berkesinambungan.

Klasifikasi atas kelompok sosial yang tersebut di atas amat berguna dalam analisis sosiologi. Tetapi, sementara ini masih belum ada tipologi atau penjenisan kelompok sosial yang benar-benar memuaskan. Baru-baru ini beberapa percobaan telah diusahakan dengan tujuan untuk mendapatkan klasifikasi yang lebih teratur mengenai kelompok sosial. Misalnya G. Gurvitch pernah mengusulkan sejumlah lima belas ukuran klasifikasi. Sebagian ukuran itu telah dikemukakan oleh sosiolog yang lebih awal darinya, seperti ukuran, pelaksanaan kelompok, dan kerapatan hubungan di antara anggota-anggotanya. Ia juga memasukkan ciri-ciri baru

seperti isi kandungan, dasar pembentukan (apakah sukarela atau tidak), derajat organisasi, fungsi, orientasi, apakah kelompok itu terbuka, tertutup atau separuh terbuka, hubungan dengan kelompok-kelompok lain, jenis otoritas, jenis kontrol sosial dan lain-lain lagi.

Seperti halnya dengan skema sosiologi lain, kegunaan skema klasifikasi yang dikemukakan oleh Gurvitch ini masih belum banyak diuji oleh banyak kalangan. **Lihat Gemeinschaft, Kelompok Rujukan.**

Kemestian Fungsional

Dalam pengertian yang paling luas, kemestian fungsional (*functional imperative*) adalah keperluan organisasi universal masyarakat. Dalam teori tindakan, kemestian fungsional merupakan salah satu himpunan konsep yang penting (himpunan konsep yang satu lagi adalah variabel pola) yang merujuk kepada empat masalah dasar suatu sistem sosial.

Keempat kemestian fungsional itu adalah:

1. Pencapaian cita-cita.
2. Penyesuaian proses pelatihan sumber-sumber teknik demi pencapaian cita-cita.
3. Integrasi.
4. Latensi (*latency*), yaitu pemeliharaan kestabilan dan kesinambungan.

Keempat masalah dasar tersebut perlu diselesaikan oleh suatu sistem sosial demi kelangsungan hidup atau keseimbangan sistem itu. Keempat masalah di atas amat rapat hubungannya dengan dikotomi "*instrumental ekspresif*" yang dikemukakan oleh Parsons untuk menerangkan tindakan dan interaksi. Tindakan instrumental ditujukan kepada cita-cita tertentu, sedangkan tindakan ekspresif membawa ganjaran dan kepuasan intrinsik. Kebanyakan tindakan mempunyai unsur instrumental dan ekspresif, meskipun salah satu darinya agak lebih kelihatan.

Parsons menggunakan dikotomi instrumental ekspresif dan

kemestian fungsional untuk menerangkan berbagai aspek sistem sosial. Contohnya adalah peran sosial bisa dilihat dari segi instrumental-ekspresif. Demikian juga intitusi utama dalam masyarakat bisa dianalisis dengan menggunakan istilah tersebut. Sistem ekonomi, misalnya, bisa dilihat sebagai sistem instrumental yang menumpukan perhatian kepada penyesuaian dan pencapaian cita-cita. Sistem ini juga perlu memenuhi keempat kemestian fungsional yang tersebut di atas.

Kemestian fungsional juga berkaitan erat dengan *functional requisites* dan *functional prerequisites*. Kedua konsep tersebut biasanya merujuk kepada syarat-syarat yang lebih umum bagi anggota barunya, sistem perhubungan yang dikerjakan secara bersama, dan cara pembagian peran kepada anggota masyarakat. Secara perbandingan, kemestian fungsional lebih sempit ruang lingkungnya dan lebih menekankan kestabilan dan kelangsungan sistem.

Prerequisites berarti syarat-syarat yang perlu bagi mewujudkan sistem requisites. Ini merupakan syarat-syarat yang menjamin kelangsungan dan kelangsungan hidup sistem tersebut. **Lihat Sistem Sosial.**

Kerjasama

Kerjasama (*Cooperation*) adalah interaksi sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam membuat tindakan bersama bagi mencapai cita-cita yang sama. Kerjasama adalah proses yang paling dasar dalam masyarakat. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian kerja di kalangan individu, yaitu menjalankan tugas yang berlainan dalam usaha mencapai satu tujuan yang sama.

Dalam membicarakan masalah konsensus, konflik dan kerjasama, Irving Louis Horowitz berpendapat bahwa konsensus dan konflik tidak semestinya tidak sesuai (*incompatible*), karena konflik dan konsensus bergerak dalam struktur sosial yang sama, dan keduanya merupakan fenomena yang bisa memupuk atau menghalangi kerjasama dan kesatuan sosial. Kerjasama, menurut Horowitz, lebih lazim dijelaskan secara empirik dan oleh karena itu perlu diberi analisis yang lebih mendalam supaya

konsep ini dapat menjadi konsep perantara (*mediasi*) yang merapatkan jurang antara konsensus dan konflik.

Horowitz memberi tiga perbezaan antara konsensus dengan kerjasama. *Pertama*, konsensus berarti persetujuan, yaitu persetujuan dari perspektif bersama, persetujuan mengenai peraturan pergaulan dan perilaku dan susunan norma dan nilai bersama. Berbeda dengan konsensus, kerjasama tidak mendesak suatu keseragaman dari segi peranan tetapi hanya mengutamakan peraturan mengenai tatacara. Kerjasama melibatkan penyelesaian masalah tetapi membenarkan kondisi perbezaan dan perselisihan.

Kedua, konsensus melibatkan persetujuan mengenai segala isi perilaku, sementara kerjasama hanya memerlukan persetujuan mengenai bentuk perilaku. Sebagai contoh, konsensus dianggap ada kalau semua anggota kelompok mencapai persetujuan supaya tidak merokok. Tetapi kalau persetujuan dicapai mengenai larangan merokok hanya dalam keadaan dan tempat tertentu, maka keadaan ini dikenal sebagai kerjasama.

Ketiga, kerjasama melibatkan toleransi terhadap perselisihan, sementara konsensus mendesak supaya perselisihan itu dihapuskan. (Lihat "*Consensus, Conflict, and Cooperation*" dalam N.J Demerath & Richard A. Peterson (eds.) *System, Change and Conflict*).

Keseimbangan Sosial

Konsep keseimbangan atau *equilibrium* berasal dari ilmu mekanik. Ini berarti keadaan seimbang dalam suatu sistem. Dalam bidang ilmu sosial konsep ini berarti harmoni dan penyesuaian di antara bagian-bagian suatu sistem sosial yang dianggap sebagai keseluruhan yang berintegrasi. Apa saja perubahan dalam suatu bagian akan melibatkan bagian yang lain, dan seterusnya hingga mewujudkan penyesuaian dan kestabilan.

Herbert Spencer merupakan sosiolog yang mula-mula menggunakan konsep *equilibrium* atau keseimbangan. Kemudian konsep ini digunakan secara lebih teratur oleh Vilfredo Pareto dalam bukunya *The Mind and Society*. Bagi Pareto, masyarakat adalah sistem yang seimbang.

Gerak kuasa yang dapat menyeimbangkan masyarakat di antaranya adalah *residue*, *sentimen* dan *derivasi*.

Bagian-bagian dalam sistem sosial adalah saling berkaitan. Perubahan dalam bagian tertentu mempengaruhi keseluruhan sistem itu, dan keadaan yang sebaliknya juga terjadi. Jadi, pada dasarnya, pandangan Pareto ini mempunyai persamaan dengan pendekatan fungsional.

Tokoh sosiologi yang paling banyak menggunakan konsep *equilibrium* adalah Talcott Parsons dan rekan-rekannya yang menggunakan pendekatan fungsional. Menurut Parsons dan sosiolog fungsional lainnya, masyarakat adalah suatu sistem yang bercorak integrasi atau seimbang. Keseimbangan tidak semestinya bercorak statis atau stabil. Keadaan ini mungkin disesuaikan dari waktu ke waktu akibat perubahan yang tersusun dalam masyarakat.

Pandangan seperti ini banyak dikritik oleh sosiolog yang lain, terutama mereka yang cenderung kepada teori konflik. Dengan demikian, begitu banyak sosiolog ragu-ragu apakah konsep ini berguna dalam masyarakat manusia atau tidak, karena masyarakat terdiri dari objek-objek yang individu-individu yang mempunyai jiwa dan perasaan. **Lihat Fungsi, Konsensus.**

Kharisma

Kharisma adalah sifat pribadi individu yang seolah-olah mempunyai kemampuan dan kuasa yang luar biasa. Konsep ini mula-mula digunakan oleh Ernst Troeltsch dan kemudian digunakan pula oleh Max Weber untuk menerangkan kemampuan memimpin berdasarkan kepada kepribadian tanpa dorongan material atau paksaan apapun. Bagi Weber, kharisma adalah bentuk otoritas tulen. Di antara tokoh-tokoh agama yang dianggap mempunyai kharisma adalah Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Pemimpin politik Gandhi, Lenin, Hitler, Mao-Tzetung, dan Sukarno juga dianggap mempunyai kharisma.

Seperti yang ditogaskan oleh Weber, pimpinan yang berdasarkan kepada sifat kharisma merupakan suatu yang asing dalam struktur

kehidupan sehari-hari. Hubungan sosial yang terlibat amat personal dan semata-mata berdasarkan sifat-sifat individu yang bercorak kharisma. Sifat kharisma dalam bentuk tulen jarang sekali stabil kecuali ketika sifat ini ada sejak awal. Kharisma biasanya berubah bentuknya baik ke arah bentuk tradisi atau rasional, atau keduanya.

Perubahan pimpinan yang bersifat kharisma kepada bentuk yang lebih berinstitusi dan lebih kekal dikenal sebagai perutinan (*routinization*). Proses rutinisasi juga berkaitan dengan dasar-dasar material suatu masyarakat.

Dalam proses rutinisasi, ide-ide yang dikemukakan oleh pemimpin yang bersifat kharisma juga membawa perubahan. Ide-ide yang bertentangan dengan, atau yang tidak memenuhi, keperluan kepentingan material pengikutnya ditinggalkan, sedangkan ide-ide yang dianggap sesuai dapat dijadikan teori, dogma, tradisi atau peraturan. Hubungan di antara pemimpin dengan pengikutnya bukan lagi berdasarkan kepada kepercayaan terhadap suatu kuasa luar biasa tetapi, berdasarkan kepercayaan terhadap otoritas yang diperkuatkan oleh tradisi. Lihat **Otoritas**.

Kohesi Sosial

Kohesi atau kesatuan sosial merupakan keadaan di mana anggota kelompok atau masyarakat bersatu padu akibat adanya interaksi dan ikatan sosial tertentu. Ketika ada tingkat kohesi yang tinggi, anggota kelompok yang terlibat mempunyai perasaan kekitaan atau *esprit de corps* satu sama lain. Kohesi sosial juga melibatkan kesepakatan berkaitan dengan cita-cita, nilai, norma, dan peranan kelompok.

Kohesi sosial telah menjadi masalah utama di kalangan sosiolog. Auguste Comte, misalnya, telah banyak menumpukan perhatiannya kepada masalah tatanan (*order*) dan kohesi sosial masyarakat Perancis yang menghadapi keadaan kalang kabut dan kemiskinan akibat dari Revolusi Perancis. Menurut Comte, sosiologi perlu memberi panduan kepada manusia untuk mewujudkan kembali kohesi sosial dan membentuk masyarakat yang lebih sempurna.

Durkheim, tokoh sosiologi Perancis lainnya, juga banyak menumpukan perhatian pada masalah kohesi sosial. Ini terbukti dalam beberapa hasil tulisannya, terutama dalam tiga buah bukunya yaitu *The Division of Labour in Society*, *Suicide* dan *Elementary Forms of Religious Life*.

Dalam bukunya *The Division of Labour*, Durkheim coba membedakan dua jenis kohesi atau kesatuan, yaitu kohesi mekanik dan kohesi organik. Kedua jenis kohesi ini kemudian dikaitkan dengan dua jenis organisasi sosial yang bertlainan. Kohesi mekanik yang berdasarkan kepada keseragaman, ada dalam masyarakat yang primitif, sedangkan masyarakat modern dan kompleks lebih mempunyai ciri kohesi organik yang berdasarkan kepada perbedaan dan pembagian kerja. Menurut Durkheim, pada dasarnya, pembagian kerja merupakan faktor utama yang mengikat individu dan mewujudkan kohesi sosial di kalangan masyarakat modern.

Dalam bukunya *Suicide*, Durkheim sekali lagi menumpukan perhatian kepada kohesi sosial, hubungan di antara individu dengan kelompoknya, dan sejauh mana kohesi sosial dapat mempengaruhi gerak-gerik individu. Dengan kata lain, Durkheim menunjukkan kadar bunuh diri yang berbeda-beda dapat diuraikan dari segi perbedaan kohesi.

Menurut Durkheim, kohesi sosial merupakan variabel utama dalam menentukan gerak-gerik manusia. Kohesi merupakan "dukungan psikologi" pada anggota masyarakat untuk menghadapi berbagai krisis kehidupan. Kohesi dapat meringankan kegelisahan dan tekanan hidup, dan begitu seterusnya sehingga mengurangi pengaruh krisis atas individu yang terlibat. Dengan demikian, kadar bunuh diri lebih tinggi dalam kelompok yang kohesi sosialnya tidak kuat karena kelompok itu tidak sanggup melindungi anggotanya dari pengaruh kegelisahan dan tekanan hidup.

Dalam kajiannya mengenai agama, Durkheim juga tidak terlepas dari soal kohesi sosial, walaupun perhatiannya juga ditumpukan kepada perkembangan teori umum mengenai asal usul agama. Menurut Durkheim, fungsi utama agama adalah untuk mewujudkan, memupuk dan memelihara

TEORI SOSIAL

kohesi sosial.

Penekanan Durkheim tentang betapa pentingnya kesatuan sosial sebagai variabel sosiologi telah diterima oleh sosiolog selanjutnya sebagai suatu perkembangan yang penting dalam pembentukan teori sosiologi.

Lihat Integrasi Sosial, Pembagian Kerja.

Komunitas/Masyarakat

Istilah *gemeinschaft* dan *gesellschaft* mula-mula digunakan oleh sosiolog Jerman, Ferdinand Tonnies. Kedua konsep ini meliputi fenomena sosial yang agak luas. Konsep-konsep ini tidak hanya merujuk kepada jenis masyarakat dan susunan sosial, bahkan merujuk pula kepada hubungan-hubungan sosial yang berkaitan dengan jenis-jenis masyarakat tadi.

Dari segi hubungan sosial, *gemeinschaft* atau komunitas (*paguyuban*) meliputi interaksi sosial yang melibatkan hubungan primer yang rapat dan berhadap-hadapan (*face-to-face*), dan adanya tradisi dan cita-cita yang sama. Sebaliknya *gesellschaft* atau masyarakat (*patembayan*) merujuk pada hubungan-hubungan sosial yang lebih spesifik, impersonal dan instrumental. Hubungan sosial yang terlibat bersifat sekunder dan hanya melibatkan sebagian dari jumlah individu dalam kelompok tersebut.

Dari segi jenis masyarakat, *gemeinschaft* adalah masyarakat yang mempunyai hubungan sosial berdasarkan kepada ikatan kekeluargaan dan ikatan persahabatan yang rapat. *Gesellschaft* adalah jenis masyarakat yang mempunyai hubungan sekunder yang lebih kuat. Ikatan sosial lebih bercorak sukarela, kontraktual, dan berdasarkan kepada kepentingan diri sendiri.

Max Weber mengaitkan kedua konsep tadi dengan proses integrasi pelaku ke dalam suatu komunitas atau masyarakat. Jika proses integrasi itu mengakibatkan *gemeinschaft*, atau komunitas, dasar untuk komunitas itu adalah perasaan kekitaan (*cohesiveness*) yang dialami oleh para pesertanya, satu perasaan yang motivasinya bercorak afektif atau tradisi. Kalau proses integrasi itu mengadakan *gesellschaft* atau masyarakat, maka motivasi perilaku sosial lebih melibatkan perkiraan atau hubungan kepentingan

Lihat Raymond Aron, *Main Currents in Sociological Thought*, buku 2, hal 235.

Pada umumnya, *gemeinschaft* merujuk kepada masyarakat pra-industri, sementara *gesellschaft* mewakili masyarakat yang biasanya berkaitan dengan proses perindustrian. Tetapi perlu diingat bahwa kedua konsep tersebut merupakan bikinan tipe ideal (*ideal type constructs*). Apa yang ada dalam kenyataan adalah hampir-hampir mirip. Contoh yang asli tidak ditemui. Lihat *Interaksi Sosial, Masyarakat Massa, Tipe Ideal*.

Konflik Sosial

Konflik adalah pertentangan secara langsung dan sadar antara individu atau kelompok untuk mencapai cita-cita bersama. Untuk mencapai cita-cita bersama ini, pihak lawan yang terlibat dalam konflik itu perlu "dihabisi" terlebih dahulu. Dalam situasi konflik, karena adanya perasaan permusuhan yang kuat, kerap kali peniadaan lawan dianggap lebih penting dari pencapaian cita-cita.

Konflik adalah fenomena sosial yang penting. Namun, kenyataan ini tidak banyak diberi perhatian dalam pemikiran sosiologi pada abad ke-19. Auguste Comte dan Emile Durkheim, misalnya, lebih menumpukan perhatian kepada unsur-unsur dan institusi-institusi yang dapat mewujudkan harmoni dan integrasi sosial.

Teori konflik menekankan konflik sebagai unsur utama dalam kehidupan sosial. Konflik dianggap sebagai hal normal yang tidak dapat dielakkan. Menurut sebagian sosiolog teori konflik, konflik tidak semestinya memusnahkan; sebaliknya dalam keadaan tertentu, konflik berfungsi dan membangun.

Thomas Hobbes (1588-1679), salah seorang filosof Inggris merupakan orang yang pertama kali menarik perhatian kita kepada unsur konflik. Menurutnya, manusia sentiasa berperang satu sama lain (*a war of all against all*). Pendapat Hobbes ini diperkuat lagi oleh pernyataan Darwin tentang *struggle of existence*.

Karl Marx adalah tokoh utama yang mengemukakan teori konflik.



TEORI SOSIAL

Menurutnya, sumber konflik berdasarkan pada hubungan sosial dalam produksi. Tumpuan perhatian dalam tulisan Marx adalah ciri pertentangan dalam sistem kapitalis yaitu pertentangan di antara dua kelas: kelas borjuis dan kelas proletar. Situasi konflik di antara kedua kelas tadi timbul akibat hubungan yang berbeda terhadap sumber-sumber produksi. Pergulatan atau perjuangan kelas, menurut Marx, bukan fenomena negatif, malahan perjuangan mempunyai fungsi untuk mengukuhkan perasaan kesatuan di kalangan anggota kelas. Di samping itu, perjuangan kelas juga merupakan kuasa penggerak dalam sejarah manusia.

Ide Marx dikembangkan juga oleh George Sorel. Sorel menganggap konflik sebagai fenomena positif. Dia berpendapat bahwa konflik antar kelas akan mengakibatkan berkurangnya kesatuan sosial di kalangan kelas itu. Oleh karena itu, berkurangnya perjuangan kelas mungkin akan melemahkan dan mengaburkan perbedaan di antara kelas dan dalam keadaan yang ekstrem, kesatuan dan identitas kelas akan terus hilang.

Max Gluckman, seorang antropolog Inggris, telah menekankan betapa pentingnya konflik dalam masyarakat primitif. Berdasarkan penelitiannya di Afrika, dia membuat kesimpulan bahwa konflik, dalam hubungan tertentu, dapat mewujudkan kembali kesatuan sosial.

Koefisien usaha Coser dan Dahrendorf merupakan usaha yang paling teratur dalam pembicaraan teori konflik. Sebagian besar ide Coser berdasarkan tulisan Georg Simmel, walaupun telah disusun kembali, direvisi dan dikembangkan. Menurut Coser, konflik tidak semestinya memecah-belah sistem sosial, malahan ia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Konflik bergantung kepada dua faktor: jenis persoalan yang terlibat dalam situasi konflik dan jenis struktur sosial tempat konflik itu terjadi.

Konflik tentang cita-cita, nilai atau kepentingan adalah berfungsi kalau konflik itu tidak berlawanan dengan anggapan dasar tentang hubungan sosial. Konflik seperti ini dapat menyesuaikan kembali norma-norma dan hubungan kekuasaan dalam kelompok tertentu menurut keperluan individu dalam kelompok.

Sebaliknya konflik bisa menjadi tidak berfungsi (*dysfunctional*):

Kalaupun sekiranya pihak-pihak yang berkonflik tidak lagi mengakui nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan legitimasi suatu sistem sosial.

Konflik bisa terjadi dalam jenis masyarakat atau struktur sosial manapun. Demikian itu disebabkan adanya tuntutan individu atau kelompok yang bertentangan dari waktu ke waktu. Walaupun begitu, terdapat perbedaan dari segi sifat toleransi struktur sosial terhadap konflik. Ada yang lebih toleransi dan ada yang kurang toleransi. Di kalangan kelompok yang mempunyai hubungan yang erat, yaitu kekerapan interaksi dan keterlibatan pribadi yang tinggi ada di antara anggotanya, maka konflik itu membinasakan.

Keadaan kelompok yang mempunyai anggota yang berhubungan erat berlainan dengan keadaan kelompok yang anggota-anggotanya cuma turut serta secara segmental. Konflik dalam kelompok yang tidak melibatkan semua pribadi anggotanya, kurang tegang dan kurang hebat. Ini disebabkan karena variasi konflik yang ada dalam kelompok itu dapat menghindarkan situasi di mana perhatian hanya ditumpukan kepada satu konflik saja.

Pendapat Coser memang benar dalam banyak kondisi. Tetapi dalam masyarakat yang ada adakalanya konflik itu tidak seperti yang dilihat oleh Coser. Sebaliknya konflik itu mungkin mengancam kestabilan suatu sistem sosial oleh karena hubungan segmental, seperti yang ditegaskan oleh Rex, tidak semestinya dikaitkan secara sewenang-wenang atau sembarangan. Ada kemungkinan hubungan ikhtiar dan cita-cita ada di antara hubungan segmental tadi. Ketika keadaan ini terjadi, maka konflik satu segmen tertentu akan merebak ke seluruh masyarakat melalui hubungan antara ikhtiar dan cita-cita yang ada itu.

Coser nampaknya lebih banyak memberi perhatian kepada fungsi konflik sosial yang positif atau integratif. Di antara fungsi-fungsi konflik yang dikemukakan adalah: penyesuaian kembali norma-norma yang ada dan mengadakan norma-norma baru, memelihara atau menyesuaikan keseimbangan kuasa, mewujudkan integrasi sosial dalam suatu kelompok; dan konflik dianggap sebagai nilai keselamatan (*safety value*) untuk

TEORI SOSIAL

melepaskan ras perseteruan dan permusuhan.

Dalam hal ini, Dahrendorf telah menegasi pendapat Coser dengan menyatakan bahwa Coser terlalu "asyik" dengan fungsi konflik yang positif dan integratif. Dahrendorf sendiri lebih suka menganggap konflik sebagai mempunyai dua dimensi: satu memberi sumbangan terhadap integrasi sistem sosial dan satu lagi membawa kepada perubahan.

Dahrendorf mengajukan model konflik untuk menguraikan fenomena sosial. Model konfliknya memunculkan tiga istilah yang disatukan sebagai instrumentarium konflik, perubahan dan paksaan (*constraint*). Dahrendorf mengandaikan bahwa masyarakat dan organisasi sosial tidak diikat dengan permufakatan, tetapi dengan paksaan; tidak diikat dengan persetujuan universal, tetapi dengan paksaan segolongan manusia ke atas yang lain. Menurut Dahrendorf, paksaan selalu membawa kepada perubahan. Unsur paksaan dan konflik ada dalam masyarakat manapun.

Libat Fungsi, Kelas Sosial, Konsensus.

Konsensus

Konsensus adalah persetujuan umum tentang nilai, norma dan peraturan-peraturan yang menentukan cita-cita serta ikhtiar-ikhtiar untuk mencapainya, pembagian peranan dan ganjaran dalam suatu sistem sosial.

Menurut sebagian sosiolog, unsur-unsur seperti konsensus, persetujuan, permufakatan, kesatuan dan integrasi merupakan dasar yang penting dalam kelangsungan suatu masyarakat. Dengan itu, maka muncullah model konsensus mengenai masyarakat. Model konsensus, ataupun model integrasi menekankan unsur norma dan legitimasi. Model ini mempunyai beberapa anggapan tertentu mengenai masyarakat:

1. Tiap-tiap masyarakat mempunyai satu struktur unsur yang agak langgeng dan stabil.
2. Tiap-tiap unsur dalam masyarakat itu mempunyai fungsinya masing-masing untuk menjadikan masyarakat itu berlangsung sebagai sistem keseluruhan.
3. Unsur-unsur dalam masyarakat berintegrasi dan seimbang.

4. Kelangsungan masyarakat berdasarkan kepada kerjasama dan permutakatan nilai.
5. Kehidupan sosial bergantung kepada kesatuan.

Dalam bentuk-bentuk yang berlainan, kesemua unsur di atas yaitu kelangsungan, kestabilan, integrasi, keseimbangan, fungsi, permutakatan, dan kesatuan selalu ada dalam teori atau pendekatan fungsi. Perlu diingatkan bahwa kesemua anggapan model konsensus ini tidak bersifat metafisis. Unsur-unsur ini hanya merupakan anggapan-anggapan untuk tujuan analisis ilmiah, khususnya untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat.

Walaupun begitu, model konsensus yang menekankan integrasi sosial tidak menjadikan kita memahami segala fenomena sosial. Dalam masyarakat modern kita dapati banyak fenomena yang berunsur konflik. Sebagai contoh, fenomena sosial seperti revolusi politik, pemberontakan, konflik perindustrian, mogok, unjuk rasa, kerusuhan, peperangan, perselisihan, dan sebagainya merupakan fenomena yang nampaknya lebih merusak daripada memelihara dan melanggengkan keadaan yang ada; lebih menunjukkan konflik daripada konsensus; dan lebih memungkinkan ketidakstabilan daripada kestabilan. Semua jenis konflik atau masalah ini amat sukar diuraikan secara memuaskan dengan menggunakan model konsensus. Keperluan untuk menganalisisnya menimbulkan teori konflik, yang bukan saja berbeza dengan model konsensus bahkan juga bertentangan dengannya dalam beberapa aspek yang penting. **Lihat Fungsi, Keseimbangan Sosial.**

Konsep

Konsep adalah perkataan atau beberapa perkataan yang menyatakan satu ide umum tentang sifat suatu benda, kejadian atau fenomena, atau tentang hubungan antara fenomena dengan fenomena. Konsep merupakan cara untuk mengatur fenomena empirik yang beraneka ragam. Ia juga penting dalam proses membuat generalisasi dan membangun teori.

Konsep dianggap berada pada tingkat abstraksi yang lebih mudah dibandingkan dengan teori. Namun begitu konsep adalah unsur yang penting dalam teori, malah disifatkan sebagai *building blocks* suatu teori.

C. G. Hempel menyamakan teori ilmiah dengan satu jaringan. Konsep dan istilah diwakili oleh simpul, sementara definisi dan hipotesis diwakili oleh benang yang mengikat simpul-simpul itu. Analogi tersebut menunjukkan betapa erat hubungannya antara teori, konsep dan hipotesis.

Dalam sosiologi, tumpuan perhatian kita adalah apakah konsep itu berguna dalam menerangkan dan membangun teori.

Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah cara yang digunakan oleh masyarakat atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku anggotanya supaya mereka mematuhi norma-norma, tradisi dan pola-pola perilaku yang penting bagi meluruskan perjalanan masyarakat atau kelompok itu. Kontrol sosial bisa bercorak positif atau negatif dan kedua bentuk ini juga bisa bersifat *formal* dan *informal*. Kontrol sosial yang positif berdasarkan kepada motivasi positif seorang individu untuk mematuhi. Ini bisa dilakukan dengan cara memberi hadiah, ganjaran dan faedah-faedah lain seperti "persetujuan sosial" (*social approval*). Bentuk kontrol sosial yang utama bergantung kepada internalisasi individu mengenai norma sosial, nilai dan peran yang diharapkan (*role expectations*) melalui proses sosialisasi. Akibat dari proses ini, individu didorong untuk mematuhi norma-norma sosial yang dipercayainya. Sebaliknya kontrol sosial yang negatif terdapat dalam bentuk hukuman atau ketakutan terhadap hukuman seperti penjara, denda, hukuman mati dan sebagainya.

Kontrol sosial formal melibatkan sistem tatacara dan sistem otoritas seperti hukum, peraturan dan berbagai badan untuk melaksanakannya. Sistem-sistem tatacara dan otoritas itu menentukan hadiah dan ganjaran atau hukuman yang diberi dalam keadaan tertentu. Kontrol sosial informal biasanya diwujudkan dalam bentuk pendapat umum (opini publik) dan dilaksanakan baik melalui pujian atau teguran. Walaupun tidak terdapat

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1. pemisah yang jelas, kontrol formal biasanya didapati di kalangan masyarakat kompleks yang pembagian tugasnya lebih meluas, sementara kontrol informal lebih kerap terdapat dalam masyarakat sederhana.

Sebagian besar perkembangan teori perkembangan dan penggunaan konsep ini timbul dari penyesuaian atas tradisi Darwin. Tradisi Darwin menaruh perhatian kepada hubungan antara organisme dengan lingkungannya, sedangkan teori-teori kontrol sosial lebih menekankan hubungan antara individu dengan masyarakat.

Teori-teori kontrol sosial menyandarkan bahwa masyarakat perlu mengontrol sifat-sifat manusia yang cenderung kepada sifat kelambatan untuk mengadakan dan menyanggah peraturan sosial dalam masyarakat. Tindakan cenderung manusia mengenai kepentingan dirinya sehingga terjadinya konflik satu sama lain) mesti dibatasi melalui pembelajaran atau pemilikan (*habit*) atau keduanya sekaligus. Jadi kontinuitas konsep kontrol sosial tidak bertentangan dengan konsep utilitarisme yang menekankan adanya harmoni alamiah meskipun manusia mengejar kepentingan yang terlahir.

Salah seorang tokoh sosiologi yang membumakan ide mengenai kontrol sosial adalah Durkheim. Durkheim menganggap kesadaran kolektif (*conscience collective*) sebagai suatu daya tekan yang mengontrol anggota masyarakat supaya mereka berperilaku mengikuti cara-cara tertentu tanpa mementingkan diri sendiri. Menurut Durkheim, fungsi utama institusi sosial seperti keluarga, perkawinan dan agama adalah untuk menambahkan daya tekan *conscience collective*. Pada dasarnya institusi-institusi ini merupakan agen kontrol sosial. Tanpa kontrol sosial manusia akan melakukan ekstremisme dan berbagai tindakan yang mementingkan diri sendiri, seperti yang dibuktikan oleh perbuatan bunuh diri yang bercorak egoistik dan anomie.

Oleh karena itu, untuk kontrol sosial agar dapat mengatasi keadaan anomie, Durkheim merencanakan pembentukan institusi profesional supaya mereka yang hebat bukan hanya dapat mewujudkan tata tertib mengenai perilaku, tetapi bahkan dapat mengontrol individu yang terlibat. (lihat

Sosialisasi, Norma Sosial.

Korelasi

Korelasi adalah perkaitan antara dua variabel atau lebih. Perubahan suatu variabel mempengaruhi atau dikaitkan dengan perubahan dalam variabel yang lain. Dalam bidang sosiologi, jenis korelasi yang paling luas digunakan adalah korelasi linear yang berisi satu skala tetap (*constant*) antara kadar perubahan dua (atau lebih) variabel. Sebagai contoh, satu unit perubahan dalam satu variabel dikaitkan atau diikuti dengan beberapa unit perubahan tertentu dalam variabel yang lain. Misalnya, penambahan tinggi seseorang dengan satu sentimeter diikuti dengan penambahan berat badannya sebanyak dua kilogram. Korelasi linear biasanya diukur dengan koefisien korelasi (*coefficient of correlation*) yang mempunyai nilai dari -1 hingga +1.

Korelasi positif terjadi ketika penambahan dalam nilai satu variabel diikuti dengan penambahan dalam nilai variabel yang lain. Sebagai contoh penambahan jumlah perkawinan diikuti dengan penambahan kadar kelahiran, atau penambahan jumlah makanan seorang individu diikuti dengan penambahan berat badan individu itu. Korelasi positif yang juga dikenal sebagai korelasi langsung, koefisien korelasi mempunyai nilai +.

Korelasi negatif di antara dua variabel terjadi ketika penambahan dalam nilai satu variabel diikuti dengan berkurangnya nilai variabel yang lain. Misalnya penambahan pendidikan sekolah diikuti dengan berkurangnya persentase buta huruf. Koefisien korelasi bagi suatu korelasi negatif mempunyai nilai-, korelasi negatif juga dikenal sebagai korelasi terbalik (*inverse*).

Kalau sekiranya tidak ada korelasi di antara dua variabel, yakni keduanya berubah secara berasingan, maka nilai koefisien korelasi adalah 0. Salah satu contoh hubungan ini adalah hubungan di antara bentuk badan seorang dengan jumlah pendapatannya.

Korelasi menjadikan kita mampu membuat ramalan mengenai suatu variabel. Kalau variabel X dan Y mempunyai korelasi yang kuat, maka

dapatlah kita membuat ramalan mengenai X berdasarkan pengetahuan kita yang ada tentang Y.

Perlu diingat bahwa korelasi di antara dua variabel tidak semestinya berarti bahwa kedua variabel itu mempunyai hubungan sebab-musabab. Untuk memastikan hubungan sebab musabab kita perlu mengetahui urutan waktu (*time sequence*) dari variabel-variabel yang terlibat, yaitu yang mana yang ada lebih dahulu. Selain itu, kita perlu juga memastikan apakah ada pengaruh variabel yang ketiga. **Lihat Penjelasan.**

Kuasa

Kuasa (*power*) adalah kesanggupan orang atau kelompok untuk mencapai sesuatu, mengontrol atau mempengaruhi perilaku pihak yang lain, walaupun perilaku itu bertentangan dengan kemauan pihak itu. Pemegang kuasa mempunyai sumber-sumber tertentu untuk menyuruh orang lain membuat sesuatu menurut kemauannya. Sumber-sumber itu biasanya timbul dari hubungan sosial dan kedudukan individu dalam masyarakat satu kelompok.

Max Weber memberi satu definisi klasik mengenai kuasa:

Pada umumnya "kuasa" diartikan sebagai peluang seseorang atau golongan manusia untuk mencapai cita-cita atau satu tindakan bersama walaupun tindakan itu ditentang oleh pihak lain.

Kuasa adalah konsep yang digunakan oleh sosiolog dengan berbagai cara. Bagi Weber, kuasa merupakan peluang seorang pelaku untuk menyuruh individu-individu itu. Jadi kuasa itu ada dalam interaksi sosial dan menandakan keadaan ketidaksetaraan, yaitu dengan memberi peluang kepada seseorang untuk mengenakan kemauannya ke atas orang lain.

Karl Marx menganggap kuasa politik sebagai suatu alat kelas pemerintah untuk melanggengkan penguasaan dan eksploitasinya ke atas kelas yang lain.

Talcott Parsons lebih memberi perhatian kepada peranan kuasa ke atas sistem sosial. Dia menganggap kuasa sebagai sumber sistem sosial

TEORI SOSIAL

yang digunakan untuk mencapai seluruh cita-cita sistem sosial, yakni pemeliharaan dan integrasi sistem sosial itu.

John Rex menganggap kuasa sebagai dimensi yang amat penting dalam situasi hubungan ras, terutama di kalangan masyarakat kolonial. Dalam masyarakat seperti ini kalangan tertentu mempunyai kuasa dan menggunakan kuasa untuk menguasai kalangan yang lain. Rex mengusulkan agar kuasa dianggap sebagai satu konsep *zero sum*, karena dalam konteks hubungan bangsa, semakin banyak kuasa diperoleh oleh satu kalangan, maka semakin sedikit kuasa yang ditinggalkan bagi kalangan yang lain.

Oleh karena itu, kuasa bisa dianggap sebagai sumber kelas pemerintah, sumber suatu sistem sosial atau sebagai konsep *zero-sum*. Dari segi apapun, kuasa adalah dimensi yang penting dalam kehidupan sosial. Jarang sekali dapat kita menemui hubungan sosial yang tidak melibatkan unsur-unsur kuasa. Padahal, kuasa adalah dimensi yang penting dalam stratifikasi sosial yang melibatkan ketidaksetaraan sosial.

Perbedaan utama antara "kuasa" dengan "otoritas" adalah berpengaruh atau tidaknya kuasa itu tidak bergantung kepada penerimaan anggota masyarakat mengenai legitimasinya. Walaupun begitu, kuasa dan otoritas itu kadangkala sukar dipisahkan. Sebagai contoh, dalam keadaan tertentu suatu kelompok bisa menolak otoritas seorang individu, tetapi tidak dapat menentang kuasanya. Perusuh-perusuh mungkin dapat menolak otoritas pihak polisi, tetapi mereka masih bisa dihalang dari melakukan kerusuhan karena kekerasan dan paksaan polisi. **Libat Otoritas.**

Makna

Makna (*meaning*) adalah penafsiran mengenai suatu situasi, perilaku, ide atau objek yang dibuat sebelum seorang individu bertindak atau meresponse. Kedua, makna merupakan kategori persepsi yang dimiliki bersama oleh anggota suatu kebudayaan. Ketiga, walaupun makna dimiliki bersama, ada juga variasinya antar individu yang tergantung kepada pengalamannya yang lalu. Keempat, makna mempunyai satu kelangsungan sejarah dari satu generasi ke generasi lain. Makna berasal dari masyarakat

bahasa dan institusinya serta merupakan sebagian dari struktur masyarakat yang diwarisi. Makna juga bisa berubah yang diakibatkan oleh proses interaksi sosial.

Dalam masyarakat manapun ada makna-makna yang dimiliki bersama (*shared meaning*) di kalangan anggota-anggotanya. Keadaan ini memudahkan interaksi sosial dan komunikasi. Tetapi, di samping makna-makna yang dimiliki bersama, ada pula makna-makna subjektif yang unik bagi tiap-tiap anggota masyarakat terhadap perilakunya.

Konsep makna subjektif merupakan salah satu konsep yang penting dalam sosiologi Max Weber. Bagi Weber, tiap-tiap perilaku sosial mengandung makna subjektif pelakunya. Tujuan sosiologi adalah untuk memahami perilaku sosial dan menerangkan penyebab serta pengaruhnya. Dengan kata lain, penafsiran dan penjelasan sosiologi, menurut Weber, bukan saja mesti mencakup aspek hubungan sebab-akibat, tetapi juga mencakup aspek makna. Lihat **Definisi Situasi**.

Masalah Sosial

Masalah sosial adalah keadaan yang dianggap oleh anggota masyarakat yang berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dapat ditoleransi, atau sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat itu, dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya.

Masalah sosial berbeda dengan masalah-masalah yang lain karena hubungannya yang rapat dengan institusi dan norma. Ia dianggap sebagai masalah sosial karena ia melibatkan hubungan manusia serta nilai-nilai dan menjadi gangguan kepada harapan masyarakat atau hal-hal yang dianggap perlu dari segi moral.

Masalah sosial bisa dibagi ke dalam dua kategori besar: disorganisasi sosial dan perilaku menyimpang (*devian*). Disorganisasi sosial merujuk pada kekurangan atau kegagalan sistem sosial sehingga cita-cita kelompok dan cita-cita individu dalam kelompok itu sukar dipenuhi. Di antara faktor-faktor yang menimbulkan disorganisasi sosial adalah:

1. Kekurangan atau keruntuhan saluran-saluran komunikasi.

2. Konflik nilai dan kepentingan.
3. Kekurangan dalam proses sosialisasi.

Kalau disorganisasi merujuk kepada kekurangan dalam susunan dan perjalanan status dan peran dalam suatu sistem sosial, maka perilaku devian berarti perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ditetapkan bagi orang-orang dalam status mereka. Perilaku yang sama mungkin dianggap devian atau kepatuhan, tergantung pada status sosial orang-orang yang melakukannya. Contoh-contoh masalah sosial adalah sakit jiwa, kriminal di kalangan anak-anak, kriminal, ketagih narkoba, bunuh diri, pelacuran, hubungan etnik, disorganisasi keluarga, kemiskinan dan peperangan.

Berbagai pendekatan telah dikemukakan untuk menyelesaikan masalah sosial. Pendekatan-pendekatan itu di antaranya adalah pendekatan dari segi agama, hukum, informasi, seni, dan sosiologi. Pendekatan agama menekankan standard moral dan mengutuk perilaku yang *devian*. Pendekatan hukum menghukum orang-orang yang bersalah. Pendekatan informasi lebih menekankan penyebarluasan perilaku menyimpang. Pendekatan dalam bidang seni lebih cenderung membedah masalah sosial melalui film, drama atau karya seni yang lain.

Satu unsur persamaan dalam keempat pendekatan yang disebutkan itu adalah penekanan dari segi moral. Kesemuanya tidak dapat dipisahkan dari tujuan etika. Dalam kasus pendekatan agama dan hukum, tujuan utama adalah menghimbau kepatuhan terhadap susunan moral atau hukum. Dalam kasus pendekatan informasi dan seni, cita-cita terakhirnya adalah membangkitkan simpati moral, semangat, kemarahan atau kebencian. Pendekatan sosiologi amat berbeda dengan keempat pendekatan di atas. Tujuan utama sosiolog adalah mencari akar-akar masalah sosial, faktor-faktor penentunya dan hubungannya dengan jenis-jenis perilaku yang lain. Dengan kata lain, apa yang diutamakan oleh sosiolog adalah penjelasan.

Lihat Penyimpangan.

Masyarakat Majemuk

Pada umumnya ada dua tradisi yang bertentangan mengenai konsep pluralisme atau kemajemukan. Tradisi pertama menganggap pluralisme sebagai keadaan di mana pembagian kuasa ada di antara kelompok-kelompok yang disatukan, dengan perasaan kesetiaan yang bercorak *cross cutting*, nilai bersama dan keseimbangan kuasa. Tradisi ini telah ada di Amerika Serikat dan memberikan keadaan-keadaan yang perlu untuk pemerintahan yang bercorak demokrasi dan stabil.

Tradisi kedua masih agak baru dan dipaparkan dalam bentuk teori masyarakat majemuk. Tradisi inilah yang banyak dibicarakan belakangan ini, terutama dalam hubungannya dengan ras atau etnik. Menurut tradisi ini, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok ras atau etnik yang berlainan yang berada di bawah satu sistem pemerintahan. Ciri-ciri utama dalam masyarakat ini adalah konflik, perselisihan dan paksaan. Tradisi kedua inilah yang menjadi tumpuan perhatian pembicaraan kita.

J. S. Furnivall merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep masyarakat majemuk berdasarkan kajiannya di Indonesia dan Burma. Konsep ini digunakan secara khusus untuk merujuk pada masyarakat tropis yang berada di bawah kuasa penjajah, terdapat konflik dan perpecahan di antara kelompok-kelompok yang berbeda keturunannya. Menurut Furnivall, masyarakat majemuk terdiri dari berbagai bangsa yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa, dan adat istiadat yang tersendiri. Walaupun berbagai bangsa itu sama-sama di bawah sistem politik yang sama, tetapi kehidupan mereka itu berlainan; interaksi sosial di kalangan mereka amat kurang, dan hubungan mereka hanya terbatas kepada hal-hal ekonomi dalam jual beli. Pembagian tugas dilakukan atas garis-garis ras.

Berdasarkan pengertian Furnivall, kebijakan sosial masyarakat majemuk adalah campuran berbagai kelompok manusia. Dari segi politik, masyarakat majemuk timbul akibat dominasi penjajah. Satu lagi ciri masyarakat majemuk adalah ketiadaan atau kelemahan tekad sosial bersama (*common social will*) yang merupakan satu set nilai yang disetujui

bertama oleh anggota masyarakat bagi mengontrol dan memberi panduan kepada perilaku sosial

Ide *Parson* mengenai masyarakat majemuk telah banyak dibicarakan oleh tokoh sosiologi selanjutnya. M. G. Smith merupakan salah seorang yang telah memberikan analisis yang panjang lebar mengenai konsep ini. Mengikuti tradisi *Parson*, Smith juga menganggap masyarakat majemuk sebagai masyarakat yang mempunyai kepelbagaian budaya, kepercayaan sosial dan perselisihan. Dari segi politik, masyarakat majemuk dikuasai oleh satu kelompok minoritas yang mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Menurutnya Smith berpendapat bahwa masyarakat majemuk itu ada atas dasar konflik dan paksaan, bukannya atas dasar nilai bersama.

Selain dari *Parson* dan Smith, *Pi van den Berghe* juga memberikan sumbangan terhadap pembincuan mengenai konsep masyarakat majemuk. Ia membedakan kemajemukan sosial (yang ada ketika masyarakat dipecahkan kepada kelompok-kelompok korporat atas dasar bukan budaya) dan kemajemukan budaya (yang timbul akibat adanya beberapa kelompok etnik).

Pi van den Berghe juga menyebutkan beberapa ciri masyarakat majemuk seperti berikut:

1. Ketidadaan konsensus nilai.
2. Keberbagaian kebudayaan.
3. Adanya konflik di antara kelompok yang berlainan.
4. Adanya otonomi atau kebebasan antar bagian dalam sistem sosial.
5. Pentingnya paksaan dan saling ketergantungan dari segi ekonomi sebagai dasar integrasi sosial.
6. Dominasi politik oleh satu kalangan tertentu.
7. Hubungan antar kelompok lebih bercorak sekunder, segmental dan utilitarian, sementara hubungan dalam kelompok lebih berbentuk primer.

Bagi *van den Berghe*, kemajemukan mempunyai tingkat yang

berlainan yaitu sebagian masyarakat lebih tinggi tingkat kemajemukannya dari yang lain. Misalnya Afrika Selatan yang terdiri dari empat kelompok ras utama adalah lebih majemuk atau lebih tinggi tingkat kemajemukannya daripada Amerika Serikat yang hanya mempunyai dua kelompok ras utama. Demikian juga Malaysia, yang penduduknya terdiri dari tiga kelompok etnik yang utama, lebih tinggi tingkat kemajemukannya daripada negara lain seperti Thailand.

Ketiga penulis di atas menyebutkan adanya konflik dan perpecahan sebagai unsur nampak dalam masyarakat majemuk. Pendirian ini amat bertentangan dengan pendekatan fungsional, yang menyatakan bahwa masyarakat ada atas dasar konsensus dan nilai bersama. Dengan demikian, tidak heran jika beberapa kritik mengenai ide atau teori masyarakat majemuk juga datang dari para sosiolog fungsional. Beberapa kritik tersebut adalah:

1. Teori masyarakat majemuk mengabaikan kesatuan dasar yang ada dalam masyarakat.
2. Dari segi metode, teori masyarakat majemuk menganalisis sistem sosial berdasarkan bidang kebudayaan. Ini adalah pendekatan yang tidak sesuai dan menyesatkan.
3. Teori masyarakat majemuk mengabaikan kenyataan sosial karena teori ini tidak menghiraukan berbagai ikatan yang ada di antara anggota dari kelompok-kelompok yang berlainan, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Selain itu, teori masyarakat majemuk memberi keutamaan kepada kesatuan yang ada dalam tiap-tiap kelompok masyarakat sehingga mengabaikan perpecahan.
4. Masyarakat majemuk bukan satu masyarakat istimewa. Bentuknya tidak banyak berbeda dengan masyarakat yang mempunyai lapisan yang kompleks atau masyarakat yang menghadapi masalah-masalah minoritas. Oleh karena itu, suatu teori atau pendekatan istimewa tidak diperlukan untuk menguraikan masyarakat majemuk.

Meskipun teori masyarakat majemuk mempunyai kelemahan tertentu, kelebihanannya juga tidak dapat dinafikan. Teori ini merupakan salah satu percobaan untuk membentuk teori umum mengenai hubungan ras. Teori ini memasukkan betapa pentingnya unsur ras dan etnik ke dalam satu syarat dasar untuk memahami sifat-sifat hubungan ras.

Di samping itu, seperti yang ditegaskan oleh John Rex, kajian mengenai masyarakat majemuk sangat penting dalam bidang sosiologi. Ini disebabkan, pengakuan secara terang-terangan mengenai kemajemukan masyarakat menarik perhatian kita kepada hakikat bahwa sistem sosial bisa ada walaupun konflik lebih nampak dari konsensus. Ketika teori masyarakat majemuk dikembangkan, diperbaiki, dan dipahami dengan lebih teliti, teori ini akan menjadi sama penting dengan teori-teori lain seperti teori Parsons mengenai sistem sosial yang bercorak integrasi. **Lihat Fungsi; Ras.**

Masyarakat Massa

Masyarakat massa (*mass society*) adalah satu unit sosio-politik yang besar dan modern, seperti satu negara, yang muncul akibat perubahan teknologi, perindustrian dan modernisasi, dan dicirikan dengan perilaku massa dan kebudayaan massa

Sebagai satu kolektivitas, massa perlu dibedakan dari *crowd* (kerumunan) dan *public* (orang banyak). *Crowd* biasanya membawa pengertian yang negatif seperti kolektivitas yang tidak terstruktur yang terlibat dalam kerusuhan dan kekacauan, sedangkan *public* membawa maksud yang lebih positif, yang menandakan ada pembicaraan yang rasional. Biasanya kita mengaitkan *crowd* dengan kekerasan dan *public* dengan perundingan; perilaku *crowd* berdasarkan kepada emosi, sementara perilaku *public* lebih bercorak rasional. Hubungan di kalangan *crowd* biasanya mengakibatkan tindakan bersama akibat dari rangsangan emosi yang sama tetapi *public* kerap kali berpecah-belah atas isu-isu tertentu. Kalangan massa berbeda dengan *crowd* dan *public* dalam artian massa melibatkan satu dan atau ribuan individu yang pada dasarnya merespons

terhadap suatu rangsangan dengan cara yang sama. Ketika kalangan massa merespons dengan cara yang sama terhadap rangsangan yang sama, mereka adalah satu kolektivitas yang amat longgar. Sifat kelonggaran kolektivitas itu mendorong sebagian sosiolog menganggapnya sebagai perilaku individual.

Menurut Herbert Blumer, anggota kalangan massa mempunyai beberapa sifat seperti berikut:

1. Mereka tidak kenal satu sama lain. Oleh karena itu, tidak terdapat rangsangan satu sama lain.
2. Mereka berasal dari latar belakang yang amat berbeda dan mempunyai kepentingan yang berlainan.
3. Mereka tidak mempunyai hubungan satu sama lain.
4. Mereka tidak mempunyai organisasi sosial.

Sifat-sifat ini dengan jelasnya membedakan kalangan massa dari *crowd* dan *public*, baik sebagai kolektivitas maupun sebagai jenis-jenis perilaku yang kolektif.

Di antara ciri-ciri lain masyarakat massa adalah:

1. Adanya perilaku massa dan kebudayaan massa. Perilaku massa adalah perilaku kolektif yang berdasarkan kepada hubungan yang berbentuk impersonal dan tidak langsung di kalangan anggota suatu negara yang besar kompleks dan beraneka ragam. Kebudayaan massa merupakan unsur kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat yang kompleks dan juga beraneka ragam akibat akses yang sama terhadap komunikasi umum, seperti lagu-lagu dan tari-tarian pop. Kebudayaan massa adalah kebudayaan populer di kalangan kebanyakan anggota masyarakat yang disebarkan oleh komunikasi umum seperti radio dan televisyen.
2. Penyebaran atas khalayak (seperti radio, televisi, koran, dan film) memainkan peranan yang penting untuk membuat terjadinya hubungan. Penyebaran tersebut juga mengeratkan

TEORI SOSIAL

- perasaan kesetiaan, pemusatan kuasa politik, dan perkembangan birokrasi
3. Keadaan saling ketergantungan juga bertambah, akibat bertambahnya pembagian kerja. Di samping itu, peluang mobilitas sosial dan penekanan terhadap status sosial juga turut bertambah.
 4. Keruntuhan nilai agama juga terjadi ketika masyarakat menjadi lebih sekular, yaitu lebih menekankan hal-hal duniawi dan kebendaan.
 5. Terdapatnya hubungan yang sekunder dan impersonal di antara individu, tidak lagi hubungan bertatap muka.

Kemunculan masyarakat massa sebagian besarnya disebabkan oleh kemajuan teknologi. Keadaan ini tidak semestinya dikaitkan dengan sistem politik tertentu. Sistem demokrasi atau totalitarianisme bisa ada dalam masyarakat massa. Ini terbukti dengan sistem demokrasi di Amerika Serikat dan Inggris dan komunisme di Rusia.

Sebagai suatu konsep penting dan juga sebagai suatu aspek masyarakat kapitalis, masyarakat massa telah mendapat perhatian dari beberapa sosiolog modern, terutama di Amerika Serikat dan Inggris.

Di Amerika Serikat, tingkatan awal teori mengenai masyarakat massa diperluas oleh sosiolog yang menumpukan perhatian kepada perbedaan di antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Mereka menganggap masyarakat kota merupakan satu tingkatan sosial yang bebas dari batasan dan tekanan tradisi konservatif, dan juga mempunyai satu susunan sosial yang lebih stabil. Pandangan yang optimistik ini dipegang kuat oleh R.E. Park dan didukung oleh Herbert Blumer, walaupun Blumer menemui banyak unsur yang tidak rasional dalam perilaku massa.

C.W. Mills membicarakan pengertian masyarakat massa dalam bukunya *The Power Elite* (1959). Ia berpendapat bahwa segala keputusan politik yang sangat penting ditentukan oleh segelintir pemimpin yang menduduki kedudukan yang tinggi dalam bidang administrasi, tentara,

dan perdagangan. Kalangan massa sebenarnya tidak mempunyai kuasa dalam keputusan-keputusan sangat penting. Mereka hanya menerima apa yang diputuskan oleh "kalangan elit yang berkuasa" (*ruling elite*), apakah melalui proses bujukan ataupun melalui paksaan secara halus seperti penutupan saluran-saluran oposisi.

Idc Nisbet juga sesuai dengan pembicaraan mengenai masyarakat massa. Dalam bukunya *Community and Power* (1962), Nisbet mencoba menunjukkan cara bagaimana manusia 'pinggir kota' (*sub-urban*) mengalami alienasi dan privatisasi, dan menjadi tidak berkuasa dalam masyarakat massa.

Pada umumnya, kebanyakan teori masyarakat massa menganggap bahwa manusia massa atau individu dalam masyarakat massa adalah individu yang mengalami proses alienasi yang gelisah, dan tidak dapat membuat pilihan rasional mengenai sesuatu dan seolah-oleh mempunyai psikologi yang berbeda dengan manusia rasional. Sayangnya, hal ini belum dibuktikan melalui pengujian yang ilmiah. **Lihat Alienasi, Birokrasi, Kelompok Sosial.**

Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial merupakan proses perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain dalam satu sistem stratifikasi sosial. Mobilitas sosial adalah fenomena kompleks yang terdiri dari beberapa dimensi.

Yang pertama, dari segi arah, mobilitas bisa bercorak mendatar (horizontal) atau menegak (vertikal). Mobilitas horizontal merupakan perubahan kedudukan sosial seorang dalam kelas sosialnya tanpa perubahan dari segi hierarki prestise dan jenis kelas sosialnya. Ini bisa terjadi, misalnya, ketika seorang individu bertukar kerja dari satu kerja setengah-ahli kepada kerja setengah-ahli yang lain dalam tingkat martabat (*prestise*) yang sama. Mobilitas menegak adalah perubahan di antara kelas-kelas sosial atau status suatu masyarakat, baik ke atas atau ke bawah, yang melibatkan kenaikan atau penurunan status atau martabat seorang individu.

Kedua, mobilitas sosial ditinjau dari segi waktu, yakni apakah mobilitas terjadi dalam satu generasi tertentu atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Mobilitas yang dilalui oleh seorang individu dalam tempo hidupnya, misalnya dari satu kerja kepada jenis kerja lain dikenal sebagai mobilitas segenerasi (*intra-generational*). Perubahan jenis kerja di antara anak dengan ayah, yang melibatkan kelas sosial atau martabat mereka, seperti seorang anak petani menjadi dosen, dikenal sebagai mobilitas antar generasi (*inter-generational*). Ketiga, mobilitas juga dapat dilihat dari segi unit yang terlibat apakah individu atau keluarga.

Mobilitas sosial biasanya ditinjau dalam hubungannya dengan pekerjaan. Ini adalah karena:

1. Pekerjaan berkaitan erat dengan faktor-faktor penting yang menentukan kedudukan dan status sosial, seperti pendapatan, pola penggunaan, pendidikan, dan gaya (*style*) hidup.
2. Pekerjaan merupakan suatu kategori penting untuk membagi dan menentukan kedudukan tinggi rendahnya anggota masyarakat.
3. Pekerjaan bisa dijadikan indeks yang objektif dalam penelitian secara besar-besaran.

Mobilitas sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu yang antara lain adalah:

1. Struktur pekerjaan yang dapat menentukan peluang-peluang mobilitas.
2. Perbedaan kadar kelahiran yang menentukan tiap-tiap lapisan dapat menggantikan anggotanya dan seterusnya hingga ini juga mempengaruhi peluang-peluang mobilitas.

Faktor-faktor lain yang penting adalah struktur peluang dalam pendidikan dan motivasi perseorangan. Dalam masyarakat yang mempunyai sistem stratifikasi yang rigid, yang berdasarkan kepada faktor ras, keturunan atau warna kulit individu memainkan peranan penting

bagi memperluas atau membatasi peluang mobilitas. Sebagian sosiolog membagi mobilitas kepada dua jenis:

1. Mobilitas anjuran (*sponsored mobility*) dan beberapa faktor tertentu seperti keturunan, pendidikan dan kelas sosial. Status elit diberikan oleh elit yang telah dikenal atau wakil-wakilnya berdasarkan kepada ukuran tertentu, bukannya semata-mata berdasarkan usaha dan kemampuan.
2. Mobilitas tandingan Di sini, faktor-faktor yang membatasi pencapaian individu tadi tidak ada. Persaingan adalah terbuka dan status elit bisa dicapai oleh siapapun melalui usaha, kerajinan, dan kemampuannya. Bentuk mobilitas tandingan ini biasanya dikaitkan dengan kadar mobilitas yang lebih tinggi.

Mobilitas sosial berkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat. Dalam sistem yang lebih terbuka, seperti sistem kelas sosial, peluang untuk mobilitas sosial adalah lebih terbuka dan meluas. Sebaliknya dalam sistem tertutup atau separuh tertutup, seperti dalam sistem kasta yang bercorak tradisi, mobilitas sosial jarang sekali terjadi. **Lihat Kelas Sosial, Status, Struktur Sosial.**

Nilai

Nilai (*value*) merupakan satu prinsip umum yang menyediakan anggota masyarakat dengan satu ukuran atau standard untuk membuat keputusan dan pilihan mengenai tindakan dan cita-cita tertentu.

Nilai bukan objek. Karenanya, nilai tidak mempunyai sifat-sifat objektif seperti bentuk dan warna. Nilai adalah konsep, suatu pembentukan mental yang dirumuskan dari perilaku manusia. Nilai adalah anggapan yang sangat penting, yang baik, dan dihargai.

Menurut Clyde Kluckhohn, nilai adalah standard yang langgeng dari segi waktu. Nilai adalah standard yang mengatur sistem tindakan. Nilai juga merupakan keutamaan (*preference*), yaitu, sesuatu yang lebih disukai, baik mengenai hubungan sosial, maupun mengenai cita-cita serta



ikhtiar untuk mencapainya.

Di samping itu, nilai juga melibatkan persoalan apakah suatu benda dan tindakan itu diperlukan, dibargai, atau sebaliknya. Pada umumnya nilai adalah sesuatu yang sangat dikehendaki. Oleh karena itu, nilai melibatkan unsur keterlibatan (*commitment*). Nilai juga melibatkan pilihan. Di kalangan masyarakat atau kebudayaan, biasanya ada beberapa pilihan ketika seseorang menghadapi suatu situasi. Pemilihan suatu pilihan tertentu biasanya ditentukan oleh kesadaran individu terhadap standard atau prinsip yang ada di kalangan masyarakat itu. Kebanyakan perilaku yang dipilih melibatkan nilai-nilai individu yang terlibat atau nilai-nilai kelompoknya.

Nilai adalah satu unsur penting dalam kajian sosiologi pada beberapa tingkatan tertentu. Oleh karena itu, nilai tidak dapat dipisahkan dasarnya. *Pertama*, nilai bisa dijadikan pokok bahasan dalam penelitian sosiologi, seperti mengkaji sistem nilai dan kepercayaan masyarakat tertentu. *Kedua*, nilai atau tepatnya penilaian senantiasa terlibat dalam proses pemilihan judul atau masalah untuk dikaji. *Ketiga*, nilai juga terlibat ketika seorang peneliti membuat pembagian jenis dan analisis data.

Situasi pertama tidak perlu dipersoalkan lagi. Situasi kedua kelihatan lebih rumit. Unsur nilai tidak bisa tidak akan terlibat dalam proses pemilihan masalah atau bidang-bidang kajian. Sepertian Max Weber, tidak terdapat ukuran yang dikatakan ilmiah secara instrinsik untuk menentukan dan memilih tajuk kajian. Dalam proses pemilihan, tiap-tiap peneliti dipengaruhi oleh pendirian moral, minat serta pengalamannya. Dan keterlibatan nilai pada tahapan penelitian ini, menurut Weber, tidak semestinya mengurangi objektivitas suatu kajian.

Masalah ketiga adalah keterlibatan nilai dalam arti kata membuat pertimbangan nilai (*value judgement*) pada tahapan analisis, adalah masalah yang paling rumit. Keterlibatan nilai pada tahapan ini dapat mengurangi objektivitas suatu kajian.

Masalah kebebasan nilai (*value-freedom*) dalam bidang sosiologi khususnya dan dalam bidang ilmu-ilmu sosial umumnya telah banyak

dibicarakan oleh ahli ilmu-ilmu sosial. Banyak di antara mereka berpendapat bahwa pengadilan yang berdasarkan nilai suatu penilaian sukar dihindari dalam analisis fenomena sosial. Weber sendiri pernah menegaskan bahwa tidak terdapat analisis ilmiah yang seratus persen objektif mengenai fenomena sosial. Jadi tujuan para sosiolog adalah untuk mencoba sedapat mungkin mengfundasi penghakiman nilai untuk memastikan objektivitas, walaupun hal itu sesuatu yang mustahil. Oleh karenanya, "orientasi nilai" seorang peneliti perlu dijelaskan dalam suatu penelitian seperti yang ditekankan oleh Gunnar Myrdal dan Karl Mannheim. **Libat Objektivitas, Norma Sosial.**

Norma Sosial

Norma sosial (*social norm*) merupakan perilaku standard yang disetujui bersama oleh anggota kelompok. Terhadap norma sosial itu, anggota kelompok itu diharapkan dapat mematuhi. Sebagai perilaku standard, norma sosial merupakan peraturan yang ditentukan dan disetujui bersama oleh sebagian besar anggota masyarakat mengenai layak atau tidaknya suatu perilaku. Pada umumnya, norma sosial merupakan suatu garis panduan bagi anggota masyarakat pada waktu menghadapi kondisi tertentu.

Penerimaan serta kepatuhan kepada norma sosial penting untuk menjadikan adanya kesatuan kelompok atau masyarakat. Beberapa norma sosial yang diterima oleh kebanyakan masyarakat adalah larangan terhadap pembunuhan, pencurian dan perampokan. Tanpa norma sosial kehidupan manusia akan terganggu dan masyarakat menjadi kacau balau. Ketika suatu perilaku dianggap sebagai normatif, kita sebenarnya menekankan bahwa tindakan itu mematuhi atau sesuai dengan harapan dan kehendak masyarakat umumnya. Perilaku yang tidak mematuhi norma sosial atau bertentangan dengannya dianggap sebagai *deviance*. Perilaku *homosexual*, misalnya, dianggap *deviance*. Sementara *heterosexual* diterima sebagai satu norma.

Norma sosial ada akibat interaksi sosial. Norma mencerminkan

harapan bersama mengenai perilaku dalam suatu kelompok. Norma sosial dipelajari melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Norma sosial bukan sesuatu yang tetap, tetapi berubah dari waktu ke waktu. Pengetahuan yang baru dan keadaan yang berubah bisa menyebabkan berkembangnya norma-norma baru.

Norma-norma sosial sangat erat hubungannya dengan konsep-konsep *folkways* dan *mores* yang telah dipopularkan oleh W.G. Sumner. *Folkways* adalah perilaku standard atau cara-cara bertindak yang dianggap wajar dalam suatu masyarakat tertentu. Konsep ini berlandaskan pada adat istiadat dan tradisi, dan diwarisi dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi. *Folkways* terdiri dari bentuk sopan santun, dan cara-cara bertindak yang diterima dalam kehidupan sosial, sifatnya berbeda-beda antar masyarakat. *Folkways* tidak dilegitimasi oleh hukum, tetapi oleh kontrol sosial yang tidak formal. Perbuatan yang bertentangan dengan *folkways* biasanya tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius.

Mores merupakan norma sosial yang lebih dasar bagi kehidupan sosial. *Mores* menentukan standard moral suatu perilaku. Anggota suatu masyarakat wajib mematuhi *mores* dan mereka yang ingkar akan menerima hukuman tidak formal yang keras seperti ejekan, hinaan dan penyingkiran dari kelompok-kelompok yang berhubungan. Jadi *mores* juga merupakan satu bentuk kontrol sosial. Satu contoh *mores* yang bisa dikatakan universal adalah incest taboo atau larangan kawin dengan saudara.

Bagi kebanyakan sosiolog, khususnya sosiolog fungsional, norma sosial adalah penting dalam kontrol sosial guna melanggengkan susunan sosial. Talcott Parsons, misalnya, memberi keutamaan kepada peraturan normatif dalam teorinya mengenai sistem sosial. Dengan berbuat demikian, ia mengabaikan adanya unsur konflik yang senantiasa mengancam konsensus sosial. **Lihat Nilai, Penyimpangan, Peran Sosial.**

Objektivitas

Keobjektifan atau objektivitas adalah sifat penelitian ilmiah yang bebas dari pemutar-balikan, bias, dan prasangka dalam persepsi

atau penjelasan. Suatu analisis dikatakan objektif ketika analisis itu menggunakan rangka-dasar teori serta metode penelitian yang dianggap paling baik.

Penjelasan mengenai fenomena sosial adalah cita-cita utama ahli ilmu sosial, dan hal ini juga merupakan masalah yang paling kompleks yang disebabkan oleh fenomena sosial yang saling berkaitan dan daya ciptaan manusia yang beraneka ragan. Masalah penjelasan ini diperburuk lagi oleh hakikat bahwa sebagian ahli ilmu sosial mempunyai prasangka dan pandangan yang berat sebelah terhadap sesuatu. Salah satu masalah bagaimana seorang ahli ilmu sosial dapat memberi satu penjelasan atau analisis yang objektif, berdasarkan kepada fakta-fakta yang diperhatikan secara tepat dan tidak "dicemari" atau dipengaruhi oleh nilai, prasangka, dan kepercayaannya.

Inilah masalah metodologi yang banyak dibicarakan oleh ahli ilmu, tetapi masih belum diatasi secara memuaskan. Pada umumnya, menurut Gunnar Myrdal, objektivitas bisa digugat serta tercemar oleh beberapa faktor tertentu:

1. Pengaruh dari seluruh lingkungan kebudayaan, sosial, ekonomi, politik di mana seorang peneliti hidup bekerja.
2. Pengaruh dari kepribadiannya, yang diwarnai oleh tradisi kebudayaan, alam, serta pengalaman persorangn;
3. Pengaruh dari tulisan-tulisan yang telah diturunkan dari generasi yang lalu, yang penuh dengan pengertian berbentuk normatif dan teleologi.

Jadi untuk mencapai objektivitas, ahli ilmu sosial hendaklah terlebih dahulu menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh tadi. Di samping itu, ahli ilmu sosial perlu menyatakan secara terus-terang orientasi dan pendirian nilai yang mempengaruhi dan menentukan penelitian mereka. Bagi sebagian ahli ilmu sosial, inilah cara yang paling berpengaruh untuk mencapai objektivitas dalam kajian mereka. Tidak ada kemungkinan untuk ahli ilmu sosial menjadi value-free sepenuhnya. (Lihat Gunnar Myrdal,

TEORI SOSIAL

Objectivity in Social Research, [1969]).

Objektivitas adalah sikap yang perlu diambil oleh ahli ilmu sosial. Ini berarti ahli ilmu sosial perlu sedaya upaya mengambil sikap pendirian yang "netral" dalam artian tidak berpihak, dan tidak melakukan penghakiman berdasarkan kepada nilai tentang suatu situasi (misalnya, tentang baik atau tidaknya, tentang adil atau tidak situasi itu). Tujuan ahli ilmu sosial adalah untuk memerhati, menganalisis, mentafsir dan menerangkan suatu situasi atau fenomena sosial dengan sikap yang netral tanpa sebarang penghakiman yang berdasarkan kepada nilai, walaupun hal yang terakhir itu paling sukar dicapai. **Lihat Nilai.**

Observasi

Observasi atau penelitian adalah teknik pengumpulan data dalam sosiologi dan bidang ilmu yang lain. Istilah ini berarti penelitian investigasi dan rekaman perilaku dan fenomena sosial secara langsung oleh seorang peneliti. Dalam bidang ilmu sosial, khususnya antropologi, teknik yang amat luas digunakan adalah penelitian ikut serta (*participant observation*). Melalui metode ini seorang peneliti menyertai kehidupan sosial kelompok atau organisasi yang dikajinya. Dia melihat dan memerhatikan kegiatan perilaku dan lain-lain, serta melibatkan diri dalam perbuatan dan pembicaraan dengan anggota kelompok untuk mengetahui reaksi serta penafsiran mereka terhadap suatu kejadian tertentu. Biasanya metode ini digunakan untuk mengkaji kelompok atau komunitas kecil, seperti keluarga, pabrik, kota atau rumah sakit.

Satu contoh penelitian sosiologi yang menggunakan teknik penelitian ikut serta dengan sukses adalah kajian Erving Goffman mengenai pasien penyakit jiwa di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat (Lihat Goffman, *Asylums*, 1961). Dibandingkan dengan teknik-teknik pengumpulan data yang lain, metode penelitian ini mempunyai beberapa kelebihan tertentu.

Pertama, metode ini membolehkan seorang peneliti merekam atau mencatat perilaku atau fenomena secara langsung seperti yang diperhatikan.

tanpa melalui informan.

Kedua, metode ini berpengaruh ketika informan tidak sanggup memberi informasi mengenai suatu hal, yakni dalam keadaan-keadaan ketika pertanyaan tidak berpengaruh. Keadaan ini timbul, misalnya, ketika pengetahuan atau informasi yang bercorak teknis diperlukan. Misalnya, tidak banyak orang yang tahu jenis darah dan tingkat tekanan darah mereka, atau keadaan penglihatan mereka. Informasi yang berhubungan dengan hal-hal ini bisa diperoleh melalui penelitian secara langsung. Kajian mengenai anak-anak kadang-kadang juga memerlukan metode penelitian karena anak-anak tidak memahami dan tidak sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan.

Ketiga, penelitian lebih berpengaruh kalau sekiranya informasi atau data yang diperlukan adalah dalam bentuk waktu dan jarak, karena pertanyaan yang berhubungan dengan waktu dan jarak kerap kali tidak mendapat jawaban yang tepat. Informasi-informasi yang dikumpulkan melalui metode pertanyaan kadangkala tidak tepat karena kesalahan ingatan, dan masalah ini bisa dihindari melalui metode penelitian.

Namun demikian, beberapa kelemahan ada dalam metode ini. Pertama, metode ini tidak sesuai untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang telah terjadi atau mengenai sikap dan pendapat. Kedua, terdapat kesukaran untuk mendapatkan sampel acak (*random sample*). Ketiga, masalah objektivitas mungkin timbul akibat prasangka peneliti, prakonsepsinya, rekaman, serta identifikasi dan keterlibatan peneliti yang terlalu banyak.

Otoritas

Otoritas (*authority*) merupakan kuasa yang telah disahkan dan dilembagakan dalam suatu masyarakat atau sistem sosial. Bentuk kuasa ini dikaitkan dengan status sosial dan dianggap sebagai wajar dan sah oleh anggota masyarakat. Unsur yang diberi perhatian dalam otoritas adalah legitimasi mengenai kuasa yang digunakan. Pada umumnya otoritas merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari suatu status. Otoritas

juga tidak bergantung kepada sifat pribadi pemegang status itu.

Karena otoritas dianggap sebagai sah, maka penggunaannya agak berpengaruh dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Max Weber membedakan tiga jenis otoritas: yang bercorak tradisi, yang berdasarkan kharisma, dan yang bersifat rasional. Pembagian jenis ini berdasarkan legitimasi dan merupakan alat yang penting untuk memahami bentuk kuasa dan otoritas yang ada dalam masyarakat.

Otoritas yang bercorak tradisi ditetapkan oleh tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Orang-orang yang mempunyai otoritas yang bercorak tradisi ini diterima oleh pengikut-pengikutnya sebagai hak mereka. Status warisan (*ascribed status*) adalah bentuk kewibawaan yang bercorak tradisi.

Sistem otoritas yang bercorak tradisi biasanya terdiri dari dua unsur penting. Pertama, segala peraturan ditentukan oleh tradisi dan diwarisi naun-temurun; sah atau tidak peraturan itu tidak dipersoalkan lagi. Kedua, ada satu hierarki atau lapisan mengenai status dan peranan di kalangan pemimpin dan individu yang terlibat dalam administrasi. Peranan itu biasanya samar (*diffuse*) dan tidak ditentukan dengan jelas. Seorang raja, misalnya berhak melakukan sesuatu dengan sewenang-wenang.

Otoritas yang berbentuk kharisma berdasarkan kepada kepercayaan atau mitos. Mitos menggambarkan pemimpin yang terlibat mempunyai sifat pribadi yang suci dan luar biasa. Otoritas yang berdasarkan kepada kharisma hanya berlandaskan kepada daya tarik seorang pemimpin, sifat-sifatnya yang dianggap luar biasa, dan tidak bersangkut-paut dengan peraturan atau status yang diwarisinya. Pemimpin agama seperti Buddha dan Isa seringkali dianggap sebagai pemimpin yang mempunyai kharisma.

Otoritas yang rasional ada ketika terdapat sistem hukum dan peraturan yang jelas. Hukum, peraturan, dan tatacara merupakan inti otoritas yang rasional. Contohnya adalah pengambilan pegawai atau pelaksanaan suatu kebijakan dilakukan menurut peraturan dan tatacara yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jabatan yang disandang oleh seorang individu adalah formal dan mesti dibedakan dari kehidupan individunya. Hubungan

yang ada di antara pegawai-pegawai bercorak formal dan impersonal.

Otoritas rasional merupakan ciri utama dalam masyarakat modern. Pada umumnya, segala jenis kontrol administrasi (*administrative control*) dalam masyarakat modern, baik hukum mengenai lalu lintas maupun peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak pendapatan, melibatkan otoritas yang rasional, yaitu penguasaan manusia ke atas manusia lain supaya mematuhi individu yang menjalankan tugas itu.

Dalam membicarakan ketiga bentuk otoritas perlu dicatat bahwa bentuk-bentuk ini bersifat unggui. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk ini tidak dapat ditemui dalam kehidupan. Sistem otoritas yang ada kerap kali berisi unsur-unsur lebih dari bentuk tipe ideal tadi. Misalnya otoritas yang rasional bercampur dengan otoritas yang bercorak tradisi seperti otoritas seorang Sultan. Lihat **Kharisma, Kuasa**.

Pembagian Kerja

Konsep ini berhubung dengan pembagian kerja atau tugas ke dalam bagian-bagian tertentu. Konsep ini mula-mula digunakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 1775. Kemudian konsep ini digunakan secara meluas dalam tulisan-tulisan tentang ekonomi. Penggunaan konsep ini dalam sosiologi mula-mula dikemukakan oleh Emile Durkheim dalam bukunya *The Division of Labour in Society*. Pembagian kerja, menurut Durkheim, bukan berarti sebagai pembagian kerja dan fungsi ekonomi sebagaimana yang dipahami oleh ekonomi. Pembagian fungsi ekonomi hanya merupakan salah satu aspek pembagian kerja. Pembagian kerja menurut pengertian Durkheim melibatkan seluruh struktur masyarakat, yakni pembedaan sosial (*social differentiation*) yang meliputi bukan saja pengkhususan dalam bidang ekonomi, bahkan juga dalam bidang sosial, politik, administrasi, dan sebagainya.

Bagi Durkheim, pembagian kerja adalah fenomena yang amat penting dalam masyarakat modern karena fenomena ini dapat menjalin komunikasi di kalangan anggota masyarakat dan seterusnya hingga

mengadakan kesatuan sosial. Namun, pembagian kerja tidak semestinya menghasilkan kesatuan sosial. Kadangkala pembagian kerja ada dalam bentuk yang tidak normal. Pembagian kerja yang bercorak anomi, misalnya, merupakan salah satu bentuk pembagian tugas yang tidak normal. Ini terjadi ketika pengkhususan yang ekstrem diikuti dengan runtuhnya komunikasi di antara orang-orang yang menjalankan berbagai tugas yang berlainan. Oleh karena kekurangan pengertian dan komunikasi, hubungan antar individu menjadi tidak erat. Sebaliknya, mereka dipisahkan satu sama lain. Pembagian kerja anomi dianggap tidak normal karena fenomena ini memecahkan kesatuan sosial.

Satu lagi bentuk pembagian kerja yang tidak normal adalah pembagian kerja secara paksa. Keadaan ini terjadi ketika anggota masyarakat dipaksa melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan minatnya atau tidak disukai. Sistem kasta dan kelas merupakan faktor utama yang menjadikan adanya pembagian kerja secara paksa. Pembagian kerja secara paksa ini juga tidak menjadikan adanya kesatuan sosial. Persoalan pembagian kerja juga banyak dibicarakan oleh sosiolog lain. Comte, misalnya, berpendapat bahwa pembagian kerja pada intinya memupuk kesatuan dengan menjadikan adanya suatu keadaan saling ketergantungan. Tetapi perbedaan dari segi kepentingan, kepercayaan dan nilai akibat pembagian kerja yang kian bertambah akan juga menimbulkan konflik dan perpecahan di kalangan anggota masyarakat. Sementara itu, Spencer berpendapat bahwa keadaan sosial yang saling ketergantungan yang ada akibat pembagian kerja akan mengurangi kemungkinan terjadinya perpecahan sosial.

Berbeda dengan pendirian kebanyakan sosiolog, Karl Marx menganggap pembagian kerja sebagai faktor yang menimbulkan konflik dan perpecahan masyarakat. Dari segi individu, pembagian kerja (di pabrik misalnya) memerlukan buruh melakukan latihan yang khusus dan oleh karena itu individu yang terlibat hanya dapat mengembangkan aspek kemampuan tertentu. Oleh karena itu potensi dan kemampuannya tidak dapat dikembangkan lagi dengan sepenuhnya. Ini mempunyai

pengaruh psikologi yang buruk ke atas individu yang terlibat. Di samping itu, pengkhianatan yang ekstrem dan terlalu banyak penggunaan mesin menyebabkan pengangguran secara besar-besaran. Ini tentu akan menimbulkan pengaruh sosial yang buruk. **Libat Anomi, Kohesi Sosial.**

Pengertian

Dalam metode sosiologi, istilah *verstehen* yang berarti pengertian kerap diperbincangkan. Pengertian adalah satu metode sosiologi Max Weber yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan perilaku manusia dari segi makna subjektif.

Pengertian, bagi Weber, dapat dibagi kepada dua jenis. Jenis pertama berhubungan dengan pengertian yang berdasarkan penelitian secara langsung (*direct observational understanding*) mengenai makna perilaku atau kejadian. Kita memahami melalui penelitian secara langsung, makna proposisi 2 x 2 = 4 ketika kita mendengar atau membacanya. Ini adalah contoh pengertian rasional dan secara langsung mengenai suatu ide. Kita juga dapat memahami keadaan kemasalahan seorang individu seperti yang ditunjukkan oleh un mukanya, terakan atau perilaku yang tidak rasional. Ini adalah pengertian yang berdasarkan penelitian secara langsung mengenai reaksi perasaan yang tidak rasional.

Jenis pengertian yang kedua dikenal sebagai pengertian yang berorientasi penjelasan (*explanatory understanding*). Penelitian ini melibatkan motif suatu perilaku. Kita, misalnya, memahami apa yang mendorong berbuat demikian pada waktu dan dalam keadaan tertentu. Pengertian itu bisa dicapai kalau orang yang melakukannya itu sedang melibatkan diri dalam membuat kalkulasi atau demonstrasi ilmiah atau proyek-proyek lain; sedangkan tadi (menurut 2x2 = 4) adalah diperlukan di sini. Ini dikatakan pengertian yang rasional mengenai motivasi yang melatarbelakangi perilaku tertentu dalam konteks atau situasi yang bisa dipahami.

Jadi kita dapat memahami tindakan orang yang memotong kayu dari segi motif kalau kita tahu itulah mata pencariannya, atau memotong kayu itu untuk kegunaan sendiri atau sebagai satu hiburan. Dengan cara

TEORI SOSIAL

yang sama, kita memahami motif orang yang membawa sepucuk senapan kalau kita tahu dia telah diarahkan untuk menembak sesuatu, atau kalau dia ingin menembak musuhnya, atau kalau dia ingin membalas dendam.

Dalam contoh-contoh di atas, suatu tindakan telah diletakkan dalam urutan motivasi yang bisa dipahami. Pengertian tentang urutan motivasi bisa diterima sebagai penjelasan sebenarnya tentang suatu perilaku. Jadi, bagi bidang ilmu yang menumpukan perhatian kepada makna subjektif suatu tindakan, penjelasan memerlukan pengertian terhadap konteks makna tindakan itu ada.

Untuk memahami motif atau makna subjektif tentang perilaku, cara yang bisa kita gunakan adalah empati (*empathy*) Ini berarti kita meletakkan diri kita seolah-olah dalam keadaan seorang pelaku yang terlibat dalam upaya hendak memahami motif dan tujuan perilakunya. Weber berpendapat bahwa cara empati penting, karena empati membuat kita mampu memahami dengan lebih jelas mengenai suatu fenomena. Tetapi, cara ini bukannya satu syarat yang perlu dalam pengertian dan penafsiran yang berarti. Menurut Weber, untuk memahami Caesar tidaklah perlu menjadi Caesar.

Sebagai satu metode, kejayaan *verstehen* bergantung kepada pengertian seorang peneliti atau peneliti tentang kebudayaan, norma dan nilai perilaku yang diperhatikan itu terjadi.

Weber telah berkali-kali menekankan betapa perlu dan sangat pentingnya pengertian mengenai makna subjektif perilaku. Tetapi, baginya, metode *verstehen* hanya merupakan langkah yang pertama dalam proses melacak hubungan sebab-akibat. *Verstehen* adalah langkah atau syarat yang diperlukan tetapi bukanlah syarat yang mencukupi dalam penjelasan sosiologi. Metode ini perlu dilengkapi dengan percobaan, ujian statistik, dan perbandingan.

Kelebihan dan kekurangan metode *verstehen* telah dibicarakan secara hangat oleh ahli ilmu sosial. Theodore Abel berpendapat bahwa metode ini terlalu bersandarkan kepada pengetahuan dari pengalaman pribadi. Metode ini bukan metode pembuktian dan tidak

TEORI SOSIAL

yang sama, kita memahami motif orang yang membawa sepucuk senapan kalau kita tahu dia telah diarahkan untuk menembak sesuatu, atau kalau dia ingin menembak musuhnya, atau kalau dia ingin membalas dendam.

Dalam contoh-contoh di atas, suatu tindakan telah diletakkan dalam urutan motivasi yang bisa dipahami. Pengertian tentang urutan motivasi bisa diterima sebagai penjelasan sebenarnya tentang suatu perilaku. Jadi, bagi bidang ilmu yang menumpukan perhatian kepada makna subjektif suatu tindakan, penjelasan memerlukan pengertian terhadap konteks makna tindakan itu ada.

Untuk memahami motif atau makna subjektif tentang perilaku, cara yang bisa kita gunakan adalah empati (*empathy*). Ini berarti kita meletakkan diri kita seolah-olah dalam keadaan seorang pelaku yang terlibat dalam upaya hendak memahami motif dan tujuan perilakunya. Weber berpendapat bahwa cara empati penting karena empati membuat kita mampu memahami dengan lebih jelas mengenai suatu fenomena. Tetapi, cara ini bukannya satu syarat yang perlu dalam pengertian dan penafsiran yang berarti. Menurut Weber, untuk memahami Caesar tidaklah perlu menjadi Caesar.

Sebagai satu metode, kejayaan *verstehen* bergantung kepada pengertian seorang peneliti atau peneliti tentang kebudayaan, norma dan nilai perilaku yang diperhatikan itu terjadi.

Weber telah berkali-kali menekankan betapa perlu dan sangat pentingnya pengertian mengenai makna subjektif perilaku. Tetapi, baginya, metode *verstehen* hanya merupakan langkah yang pertama dalam proses melacak hubungan sebab-akibat. *Verstehen* adalah langkah atau syarat yang diperlukan tetapi bukanlah syarat yang mencukupi dalam penjelasan sosiologi. Metode ini perlu dilengkapi dengan percobaan, ujian statistik, dan perbandingan.

Kelebihan dan kekurangan metode *verstehen* telah dibicarakan secara hangat oleh ahli ilmu sosial. Theodore Abel berpendapat bahwa metode ini terlalu bersandarkan kepada pengetahuan dari pengalaman pribadi. Metode ini bukan metode pembuktian dan tidak

Teori Sosial

ukuran. Salah satu ukurannya adalah apakah penjelasan itu mengandung generalisasi ataupun tidak. Penjelasan yang mengandung generalisasi dikenal sebagai penjelasan dari segi hukum (*law explanation*). Penjelasan yang tidak mengandung generalisasi dikenal sebagai penerapan genesis. Ukuran yang kedua merujuk kepada apakah yang mendorong seorang pelaku melakukan sesuatu: sebab, tujuan, disposisi, dan sebagainya.

Sosiologi, seperti bidang ilmu yang lain, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab-musabab mengenai suatu fenomena. Selain itu, sosiologi juga membuat penjelasan dari segi tujuan dan makna. Hal ini telah ditekankan oleh Max Weber yang menegaskan bahwa penjelasan sosiologi perlu mencukupi bukan saja dari segi sebab-musabab, tetapi juga dari segi makna. Hal ini dibuktikan dalam kajiannya mengenai etika Protestant dan kapitalisme modern.

Dalam usaha kita untuk menerangkan fenomena sosial, kita seringkali menghadapi beberapa kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah untuk memastikan apakah yang kita perhatikan itu dapat diterangkan dengan menggunakan hukum-hukum kalau kita mempunyai semua data yang sesuai.

Kesulitan tersebut diperburuk lagi oleh sifat fenomena sosial yang kompleks dan saling berkaitan dan juga daya kreatif manusia. Hubungan sebab-akibat seringkali bercorak majemuk (*multiple*), yaitu terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemunculan suatu fenomena. Jadi sukarlah bagi kita menentukan faktor-faktor penyebab yang sebenarnya.

Satu lagi kesulitan dalam penjelasan berkaitan dengan kekurangan pengetahuan kita. Pengetahuan kita dianggap tidak sempurna atau tidak lengkap karena kita tidak mengetahui semua variabel yang mempengaruhi kejadian dalam keadaan tertentu. Kesulitan ini telah diperbaiki sedikit baru-baru ini dengan penggunaan metode statistik dalam bidang ilmu sosial. **Libat Korelasi, Ramalan.**

Penyimpangan

Dalam pengertian yang luas, penyimpangan atau deviasi berarti



apa saja perilaku yang tidak menaati norma sosial suatu kelompok sosial atau masyarakat.

Albert Cohen dalam bukunya *Deviance and Control* mendefinisikan perilaku penyimpangan sebagai: perilaku yang melanggar harapan yang dilembagakan, yaitu harapan yang disetujui dan diakui bersama sebagai sah dalam suatu sistem sosial.

Robert Merton "Anomie and Social Structure" dalam D.R. Cressey & D.A. Ward (eds), *Delinquency, Crime and Social Process* berpendapat bahwa perilaku penyimpangan merupakan:

Perilaku yang menyimpang secara signifikan dari norma-norma yang ditentukan untuk individu dalam status sosial ... ia tidak dapat dipelihara secara abstrak tetapi perlu dikaitkan dengan norma-norma yang dianggap oleh masyarakat sebagai tepat dan yang secara moral mengikat bagi orang-orang yang menduduki status yang berlainan.

Satu lagi definisi diberikan oleh M.B. Clinard (dalam bukunya *Sociology of Deviant Behaviour*) yang mengatakan bahwa perilaku penyimpangan adalah perilaku menurut arah yang tidak disetujui, yang bertentangan dengan norma-norma dan derajatnya melebihi batas toleransi suatu masyarakat.

Ketiga pengertian di atas menegaskan bahwa perilaku penyimpangan melibatkan perbuatan yang melanggar norma-norma suatu masyarakat. Dengan demikian, maka semua bentuk kriminal, tindakan yang melanggar hukum dan peraturan, sakit jiwa, homoseksual, dan sebagainya dianggap sebagai perilaku penyimpangan.

Definisi di atas adalah berat sebelah oleh karena definisi mengandaikan adanya satu konsensus moral atau integrasi norma yang pada hakikatnya seringkali tidak terdapat di kalangan masyarakat. Penekanan ke atas sistem normalah yang banyak menimbulkan perselisihan pendapat mengenai konsep ini. Oleh karena perbedaan dari segi peraturan, norma dan nilai di antara kelompok yang berlainan, maka apa yang dianggap sebagai penyimpangan bagi satu kelompok mungkin merupakan suatu kelaziman bagi kelompok lain. Seorang individu yang sanggup menjadi

anggota kepada lebih dari satu kelompok itu mungkin melanggar peraturan satu kelompok tertentu karena mematuhi peraturan kelompok yang lain. Dalam keadaan ini, adakah individu itu dianggap penyimpangan? Ini menunjukkan betapa sukarnya mencari peraturan yang merupakan ukuran untuk menentukan apakah suatu perilaku itu penyimpangan atau tidak. Kelemahan definisi-definisi yang merujuk kepada perselisihan dengan norma atau peraturan pernah dikritik oleh Howard S. Becker dalam bukunya *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Menurutnya penyimpangan timbul dari respons anggota masyarakat melalui tindakan mengubah peraturan tertentu. Orang-orang tertentu kemudian dikenakan peraturan tersebut dan bukanlah warisan dalam tindakan tertentu tetapi satu pengaruh atau akibat dari interaksi manusia, yaitu mengenakan peraturan oleh orang lain ke atas yang "bersalah".

Berbagai teori telah dikemukakan berhubungan dengan perilaku penyimpangan. Salah satu teori yang agak terkemuka adalah teori Merton yang berdasarkan kepada konsep anomie yang mula-mula dikemukakan oleh Durkheim. Bagi Merton keadaan anomie dan seterusnya hingga penyimpangan ada ketika terdapatnya jurang atau perbezaan antara cita-cita yang ditentukan oleh kebudayaan dan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapainya. Dengan kata lain, apa yang mengakibatkan anomie atau devians adalah kekurangan fasilitas atau peluang untuk mencapai cita-cita tertentu sesuai dengan norma-norma sosial.

Merton berpendapat bahwa kadar penyimpangan dalam suatu masyarakat berubah menurut kelas social, kelompok etnik, ras dan ciri-ciri lain. Adanya perilaku penyimpangan ditentukan oleh ada atau tidaknya ikhtiar yang sah untuk mencapai cita-cita tertentu, tingkat penerimaan berbagai cita-cita dan ikhtiar oleh berbagai kalangan anggota kelas bawah karena mereka mempunyai ikhtiar yang terbatas untuk mencapai cita-cita yang ditentukan oleh kebudayaan.

Merton seterusnya mengemukakan tipologi mengenai penyesuaian individu dalam menghadapi masalah pencapaian berbagai cita-cita yang ditentukan oleh kebudayaan. Kelima cara penyesuaian tersebut adalah

kepatuhan, pembaruan, ritualisme, tarik diri, dan pemberontakan.

Teori Merton telah banyak dikritik karena beberapa kelemahannya. Sebagai contoh, teori ini berdasarkan kepada anggapan bahwa penyimpangan lebih meluas di kalangan kelas bawah dalam suatu masyarakat sedangkan beberapa hasil kajian telah membuktikan hal ini tidak benar.

Di samping itu, teori Merton mengandaikan seolah-olah cita-cita dan nilai yang seragam ada. Sedangkan pada hakikatnya adalah sukar untuk menentukan satu set cita-cita dan nilai yang dapat diterima oleh semua anggota masyarakat. Merton juga dianggap terlalu banyak menekankan struktur sosial sehingga faktor kepribadian diabaikan dalam analisisnya.

Tipologi penyesuaian Merton juga tidak terlepas dari kritik. Tarik diri sebagai satu bentuk penyesuaian dianggap kurang tegas dan kurang memuaskan, terutama dalam menerangkan masalah narkoba, sakit jiwa, dan masalah minuman keras.

Walaupun teori anomie Merton berisi kelemahan tertentu, namun teorinya itu telah menimbulkan satu pembicaraan yang begitu menarik dalam sosiologi dan mengakibatkan kemunculan banyak hasil penelitian yang berguna. **Lihat Anomi; Norma Sosial.**

Peran Sosial

Peran sosial merupakan pola perilaku yang diharapkan (*expected behaviour*) yang berkaitan dengan status atau kedudukan sosial seseorang dalam suatu kelompok atau situasi sosial. Misalnya, sebagai pelajar, seorang individu diharap bertindak dengan cara-cara tertentu. Dia diharap menghadiri kuliah dan seminar, membaca buku dan menyiapkan esai. Dosen juga diharap memberi kuliah, menilai esai murid-muridnya dan menghadiri rapat di tempat kerjanya. Konsep ini dapat dijelaskan lagi dengan melihat masyarakat sebagai sistem interaksi sosial yang berdasarkan kepada saling harapan pelaku-pelakunya. Pada umumnya, dalam suatu situasi tertentu, perilaku tipikal bagi seorang pelaku ada. Sebagai contoh, seorang warganegara dalam kedaruratan jalan raya mengharapkan

pertolongan dari anggota polisi yang sedang menjalankan tugas. Tiap-tiap status atau kedudukan mempunyai hak dan tugas-tugas tertentu. Oleh karena itu, seorang individu mematuhi perannya dalam melaksanakan hak dan tugas-tugas tersebut. Dengan demikian, status dan peran berkaitan erat dan merupakan dua cara untuk menjelaskan situasi yang sama. Seperti kata Linton, peran mewakili aspek dinamis suatu status, keduanya saling tergantung dan peran tidak dapat ada tanpa status, begitu juga sebaliknya. Peran sosial hanya merupakan perilaku yang diharap. Peran bukan perilaku yang semestinya diterima oleh anggota masyarakat. Contoh yang paling nampak dalam hal ini adalah kedudukan atau status sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). PSK mempunyai peran sosial tertentu, seperti menarik perhatian dan membujuk pelanggan pelanggannya dengan mengenakan bayaran tanpa melibatkan diri secara emosional dengan pelanggan-pelanggannya.

Sebenarnya tiap-tiap individu dalam masyarakat mempunyai banyak status dan memainkan peran yang berlainan. Seorang itu bisa menjadi suami, bapa, pemimpin politik, dosen, pemain sepak bola, dan sebagainya. Tiap-tiap status tersebut memberikan perilaku yang diharapkan ke atas individu yang terlibat. Satu kelompok peran yang dimainkan oleh seorang individu dikenal sebagai aneka peran atau *multiple role*. Aneka peran perlu dibedakan dari susunan peran (*role set*). Satu peran sosial tidak terjadi secara sendirian. Satu peran biasanya berkaitan dengan peran-peran lain yang saling melengkapi. Kelompok peran yang saling melengkapi ini dikenal sebagai susunan peran. Sebagai contoh, susunan peran seorang dokter terdiri dari pasien, perawat, bidan, pekerja sosial, dan sebagainya. Susunan peran seorang guru melibatkan kepala sekolah, murid-murid, rekan sejawatnya, orang tua, anggota Dewan Sekolah, dan pemimpin persatuan guru, dan sebagainya. Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa satu susunan peran bisa mengganggu atau bertentangan dengan yang lain. Konflik tidak hanya ada di antara peran individu-individu yang berlainan, yaitu di antara peran individu A dengan peran individu B. Konflik peran dan cara-cara penyelesaiannya adalah penting dalam kajian mengenai

nilai, proses sosial dan seluruh struktur sosial. Lihat **Sosialisasi, Status.**

Pertukaran Sosial

Pertukaran sosial (*social exchange*) adalah salah satu proses sosial yang mendasar. Sosiolog dan antropolog telah banyak membuat pembicaraan mengenai konsep ini tetapi diskusi yang cukup teratur dibuat oleh Peter M. Blau dalam bukunya *Exchange and Power in Social Life*. Menurut Blau, pertukaran sosial adalah perilaku sosial individu secara sukarela yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan balasan dari pihak-pihak yang lain.

Pengertian pertukaran sosial berdasarkan kepada anggapan-anggapan dalam pertukaran ekonomi tetapi konsep ini perlu dibedakan dari pertukaran yang semata-mata bercorak ekonomi. Pertukaran sosial berbeda dengan pertukaran ekonomi karena perkataan ini melibatkan respons dan jenis obligasi yang lebih samar (*diffuse*). Respons-respons itu tidak melibatkan proses tawar-menawar tetapi terserah kepada pihak-pihak yang memberinya.

Menurut Blau, interaksi sosial adalah suatu yang menggantungkan pihak yang terlibat, walaupun keuntungan itu tidak semestinya sama rata bagi semua. Ongkos atau anggaran yang ditanggung oleh peserta dalam suatu interaksi atau pergaulan itu juga tidak semestinya sama.

Banyak perilaku manusia didorong oleh harapan bahwa tindakannya akan mendatangkan ganjaran sosial (*social rewards*). Pada umumnya manusia terhutang budi dan mencoba untuk membalas budi orang-orang yang menolongnya. Hutang budi serta balasannya adalah ganjaran sosial bagi pihak-pihak yang mengulurkan bantuan. Oleh karena itu ganjaran sosial adalah dorongan utama pertukaran sosial. Ganjaran sosial yang dihasilkan oleh pertukaran sosial bisa berbentuk manfaat yang bercorak intrinsik, yakni menikmati hubungan itu sendiri, seperti kasih sayang dan persaudaraan. Ganjaran juga mungkin bersifat ekstrinsik, seperti barang, bantuan, nasihat, dan pujian. Blau berpendapat bahwa tindakan balas budi di kalangan orang-orang tertentu dapat mempererat ikatan sosial mereka.

TEORI SOSIAL

Selain dari Blau, George C. Homans juga memberi sumbangan terhadap teori pertukaran. Dalam satu makalah berjudul "Social Behaviour as Exchange", (*The American Journal of Sociology*, Vol. 63, No.6 (1958)), Homans menegaskan bahwa interaksi di antara manusia adalah pertukaran benda, baik yang bercorak material maupun bukan material. **Libat Interaksi Sosial, Kuasa.**

Perubahan Sosial

Perubahan sosial berarti modifikasi atau perubahan institusi sosial atau pola-pola peran sosial. Yang ditekankan di sini adalah perubahan penting dalam perilaku sosial atau perubahan dalam sistem sosial yang lebih besar, bukan perubahan yang kecil dalam kelompok kecil. Jadi perubahan sosial merujuk kepada perubahan dari segi hubungan sosial yang ada, seperti dalam kehidupan keluarga, ekonomi atau agama.

Tokoh sosiolog konservatif seperti Comte dan Spencer takut akan perubahan yang mendadak dan radikal. Mereka lebih suka perubahan yang bercorak evolusi, yang memakan waktu. Sebaliknya para pendukung revolusi cenderung kepada perubahan yang pesat, yang terjadi secara besar-besaran. Karl Marx menjadi tokoh sentral di sini.

POLA-POLA PERUBAHAN

	Evolusi	Revolusi
Sekue!	Kecil	Besar
Durasi	Panjang	Pendek
Sifat	Aman	Keras

Pada tingkatan awal perkembangan sosiologi, ada percobaan membangun teori yang menyeluruh untuk menerangkan bukan saja perubahan sosial tetapi juga melaksanakan arah perubahan itu. Dengan kata lain, teori-teori tersebut bersifat teleologi, dalam artian ia menekankan proses perubahan dengan satu tujuan tertentu atau kuasa penggerak yang

bisa dipahami melalui penelitian sosiologi. Tulisan Auguste Comte merupakan contoh pendekatan tersebut.

Walaupun Comte agak konservatif dan antirevolusi dalam orientasinya, namun dia tertarik dengan ide kemajuan yang merupakan hasil utama *Enlightenment*. Menurut Comte, semua masyarakat berkembang dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain tanpa pengecualian. Idennya dirumuskan dalam apa yang dipanggilnya sebagai 'Hukum Tiga Tingkatan' (*Law of Three Stages*). Menurut Comte, pemikiran manusia berubah dari tingkatan teologi, kemudian metafisika dan akhirnya peringkat positif. Pada tingkatan positif penalaran sains (*scientific reasoning*) memainkan peranan yang utama. Para sosiolog tidak banyak yang setuju dalam hal ini.

Teori evolusi dan Marxisme merupakan dua lagi percobaan awal untuk menerangkan perubahan sosial. Herbert Spencer merupakan tokoh utama pendekatan pertama. Dia menggunakan ide Darwin tentang dinamika evolusi untuk menguraikan perubahan masyarakat. Dalam teori Karl Marx, perubahan sosial diterangkan dalam konteks perjuangan kelas dan konflik.

Di kalangan tokoh-tokoh sosiologi klasik, terdapat beberapa orang yang mengemukakan ide mereka tentang perubahan sosial. Emile Durkheim, misalnya berpendapat faktor utama dalam perubahan sosial adalah pembagian kerja. Dia menegaskan bahwa pembagian kerja yang kompleks (yang dipercepat oleh perindustrian) akan menyebabkan berubahnya sifat ikatan dasar atau kohesi di kalangan anggota masyarakat. Perubahan itu adalah dari kohesi mekanis kepada kohesi organis.

Rurusan yang sejalan dengan ide Durkheim juga dikemukakan oleh Ferdinand Tönnies, sosiolog Jerman. Menurutnya masyarakat modern dicirikan dengan satu peralihan dari bentuk *Gemeinschaft* ke bentuk *Gesellschaft*.

Ide Max Weber tentang perubahan sosial berpengaruh besar kepada pemikiran para sosiolog selanjutnya, terutama teorinya tentang kharisma dan rasionalisasi. Pemikirannya tentang *routinization of charisma* merupakan salah satu sumbangan yang penting terhadap analisis

perubahan sosial.

Berikut adalah beberapa konsep utama yang sering dikemukakan oleh para sosiolog untuk menerangkan ciri-ciri tingkatan perubahan sosial.

TINGKATAN PERUBAHAN SOSIAL: KONSEP-KONSEP UTAMA

Sosiolog	Primitif	Feodal	Industri
L.H. Morgan	Keliaran (<i>Savagery</i>)	Kebudayaan (<i>barbarism</i>)	Peradaban
H. Maine		Status	Kontrak
F. Tonnies	<i>Gemeinschaft</i>	<i>Gemeinschaft</i>	<i>Gesellschaft</i>
A. Comte	Teologi	Metafisis	Positif
K. Marx	Primitif	Feodal	Kapitalis-komunis
H. Spencer		Militant	Industri
E. Durkheim		Mekanis	Organis
M. Weber	Tradisional	Tradisional	Rasional
R. Redfield	Luar kota	Luar kota	Kota
H. Becker		Sacred	Sekular

Hari ini, kebanyakan sosiolog tidak percaya akan adanya teori perubahan sosial yang umum atau tunggal. Banyak usaha ditumpukan kepada kajian-kajian terperinci tentang masyarakat atau institusi tertentu. Akibatnya muncul teori-teori yang sederhana tentang berbagai aspek masyarakat atau institusi.

Perubahan sosial adalah fenomena yang lazim dalam semua masyarakat. Ia juga merupakan satu proses yang berlangsung, meskipun kadarnya berbeda dengan satu masyarakat kepada satu masyarakat yang lain. Buku Wilbert Moore berjudul *Social Change* merupakan satu

pendahuluan yang baik untuk menerangkan konsep ini. Lihat *Evolusi Sosial, Rasionalisasi*.

Positivisme

Istilah positivisme tidak mempunyai pengertian yang standard. Ahli filsafat dan sosiolog menggunakannya dengan pengertian yang berlainan. Dalam filsafat, positivisme berkisar di sekitar anggapan bahwa ilmu merupakan satu rangka dasar dan darinya sifat dan bentuk pengetahuan dapat ditentukan. Dalam sosiologi, positivisme merujuk kepada anggapan bahwa konsep-konsep dan metode-metode yang digunakan dalam ilmu alam bisa juga digunakan dalam ilmu kemasyarakatan.

Konsep positivisme kerap kali dikaitkan dengan Auguste Comte, yang kadang-kadang dianggap sebagai “bapak” sosiologi dan penggagas positivisme. Menurut Comte, semua masyarakat dan pemikiran manusia pasti melalui tiga tingkatan, teologi, metafisika, dan positif. Ini dikenal sebagai Hukum Tiga Tingkatan. Hukum ini dikaitkan dengan hierarki ilmu dan sosiologi diletakkan di tingkatan yang paling tinggi.

Pada pendapat Comte, cabang pengetahuan yang berlainan mencapai tingkatan positif pada masa yang berlainan. Pemikiran positif lebih mudah dicapai dalam disiplin yang umum. Semakin kompleks bidang kajian suatu disiplin, maka semakin lambat disiplin itu mencapai tingkat positifnya. Sosiologi mengkaji fenomena yang paling kompleks dibandingkan dengan ilmu yang lain. Oleh sebab itu, ia diletakkan pada puncak hierarki ilmu.

Metode positif atau ilmiah, menurut pengertian Comte, adalah metode kajian yang berdasarkan kepada penelitian dan pengujian untuk mencari hukum-hukum yang menguasai hubungan di antara fenomena sosial.

Dalam sosiologi modern, konsep positivisme, menurut Anthony Giddens, *Positivism and Sociology* (1974), terdiri dari tiga anggapan yang berkaitan.

Pertama, metodologi dalam ilmu alam bisa digunakan secara

TEORI SOSIAL

langsung dalam sosiologi. Subjektivitas manusia, kehendak dan minatnya tidak menjadi halangan terhadap analisis perilaku sosial sebagai satu objek, seperti objek dalam ilmu alam. Di sini positivisme merujuk kepada satu pendirian bahwa sosiolog adalah peneliti mengenai kenyataan sosial.

Kedua, cita-cita analisis sosiologi adalah untuk merumuskan hukum-hukum atau generalisasi-generalisasi yang bercorak hukum (*law-like generalisations*) seperti yang dilakukan dalam ilmu berdasarkan kepada hasil penelitian. Positivisme di sini melibatkan satu pandangan mengenai sosiolog sebagai "penganalisis" atau "penafsir" bahan-bahan kajiannya.

Ketiga, sosiologi mempunyai sifat teknis dalam artian mengumpulkan pengetahuan yang semata-mata bercorak instrumental. Sosiologi, seperti ilmu alam, adalah "netral" dan segi nilai.

Masalah metode dalam teori sosial mempunyai dua tradisi yang agak bertentangan. Tradisi yang pertama diwakili oleh Max Weber di Jerman yang menekankan pengertian makna-makna subjektif suatu perilaku. Tradisi yang kedua, yang bertentangan dengan tradisi pertama, bercorak positif dan diwakili oleh Auguste Comte dan Emile Durkheim di Perancis. Pemikiran sosial Inggeris pada abad ke-19 juga bercorak positif, tetapi ahli-ahli positif Inggeris berbeda dengan rekan-rekan mereka di Perancis dari segi penekanan yang diberikan. Kelompok Inggeris menekankan keutamaan individu, sementara kalangan Perancis lebih cenderung kepada suatu pendekatan holistik mengenai kenyataan sosial.

Prasangka

Prasangka (*prejudice*) adalah satu sikap yang kurang baik (atau yang baik) terbatas pada individu atau kelompok oleh karena ciri-ciri tertentu, seperti ras, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan kelas. Prasangka biasanya berbentuk prejudgetment, yaitu sikap atau penilaian yang dibentuk sebelum ditinjau fakta-fakta yang terlibat. Sikap tersebut tidak berubah walaupun individu itu terbukakan dan ditantang oleh pengetahuan dan bukti-bukti yang baru.

Prasangka adalah satu fenomena yang agak universal seringkali ditujukan kepada individu dari kelompok lain. Prasangka biasanya dianggap sebagai satu ciri kalangan mayoritas terhadap kalangan minoritas yang tertindas, tetapi ini tidak berarti bahwa kalangan minoritas yang tertekan tidak mempunyai prasangka terhadap anggota daripada kelompok lain.

Prasangka seorang individu dalam keadaan-keadaan tertentu bisa membawa kepada beberapa pengaruh. Dalam bentuk yang paling lemah, individu yang mempunyai prasangka mungkin hanya menunjukkan rasa prasangka pada tingkatan lisan, yaitu bercakap dengan rekan-rekannya mengenai prasangka, mencoba menghindari diri dari bertemu dengan anggota kelompok yang tidak disukainya. Prasangka juga bisa membawa diskriminasi seperti mengasingkan kelompok-kelompok tertentu dari segi pendidikan, perumahan, dan pekerjaan. Dalam bentuk yang lebih hebat, prasangka bisa mengakibatkan kekerasan dan pembunuhan secara besar-besaran seperti yang telah terjadi kepada kaum Yahudi di Jerman semasa pemerintahan Hitler.

Prasangka juga perlu dilihat dalam konteks suatu masyarakat. Dalam masyarakat yang mempunyai sifat toleransi yang tidak membenarkan diskriminasi, orang-orang yang mempunyai prasangka kadangkala takut melakukan diskriminasi karena tekanan sosial. Sebaliknya dalam masyarakat yang bercorak rasis, rasisme merupakan satu ideologi yang menguntungkan (rasisme merupakan norma sosial). Individu yang tidak mempunyai prasangka mungkin melakukan diskriminasi sekadar untuk mematuhi norma sosial. Menurut R. K. Merton, kedua jenis perilaku di atas *prejudiced non discriminator* dan *non prejudiced discriminator* adalah behavioral conformists, yaitu individu-individu yang melakukan atau tidak melakukan diskriminasi karena mematuhi norma sosial kelompoknya. **Lihat Diskriminasi.**

Ramalan

Untuk membuat suatu ramalan (prediksi), kita melakukannya secara deduktif berpandukan kepada fakta-fakta dan hukum-hukum tertentu yang telah kita ketahui. Ramalan berkaitan dengan penjelasan. Dalam penjelasan, kita coba mencari hukum-hukum dan fakta-fakta yang menyebabkan terjadinya suatu kejadian.

Langkah-langkah ramalan adalah seperti berikut

Generalisasi yang diketahui: Semua scopolamine menyebabkan mata bengkak.

Kedadaan ada dulu yang diketahui: Ali memasukkan scopolamine ke dalam matanya.

Akibat yang diramalkan: Mata Ali akan menjadi bengkak.

Menurut langkah-langkah di atas, ramalan dan penjelasan didukung oleh informasi yang sama, yaitu generalisasi yang berhubungan dan keadan-keadaan terlebih dahulu ada. Jadi sekiranya suatu fenomena dapat diterangkan secara deduktif dengan berpandukan kepada generalisasi atau hukum tertentu setelah fenomena terjadi, maka fenomena itu pada prinsipnya dapat diramalkan sebelum terjadi. Ramalan seperti penjelasan adalah salah satu tujuan utama dalam ilmu sosial. Tujuan utama ramalan dibuat mengenai suatu perilaku adalah untuk mengurangi atau menghindari ketidakpastian.

Berbeda dengan ilmu alam, ramalan dalam ilmu sosial menghadapi banyak kesulitan. Ini adalah karena tumpuan kajian ilmu sosial bukan objek-objek yang dapat dimanipulasi.

Berbeda dengan ilmu alam, ramalan dalam ilmu social menghadapi banyak kesulitan. Ini dikarenakan tumpuan kajian ilmu sosial bukan objek-objek yang dapat dimanipulasi dengan mudah seperti objek-objek fisik. Ahli ilmu sosial mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan mereka sendiri merupakan sebahagian dari masyarakat yang dikajinya.

Masalah utama dalam ramalan ilmu sosial berhubungan dengan

pengaruh refleksifnya. Suatu ramalan dikatakan refleksif sekiranya tindakan membuat ramalan itu mempunyai pengaruh ke atas kejadian yang diramalkannya itu, baik menambah maupun mengurangi kemungkinan terjadinya suatu ramalan yang bercorak *self-fulfilling* atau *self-defeating*.

Suatu kabar tentang bangkrutnya suatu bank dikatakan *self-fulfilling* sekiranya kabar itu menyebabkan semua pelanggan bank itu menutup rekening mereka. Suatu ramalan mengenai keburukan suatu kebijakan dikatakan *self-defeating* kalau sekiranya ramalan itu menjadi satu perintah dan peringatan dan seterusnya hingga tindakan yang wajar perlu diambil untuk menghindari keburukan itu.

Sifat ramalan yang refleksif merupakan suatu sifat unik dalam ilmu sosial yang tidak terdapat dalam ilmu fisik. Misalnya, ramalan mengenai perjalanan komet tidak akan mempengaruhi perilakunya, tetapi ramalan mengenai pasaran saham mungkin mempunyai pengaruh ke atas harga-harga saham. Demikian juga tentang ramalan mengenai keputusan pemilu. Penyiaran ramalan mempunyai pengaruh ke atas pemilih, mengakibatkan apa yang dikatakan sebagai pengaruh *bandwagon* atau pengaruh *underdog*.

Di samping kesulitan di atas, sifat fenomena sosial yang kompleks dan saling ketergantungan merumitkan ramalan. Ini ditambah lagi dengan perubahan keadaan sosial yang cepat dan kompleks akibat pemilihan individu atau kelompok. Perubahan-perubahan itu kerap kali menimbulkan *chain reaction* serta pengaruh maklum sehingga sukar diramalkan.

Keadaan manusia yang tidak lengkap dengan pengetahuan juga menghalangi usaha untuk mencapai ramalan yang tepat. Kekurangan ini bukan saja ada dalam ilmu sosial, bahkan juga dalam ilmu fisik. Dalam ilmu fisik, walaupun teorinya sudah begitu maju dan matang, kita masih tidak dapat meramalkan suatu situasi yang konkrit seperti gempa bumi atau taufan dengan tepat; ini disebabkan pengetahuan manusia yang belum sempurna. Dalam ilmu sosial, tingkat ketepatan suatu ramalan adalah lebih rendah dibandingkan dengan ilmu fisik.

Namun apa yang penting adalah ramalan dapat dilakukan, walaupun dalam bentuk yang kasar, misalnya, meramalkan fenomena tertentu dalam

keadaan tertentu, atau membuat ramalan secara besar-besaran. Walaupun ramalan sedemikian rupa tidak membentahu kita dengan tepat apa yang bisa kita harap, tetapi sekurang-kurangnya dapat mengurangi ketidakpastian dan menjadikan alam sekitar kita tempat yang lebih familiar, sehingga kita dapat bergerak dan menghadapi suatu dengan lebih yakin. Dengan adanya ramalan serta gambaran kasar mengenai perilaku yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, maka ini akan membantu menjadikan perilaku kita lebih berpengaruh. Lihat Penjelasan.

Ras, Rasisme

Dari segi biologi, ras adalah satu kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi fisik seperti warna kulit, bentuk kepala, hidung, mata, bibir, telinga, dan sebagainya. Dan ciri-ciri fisik tersebut ditentukan oleh alam, yang diwarisi dari pada generasi ke generasi. Penduduk dunia pernah dibagi kepada ras-ras tertentu, seperti Caucasoid, Mongoloid, Negroid, dan Australoid berdasarkan kepada perbedaan fisik.

Pembagian semacam ini hanya merupakan pembagian secara kasar dan dianggap masih kurang memuaskan. Terdapat sebagian kalangan yang tidak termasuk dalam pembagian seperti ini. Sebagai contoh, penduduk Veddoid di India Selatan tidak dapat dimasukkan ke dalam kalangan ras manapun dalam pembagian tersebut. Demikian juga dengan penduduk Bushemen dan Hottentot di Afrika yang tidak dapat digolongkan sebagai Negroid.

Kesulitan dari segi pembagian manusia itu terjadi karena tidak terdapat ras yang asli pada manusia. Manusia itu bersifat *mobile* dan perkawinan campur sering terjadi satu sama dengan lain, dan proses ini menghasilkan golongan yang mempunyai keturunan campuran yang tidak dapat digolongkan ke dalam kalangan ras manapun.

Jadi istilah ras tidak mempunyai suatu definisi yang tegas malahan istilah ini amat menyesatkan. Hakikat ini telah diakui oleh begitu banyak sosiolog. Van den Berghe (1967), misalnya, berpendapat bahwa istilah ras itu membingungkan karena istilah ini mempunyai empat pengertian utama.

Pertama, konsep ras digunakan sebagai konsep biologi untuk membedakan manusia atas dasar perbedaan *phenotype* dan *genotype*. Tidak ada kesepakatan yang dicapai oleh ahli antropologi dan sosiologi dan belakangan ini klasifikasi ini telah ditolak oleh sebagian besar ahli ilmu sosial.

Kedua, konsep ras juga digunakan untuk menyatakan suatu kelompok manusia yang mempunyai beberapa ciri kebudayaan yang sama, seperti bahasa dan agama (misalnya: ras Perancis dan ras Yahudi).

Ketiga, ras digunakan secara longgar sebagai sama artinya dengan *species* (misalnya ras manusia).

Keempat, istilah ras digunakan untuk merujuk kepada suatu kelompok manusia yang menganggap diri dan/atau dianggap oleh kelompok-kelompok lain sebagai berbeda dengan kelompok-kelompok mereka atas dasar perbedaan fisik yang tidak dapat diubah. Sifat-sifat fisik itu seterusnya dipercaya berkaitan dengan sifat-sifat atau kemampuan moral dan intelek.

Bagi Van den Berghe, pengertian yang pertama dan yang ketiga tidak sesuai dalam ilmu sosial. Pengertian yang paling luas digunakan dalam ilmu sosial adalah pengertian keempat, yang berhubungan dengan suatu kelompok manusia yang didefinisi secara sosial atas dasar ukuran-ukuran fisik. Untuk menghindari kekeliruan di antara pengertian keempat dengan pengertian kedua, konsep "kelompok etnik" digunakan untuk merujuk kepada kalangan-kalangan yang berbeda dengan segi kebudayaan.

Walaupun begitu, dalam pelaksanaannya, perbedaan antara konsep ras dan etnik kadangkala menjadi kabur dan keduanya digunakan secara tumpang tindih. Rasisme merupakan doktrin atau kepercayaan bahwa suatu kelompok ras lebih superior dari kelompok ras yang lain berdasarkan faktor-faktor biologi. Menurut doktrin ini, tiap-tiap kelompok ras mempunyai ciri-ciri serta penentu-penentu keturunan ini bukan saja menentukan perilaku individu, bahkan juga menentukan kemampuan dan kecerdasan. Dari doktrin inilah timbulnya kelompok ras tertentu yang menganggap diri mereka lebih superior dari kelompok ras yang lain, seperti

orang kulit putih merasa mereka lebih superior dari orang kulit hitam di Afrika Selatan.

Konsep ras dan rasisme berkaitan erat satu sama lain. Adanya ras dalam masyarakat berarti juga adanya rasisme, karena tanpa rasisme ciri-ciri fisik akan hilang arti sosialnya (*social significance*). Perbedaan fisik yang objektif dengan sendirinya tidak semestinya membawa kepada kondisi ras. Ras hanya ada ketika perbedaan fisik dengan sendirinya tidak membawa kepada masalah rasisme atau kesuku-bangsaan. Masalah ini timbul ketika perbedaan fisik itu dikira penting oleh anggota masyarakat. Seperti yang ditegaskan oleh Kenneth Little, apa yang sangat penting bukanlah apakah kelompok-kelompok itu berbeda atau tidak dari segi biologi, tetapi hakikat bahwa mereka menganggap diri mereka berbeda dari segi ras daripada kelompok-kelompok yang lain.

Rasisme adalah salah satu masalah rumit yang dihadapi oleh dunia sekarang. Beberapa percobaan telah dibuat untuk menerangkan asal usul fenomena ini. Ahli psikologi misalnya, mencari pangkal rasisme dari kepribadian individu, dan dikaitkan dengan soal kekecewaan atau kepribadian otoritarian. Bagi sosiolog yang berhaluan Marxis, rasisme merupakan sebagian dari ideologi borjuis untuk mempertahankan eksploitasi dan penindasan ke atas golongan bukan kulit putih pada zaman penjajahan, perbudakan dan imperialisme. Seterusnya, dalam zaman modern kalangan Marxis melihat kharisma sebagai satu alat kapitalis untuk memecahbelah kaum buruh ke dalam kalangan-kalangan yang bermusuhan supaya mereka lebih mudah dikuasai. Apakah penjelasan itu memuaskan atau tidak tergantung kepada keadaan-keadaan yang mempunyai masalah rasisme.

Walaupun begitu, dua syarat perlu dipenuhi sebelum masalah rasisme muncul. Syarat yang pertama adalah ada dua atau lebih kelompok yang berbeda dari segi fisik supaya mereka dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Kedua, kelompok-kelompok tadi perlu juga berbeda dari segi kebudayaan dan berada dalam keadaan ketidaksetaraan yang dilembagakan, karena ini membolehkan berkembangnya ide mengenai

perbedaan ras yang *inherent*.

Masalah ras atau etnik adalah masalah yang kompleks. Masalah ini muncul dari keadaan sejarah masyarakat dan berkaitan erat dengan aspek politik, ekonomi dan sosial masyarakat itu. Oleh sebab itu, tidak dapat dianalisis atau dipahami secara terpeencil dari keseluruhan aspek kehidupan. Demikian juga sangat penting bagi kita mengaitkan masalah ras dengan hubungan ekonomi. Kedudukan ekonomi yang tidak seimbang menjadikan hebatnya masalah ras atau kesuku-bangsaan.

Perbedaan kebudayaan (seperti bahasa, agama, dan nilai) juga bisa merumitkan masalah ras. Dalam usaha menupuk kesatuan nasional, kadang-kadang sukar bagi kita membedakan apakah kaum minoritas itu diserang berdasarkan faktor agama atau ras. **Lihat Diskriminasi, Masyarakat Majemuk, Prasangka.**

Rasionalisasi

Secara umum rasionalisasi adalah keadaan makin tingginya standardisasi, kelangsungan dan penyelarasan dalam struktur suatu organisasi. Dalam bidang sosiologi, istilah rasionalisasi digunakan dengan berbagai pengertian. Pertama, ia berarti *trend* umum dalam sejarah perkembangan sosial. Kedua, ia merujuk kepada pengaruh-pengaruh khusus dari segi interaksi sosial dan nilai pribadi.

Istilah ini digunakan oleh Max Weber untuk menyifatkan apa yang dilihatnya sebagai *trend* utama dalam masyarakat Barat. Proses rasionalisasi dikaitkan dengan analisa Weber tentang birokrasi, bentuk otoritas, dan jenis tindakan sosial. Ia juga berkaitan dengan dikotomi Tonnies *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*.

Rasionalisasi sebagai satu *trend* umum dalam sejarah perkembangan sosial melibatkan pembagian antara "rasional" dan "tak rasional". Pembagian tersebut biasanya merujuk kepada keberpengaruhan menggunakan "ikhtiar" tertentu untuk mencapai cita-cita tertentu. Sebagai contoh, pada umumnya penggunaan kemudahan kedokteran modern lebih berpengaruh untuk mengubati suatu penyakit dibandingkan dengan cara

Tindakan Sosial

"berdo'a" saja. Dalam contoh itu, penggunaan kemudahan kedokteran modern dianggap sebagai cara rasionalisasi bermaksud pengejaran cita-cita secara logis, dan proses ini membawa implikasi kelancaran, standardisasi dan penyelarasan.

Dari segi interaksi sosial dan nilai pribadi, proses rasionalisasi diikuti dengan perubahan nilai sosial dan hubungan sosial dari keadaan yang bersifat primer, komunal, dan tradisional kepada keadaan yang bersifat sekunder dan impersonal. Menurut pembagian tindakan sosial Weber pula, tindakan *Zweckrational* menjadi amat berpengaruh, mengatasi tindakan afektif dan tradisional.

Rasionalisasi juga membawa implikasi peralihan dari ukuran-ukuran askrripsi (turunan) kepada ukuran yang berdasarkan pencapaian (*achievement*). Ini berarti faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, dan daya penarik pribadi tidak lagi relevan dibandingkan dengan prestasi dan pencapaian.

Rasionalisasi juga berarti satu bentuk justifikasi di mana seorang individu memberi alasan untuk mewajarkan atau mempertahankan suatu tindakan yang dianggap kurang wajar atau tidak dapat diterima. Rasionalisasi kebudayaan ("membela" kebudayaan sendiri) adalah justifikasi yang ada dalam kebudayaan untuk menerangkan ketidak-konsistenan (*inconsistency*) dalam norma-normanya. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesamaan dan keadilan, diskriminasi ke atas kelompok minoritas mungkin dipertahankan dengan mendeklarasikan bahwa kelompok minoritas itu adalah "kurang dari manusia". Dengan itu, maka anggota masyarakat seolah-olah diberi alasan untuk melakukan diskriminasi. **Lihat Tindakan Sosial, Otoritas.**

Sanksi Sosial

Sanksi sosial adalah hukuman atau ganjaran yang ditujukan kepada seorang individu untuk memastikan kepatuhan kepada norma sosial.

Radcliffe-Brown mendefinisikan sanksi sosial sebagai reaksi masyarakat atau sebagian besar anggota-anggotanya terhadap perilaku tertentu (apakah

disetujui atau tidak disetujui). Sekiranya perilaku itu tidak disetujui atau dibenarkan, maka sanksinya negatif. Sekiranya disetujui, sanksinya positif. Contoh-contoh sanksi positif adalah ganjaran, hadiah, pujian dan anugerah bintang. Contoh-contoh sanksi negatif adalah hukuman dan denda. Sanksi negatif bisa dibagikan kepada dua jenis: Sanksi teratur dan sanksi samar (*diffuse sanction*). Sanksi teratur merupakan tata cara yang tetap dan diakui, seperti hukuman kriminal dalam masyarakat modern. Sanksi samar biasanya bercorak spontan, tak formal dan tidak teratur, yang menyatakan rasa tidak setuju secara umum dalam masyarakat.

Selain hukum, terdapat juga bentuk-bentuk sanksi teratur yang lain. Badan-badan tertentu, seperti pereja dan organisasi profesional juga mempunyai cara-cara yang teratur untuk mengendahkan pelanggaran terhadap peraturan, dan cara-cara itu mungkin menjadi sanksi sosial yang berpengaruh. Sebagai contoh pemecatan seorang dokter dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) atau seorang pengacara dari persatuannya lebih serius dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan pengadilan. Banyak sanksi negatif yang bercorak 'samar' dan tidak teratur. Pengasingan dan ejekan adalah dua bentuk yang sering dijumpai.

Radcliffe-Brown juga mengemukakan satu lagi pembagian sanksi sosial, yaitu sanksi primer dan sanksi sekunder. Sanksi primer melibatkan tindakan seluruh komunitas (baik tindakan itu "teratur" atau tidak, tidak masalah) atau wakil-wakilnya yang sah. Hukum kriminal adalah satu contoh sanksi primer. Sanksi sekunder pula melibatkan tindakan individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Contoh sanksi sekunder adalah hukum sipil (*civil law*). *Blood feud* di kalangan orang-orang Nuer juga dianggap sebagai sanksi sekunder. **Lihat Kontrol Sosial.**

Segregasi

Segregasi artinya pemisahan yang meletakkan batas-batas dan sekat-sekat tertentu ke atas hubungan, sosial, kontrak dan komunikasi. Ia merupakan proses atau keadaan yang mempunyai berbagai bentuk. Sebab terjadinya juga cukup kompleks. Pada umumnya segregasi mempunyai

aspek-aspek tertentu seperti tempat tinggal, layanan, aspek-aspek tertentu seperti tempat tinggal, layanan, dan kemudahan lain. Segregasi lazimnya terjadi atas dasar ras, agama, kebudayaan, etnik, dan lain-lain.

Pada umumnya segregasi terbagi kepada dua jenis, yaitu segregasi sukarela dan segregasi bukan sukarela. Jenis pertama biasanya dilakukan oleh kalangan manusia yang memencilkan diri dengan tujuan untuk menentang asimilasi. Jenis yang kedua muncul karena paksaan dari pihak-pihak yang berkuasa. Di samping itu, terdapat juga bentuk-bentuk segregasi yang melibatkan gabungan kedua faktor rela dan tidak rela.

Segregasi biasanya melibatkan pemisahan dari segi fisik. *Chinatown* di negara-negara Barat, *ghetto* kaum Yahudi, kawasan *reserve* di Afrika Selatan dan *reservations* bagi suku Indian kulit merah di Amerika Serikat merupakan beberapa contoh pemisahan fisik. Segregasi bukan saja terbatas kepada pemisahan fisik, tetapi juga sifat-sifat sosial, adat istiadat, tradisi dan agama juga bisa mengasingkan satu kalangan manusia dari manusia lainnya. Contoh yang paling sesuai dalam hal ini adalah keadaan di selatan Amerika Serikat dalam abad yang lampau. Di sini pemisahan bukan saja terjadi di sekolah dan gereja, tetapi juga di restoran dan tempat hiburan. Adat istiadat dan tradisi memastikan pemisahan kaum Negro dari kaum kulit putih dalam segala bidang kehidupan.

Segregasi, seperti fenomena sosial yang lain seperti mempunyai sebab-sebab yang kompleks. Etnosentrisme salah satu sebab yang mendorong suatu kelompok memisahkan diri dari kelompok lain dengan tujuan untuk melanggengkan identitasnya, atau untuk menghindari asimilasi, atau untuk melindungi dan meneruskan satu cara hidup yang amat dihargai. Suatu kelompok etnik yang ingin menghindari persaingan dan konflik juga cenderung memilih segregasi sebagai jalan keluarnya.

Di kalangan golongan dominan, terdapat juga berbagai faktor yang mendorong mereka mengenakan segregasi ke atas kalangan minoritas. Pada kasus-kasus tertentu, dasar segregasi dilaksanakan hanya setelah didapati usaha asimilasi tidak berhasil. Dalam kasus yang lain, segregasi merupakan akibat prasangka atau kekhawatiran kalangan minoritas akan

membawa pengaruh-pengaruh yang buruk kepada masyarakat umum. Sebab yang lebih penting adalah segregasi digunakan sebagai satu alat untuk mengontrol dan menguasai kelompok minoritas dan seterusnya hingga dapat melindungi status kalangan dominan. Segregasi juga memudahkan eksploitasi satu kelompok ke atas kelompok yang lain.

Bentuk segregasi yang paling ekstrem bisa ditemui di Afrika Selatan. Menurut Van den Berghe (1970), tidak ada negara lain dalam sejarah dunia yang menumpukan tenaga dan sumber daya yang begitu banyak untuk mengenakan segregasi ras sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan sejak tahun 1948. Segregasi ras di Afrika Selatan, menurutnya, bisa dibagi kepada tiga jenis. Jenis yang pertama adalah segregasi *mikro*, yang berarti pemisahan di ruang tunggu, kereta api, kantor pos, dan toilet di kawasan-kawasan yang didiami oleh berbagai suku/bangsa. Jenis segregasi kedua adalah segregasi *meso*, yang merupakan pemisahan fisik hasil dari keadaan kawasan kediaman homogen dari segi ras di kota-kota yang bercorak pluralistik. Jenis ketiga adalah segregasi makro yang merujuk kepada pemisahan kelompok ras dalam kawasan yang berlainan, seperti "*Native Reserves*" (Kini dikenal sebagai *Bantustans*).

Bentuk-bentuk segregasi tersebut sebenarnya merupakan hasil dari kebijakan apartheid. Hanya saja, ia didukung oleh hukum.

Di sini, tujuan utama segregasi adalah untuk melanggengkan supremasi atau keunggulan kaum kulit putih. Segregasi dan dasar apartheid di Afrika Selatan telah banyak dikritik oleh para sosiolog dan kebijakan ini dianggap sebagai bentuk penindasan dan eksploitasi yang paling buruk dan ekstrem. Selagi kebijakan apartheid tidak dihapuskan, selagi itulah segregasi suku/bangsa dalam berbagai bidang kehidupan akan berlangsung. Segregasi telah lama menjadi cara penyelesaian bagi melanggengkan konflik dan pertentangan di antara kelompok ras atau etnik. Dari segi moral dan keadilan, tiap-tiap kelompok manusia memang berhak untuk memencilkan diri atau menisahkan diri dari kalangan lain. Tetapi lain halnya sekiranya segregasi itu dipaksa ke atas satu kelompok yang lemah, terutama kalau segregasi itu melibatkan diskriminasi dan penindasan.

Dalam bidang hubungan ras/etnik, apakah segregasi merupakan langkah yang bijak atau tidak sering diperdebatkan. Pandangan tentang hal ini banyak bergantung kepada pendirian nilai dan sikap seorang.

Ada kalangan yang berpendapat bahwa segregasi amat perlu untuk menghindari masalah konflik ras. Alasan mereka adalah konflik tidak akan ada tanpa adanya hubungan dan pertemuan. Sementara itu, ada juga kalangan berpendapat sebaliknya, dan menegaskan bahwa segregasi tidak membantu menyelesaikan masalah ras. Kalangan ini berpendapat bahwa hubungan perlu digalakkan sebagai langkah mengatasi masalah ras. Memang, hubungan tidak semestinya menjamin pengertian. Tetapi hubungan dalam bentuk-bentuk tertentu, misalnya hubungan di antara pihak yang sama status, kemungkinan besar dapat mengurangi prasangka ras.

Walaupun begitu, dari segi praktis, sebagai satu bentuk penyesuaian, segregasi cukup bermasalah. Dalam dunia yang serba modern, mobilitas menjadi makin meluas. Saling ketergantungan antara manusia makin bertambah. Fasilitas komunikasi dan pengangkutan juga kian maju. Pendidikan menjadi lebih meluas dan kadar melek huruf juga makin meningkat. Dalam keadaan demikian, kemungkinan suatu kelompok mengasingkan diri adalah amat kecil, walaupun tidak mustahil.

Lihat Interaksi.

Sekularisasi

Sekularisasi berasal dari perkataan "sekular" (yang berhubungan dengan hal-hal duniawi). Dalam pengertian yang paling luas, konsep sekularisasi berhubungan dengan proses keruntuhan peranan agama dalam masyarakat yang mengakibatkan masyarakat bercorak lebih rasional, materialis dan utilitarian. Dengan kata lain, masyarakat yang sekular adalah masyarakat yang mempunyai aspek kehidupan sosial yang bebas dari penguasaan simbol dan institusi agama; yaitu kuasa dan pengaruh agama makin kurang. Selain menekankan hal-hal yang bercorak materialis dan duniawi, sekularisasi juga melibatkan hal-hal seperti berikut:

1. Kecenderungan untuk mengejar kebahagiaan;
2. Kebebasan yang bertambah dari segi ilmu, pengetahuan, dan nilai;
3. Penekanan pada ukuran-ukuran empirik serta ukuran yang berkaitan dengan kecakapan duniawi;
4. Kesadaran mengenai kemampuan dan kuasa manusia terhadap alam sekitar dan masyarakat;
5. Berkurangnya kuasa dan pengaruh badan-badan agama terhadap kehidupan manusia.
6. Pemisahan agama dari politik dan pemerintahan.

Sifat-sifat sekularisasi seperti tersebut di atas merupakan sifat-sifat umum saja. Suatu hal yang menarik adalah sebagian dari sifat-sifat ini terdapat juga dalam beberapa agama tertentu. Misalnya Protestantisme dikatakan banyak menekankan ukuran empiris dan rasional; agama Yahudi menitik beratkan hal-hal keduniaan dan sebagainya.

Proses sekularisasi mempunyai hubungan yang erat dengan unsur-unsur yang ditekankan dalam proses rasionalisasi adalah penalaran, bukti-bukti empiris, ilmu pengetahuan, perkiraan, dan hal-hal duniawi lainnya. Proses sekularisasi juga berkaitan erat dengan ide Marx mengenai *dealienasi* (*dealienation*) manusia yang merupakan satu proses, manusia bebas dari proses alienasi dan bebas dari kongkongan hasil ciptaannya seperti agama.

Masyarakat sekular berlainan dari masyarakat suci (*sacred*). Nilai-nilai utama dalam masyarakat sekular adalah utilitarianisme dan rasionalitas, sementara masyarakat suci lebih menekankan hal-hal suci, supernatural, agama, mitos serta nilai-nilai yang berkaitan dengan tradisi dan konservatisme.

Hal-hal suci dan sekular merupakan salah satu tema utama dalam pemikiran sosiologi sejak abad ke-19. Banyak hasil tulisan yang bercorak keagamaan muncul di Eropa sebagai reaksi terhadap paham duniawi atau sekularisme yang ditekankan oleh *Enlightenment* dan Revolusi Perancis.

TEORI SOSIAL

Banyak tokoh sosiologi seperti Comte, Durkheim, Weber, Tocqueville, Marx, dan Simmel memberikan sumbangan tertentu ke arah pembicaraan mengenai aspek-aspek agama dan kaitannya dengan masyarakat secara keseluruhan. Dari hasil tulisan penulis-penulis abad ke-19, dapatlah kita rumuskan empat perspektif dasar mengenai agama:

Pertama, agama dianggap sebagai satu alat yang perlu untuk mempersatukan manusia. Nilai-nilai suci merupakan dasar konsensus moral.

Kedua, agama merupakan unsur utama dan bidang pertimbangan yang utama untuk memahami sejarah dan perubahan sosial yang mendasar.

Ketiga, agama lebih dari sekedar kepercayaan, keyakinan, dan doktrin. Agama juga merupakan upacara, komunitas yang mempunyai otoritas, hierarki dan organisasi. Akhir sekali, dalam usaha mereka untuk membentuk kembali keagungan agama dalam pemikiran, ahli-ahli konservatif menjadikan agama sebagai asal usul semua ide dasar dalam pemikiran dan kepercayaan manusia. Lihat *Alienasi*.

Sistem Sosial

Sistem sosial bisa ditafsirkan sebagai satu set peran sosial yang berinteraksi atau kelompok sosial yang mempunyai nilai, norma, dan cita-cita yang sama. Dengan demikian, satu sistem sosial bisa berisi dua peran sosial yang berinteraksi, yaitu suami dan isteri, atau berisi berjuta-juta peran sosial dan kelompok sosial.

Konsep tentang sistem sosial bisa diurut ke tokoh-tokoh sosiologi abad ke-19 seperti Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Tiap-tiap tokoh tersebut coba menganalisis bagian-bagian utama dalam sistem sosial dan hubungan di antara satu bagian dengan bagian yang lain. Herbert Spencer, misalnya, menganggap masyarakat sebagai organisme yang terdiri dari bagian-bagian yang saling ketergantungan dari segi fungsi. Tugas sosiolog adalah menganalisis hubungan dan fungsi bagian-bagian itu dalam satu keseluruhan.

Karl Marx berpendapat bagian-bagian utama dalam sistem sosial

modern atau masyarakat kapitalis adalah kelas, dan hubungan antara kelas berkisar di sekitar kuasa ekonom dan politik. Talcott Parsons tokoh sosiologi yang paling berpengaruh dalam menggunakan konsep sosial mendefinisikan sistem sosial sebagai, satu sistem proses interaksi di antara para aktor. Yang menjadi struktur sistem sosial adalah struktur hubungan di antara para aktor seperti yang terlibat dalam proses interaksi. Yang dikatakan sistem adalah satu jaringan hubungan tersebut. Apa yang ditekankan dalam definisi di atas adalah "struktur hubungan", yaitu bentuk-bentuk hubungan dan pengaruh sosial umumnya, bukan isi kandungan hubungan itu. Analisis seumpama ini menjadi titik pendekatan fungsionalis modern.

Menurut Parsons, unit utama sistem sosial terdiri dari kolektivitas dan peranan. Sementara pola utama atau hubungan yang mengaitkan unit-unit tersebut adalah nilai dan norma. Berbagai jenis status dan peran yang saling berkaitan di kalangan orang-orang yang berinteraksi, apakah dalam satu keluarga, organisasi atau satu masyarakat bisa dianggap sebagai satu sistem sosial. Ini disebabkan mereka membentuk satu keseluruhan yang bersatu, dan memperibahikan banyak nilai, norma, dan cita-cita yang sama. Keluarga, penjara, kesatuan sekerja, dan universitas bisa dianggap sebagai sistem sosial.

Untuk tujuan analisis tertentu, sebagian sosiolog membedakan sistem sosial dari sistem kebudayaan dan sistem kepribadian. Dalam kasus ini, sistem kepribadian dimaksudkan dengan aspek-aspek kepribadian manusia yang mempunyai pengaruh ke atas perilaku individu, sedangkan sistem kebudayaan meliputi kepercayaan, sistem nilai dan norma, dan cara komunikasi. Sedangkan sistem sosial merujuk kepada bentuk-bentuk interaksi dan organisasi seperti struktur wibawa suatu organisasi atau pembagian tugas dalam suatu keluarga. Pitirim Sorokin merupakan sosiolog yang memberi sumbangan besar dalam pembagian tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui bukunya *Society, Culture, and Personality*, (1947).
Lihat Kebudayaan, Fungsi, Struktur, Status.

Sosialisasi

Sosialisasi adalah satu proses sosial yang dilalui oleh seorang individu untuk menjadi anggota suatu kelompok dengan mempelajari kebudayaan kelompok itu serta peranannya dalam kelompok itu. Sosialisasi adalah proses sepanjang hayat yang perlu dilalui oleh seorang individu. Proses ini bermula sejak individu itu dilahirkan. Individu mempelajari dan menerima nilai, sikap, kecakapan dan peranan yang dapat membentuk kepribadiannya dan menyatukannya ke dalam kelompok atau masyarakatnya.

Salah satu agen sosialisasi yang penting dalam masyarakat adalah keluarga. Orang tua biasanya mengajarkan terhadap anak-anaknya tentang perilaku baik dan buruk, apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Proses sosialisasi yang dialami oleh seorang anak dalam keluarganya dikenal sebagai sosialisasi primer, yang mempunyai ciri yang berunsur emosi atau afektif.

Dalam proses untuk menjadi dewasa, individu itu bertemu dengan temannya, menjadi pelajar, anggota perkumpulan dan sebagainya. Sekolah, pertemanan, dan perkumpulan semuanya merupakan agen sosialisasi yang melalui agen ini individu mempelajari peran-peran baru. Bentuk sosialisasi pada tingkatan ini dikenal sebagai sosialisasi sekunder. Dalam sosialisasi seperti ini unsur emosi mungkin tidak begitu dominan dan individu yang terlibat mempunyai keleluasaan yang lebih besar terhadap keterlibatannya.

Kedua bentuk sosialisasi, primer dan sekunder, sama pentingnya bagi seorang individu. Keduanya mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menjadikan individu itu mempelajari kebudayaan masyarakatnya. Ini meliputi dua aspek kebudayaan, yaitu kedudukannya dari segi tradisi atau status dan peranan yang berkaitan dengannya.

Sosialisasi yang diterima oleh seorang individu pada tingkatan anak-anak tidak cukup untuk menghadapi tugas-tugas yang dihadapinya ketika dewasa. Dalam proses menjadi dewasa, individu yang terlibat berubah statusnya dari waktu ke waktu. Alam sekitar dan keadaan sosialnya juga mungkin berubah akibat proses mobilitas dari segi geografis dan ini

seterusnya memerlukan jenis perilaku yang baru.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sosialisasi pada tingkatan anak-anak tidak terjadi dalam tahun-tahun selanjutnya. Salah satu penyebabnya adalah tuntutan perilaku pada tingkatan yang berlainan mungkin bertentangan satu sama lain. Selain itu, individu yang terlibat mungkin tidak dapat mempelajari suatu kecakapan dengan sukses. Terlebih lagi, mungkin tidak terdapat agen-agen sosialisasi yang cukup ketat seperti orang tua. Proses sosialisasi mungkin juga gagal karena individu itu menjadi anggota kelompok kecil yang mempunyai nilai-nilai yang menyimpang (*deviance*), dan kelompok itu tidak melengkapkannya untuk menerima peranan yang diharapkan oleh masyarakatnya. Boleh jadi agen sosialisasi, seperti seorang ayah, mungkin tidak cakap dalam melakukan tugasnya karena dia kurang berminat atau memang jahat atau mempunyai masalah emosi. **Lihat Kebudayaan, Peran Sosial.**

Status

Status adalah kedudukan sosial seorang individu dalam suatu sistem sosial. Pada umumnya, status merupakan hak dan obligasi, dan tidak semestinya mempunyai hierarki. Contoh-contoh status adalah mahasiswa, anak, ayah, isteri, dan lain-lain.

Oleh karena kedudukan sosial dalam masyarakat biasanya dilihat dari segi *superioritas* (yang lebih tinggi) atau *inferioritas* (yang lebih rendah), maka istilah status juga dikaitkan dengan derajat, penghormatan dan pangkat sosial yang disusun secara hirarki.

Dalam sejarah pemikiran sosial, istilah status pada mulanya hanya merujuk kepada suatu kedudukan sosial yang diwarisi. Henry Maine (1822-1888), misalnya, menggunakan pengertian ini ketika ia membicarakan status dan kontrak. Namun, dengan berkembangnya ilmu antropologi dan sosiologi modern, konsep status juga diperluas pengertiannya untuk meliputi semua kedudukan sosial serta hak-hak dan obligasi-obligasinya tanpa melihat asal usulnya.

Menurut Ralph Linton (1936), status terbagi ke dalam dua jenis:

TEORI SOSIAL

status warisan dan status perolehan. Status warisan diperturunkan dari generasi ke generasi. Status ini diperoleh oleh seorang individu ketika dia dilahirkan atau ketika dia meninggal umurnya. Banyak status dalam masyarakat bercorak warisan. Contoh yang paling nyata adalah status yang berkaitan dengan jenis kelamin, umur, dan ras. Sebaliknya, status perolehan tidak mempunyai kaitan dengan keturunan seorang. Status ini ditentukan oleh kemampuan, kecakapan, daya usaha, dan pengetahuan seorang individu. Tegasnya, status diperoleh oleh individu melalui pencapaiannya sendiri.

Pembagian status secara umum ini adalah berguna. Adakalanya keduanya sukar dibedakan, misalnya unsur warisan dalam status perolehan. Demikian juga terdapat unsur-unsur pencapaian dalam status warisan.

Istilah status juga pernah digunakan dan dibicarakan oleh Max Weber. Bagi Weber, status adalah *social honour* atau reputasi yang dikaitkan dengan kedudukan seorang dalam masyarakatnya. Status perlu dibedakan dari kelas. Kelas ditentukan oleh faktor ekonomi (hubungan dengan proses produksi dan perolehan sesuatu), sementara status berdasarkan kepada penghormatan dan reputasi ataupun *estimation of honour*.

Status berkaitan erat dengan peranan (*role*). Sebenarnya keduanya tidak dapat dipisahkan. Status, seperti yang disebut tadi, adalah kedudukan (contohnya polisi, dosen, suami, dan pelajar). Tiap-tiap status diiringi dengan suatu set peraturan dan norma yang menentukan apa yang mesti dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh individu yang mendudukinya. Kelompok norma itu dikenal sebagai suatu peranan. Jadi status adalah kedudukan dalam hubungannya dengan kedudukan lainnya. Peranan adalah pola-pola perilaku yang diharap dari seseorang berkaitan dengan status yang didudukinya. Menurut Linton, peranan adalah aspek dinamis suatu status. **Lihat Kelas Sosial, Norma Sosial, Peran Sosial.**

Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial merupakan proses pembedaan individu-individu dalam masyarakat yang menyebabkan kemunculan satu hierarki yang terdiri

dari lapisan atau strata yang berlainan kedudukannya. Stratifikasi sosial adalah hasil dari interaksi sosial dan merupakan suatu fenomena sosial yang agak meluas dalam semua masyarakat. Pada dasarnya stratifikasi melibatkan keistimewaan yang berbeda-beda serta peluang hidup (*life chances*) yang berlainan. Kalangan dalam lapisan sosial yang berlainan mempunyai keistimewaan dan peluang hidup yang berlainan (peluang hidup meliputi peluang untuk mencapai cita-cita tertentu, peluang untuk menikmati kemudahan social, dan sebagainya).

Menurut T.B. Bottomore, terdapat dua percobaan utama untuk memajukan teori stratifikasi sosial yang umum. Yang pertama adalah percobaan Karl Marx; walaupun teori itu tidak dikemukakan secara teratur dalam tulisan-tulisannya. Karl Marx melihat kelas dari segi hubungannya dengan pangkal-pangkal produksi. Ia membagi masyarakat kepada dua kelas utama yang bermusuhan: satu kalangan peminas yang menguasai pangkal-pangkal produksi dan satu lagi kalangan yang tertindas.

Kelas yang berkuasa dan mempunyai pangkal-pangkal produksi adalah kelas borjuis atau pemodal. Kelas yang tidak berada, tidak berkuasa dan seterusnya hingga tertindas adalah kelas proleter atau buruh. Marx menekankan bahwa konflik di antara kedua kelas timbul dari hubungan produksi. Dengan berbuat demikian dia mengabaikan faktor-faktor bukan ekonomi yang mungkin juga memperlihatkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan seterusnya hingga menunbulkan konflik.

Percobaan kedua adalah teori stratifikasi seperti yang dikemukakan dalam tulisan-tulisan Davis dan Moore. Anggapan dasar mereka adalah stratifikasi merupakan ciri-ciri universal dalam semua masyarakat. Dalam tiap-tiap masyarakat ada sebagian jabatan atau kedudukan yang memerlukan kecakapan khusus yang hanya dapat diperoleh oleh segelintir individu yang mempunyai sifat tertentu. Latihan untuk memperoleh kecakapan tadi melibatkan pengorbanan waktu dan biaya. Bagi mendorong individu yang berbakat supaya menjalani latihan, maka satu sistem ganjaran disediakan oleh masyarakat sebagai perangsang. Ganjaran berbagai bentuk (seperti uang atau status) itu dibagikan secara berlainan berdasarkan

kepada kedudukan yang berlainan. Dengan itu maka timbullah stratifikasi sebagai satu mekanisme untuk mendorong anggota masyarakat memenuhi kedudukan yang berlainan itu.

Teori Davis dan Moore ini telah menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan sosiolog. Melvin Tumin, misalnya, pernah mengemukakan beberapa kritik, di antaranya adalah bahwa stratifikasi sosial tidak semestinya berfungsi. Ia juga menyatakan keraguannya terhadap anggapan dasar teori Davis dan Moore bahwa semua masyarakat dapat dimasukkan dalam stratifikasi.

Faktor-faktor yang menentukan kedudukan seorang individu dalam sistem stratifikasi berubah dari masyarakat ke masyarakat. *Talcott Parsons* mengemukakan enam ukuran yang menjadi dasar penilaian kedudukan seorang individu dalam sistem stratifikasi di Amerika Serikat. Ukuran-ukuran ini adalah keanggotaan dalam suatu unit kekeluargaan (keturunan, perkawinan dan sebagainya), sifat-sifat pribadi, pencapaian, benda-benda yang dimiliki (seperti harta), otoritas, dan kuasa. Benjamin Barber mengemukakan satu daftar ukuran yang lebih teliti dari tentara, peranan agama, peranan ekonomi, peranan profesi, kekayaan, keturunan, sifat-sifat pribadi dan kegiatan komunitas.

Pada dasarnya semua stratifikasi melibatkan unsur ketidaksetaraan (*inequality*). Contoh bentuk-bentuk stratifikasi adalah sistem kasta di Eropah dalam zaman pertengahan, sistem kasta dalam masyarakat Hindu yang bercorak tradisi dan sistem kelas dalam masyarakat modern. **Lihat kelas Sosial, Kuasa, Mobilitas Sosial, Status.**

Struktur Sosial

Struktur sosial adalah salah satu konsep yang paling banyak digunakan dalam sosiologi dan juga paling sukar untuk diberi satu definisi yang tepat. Pada umumnya konsep ini digunakan masyarakat, khususnya pola-pola perilaku atau hubungan sosial yang agak stabil dan langgeng. Struktur sosial dapat dilihat dan ditinjau dari segi status, peranan, nilai norma dan institusi sosial dalam satu sistem komunikasi Adakalanya

konsep ini digunakan sebagai istilah umum untuk merujuk kepada penyusunan unsur-unsur atau unit-unit (sub-sistem, jenis organisasi, dan institusi) dalam masyarakat.

Baik dalam bidang antropologi maupun sosiologi, konsep struktur sosial adalah satu konsep utama dalam pendekatan struktur-fungsional. Begitu banyak ahli antropologi dan sosiologi yang mencoba untuk memberi penafsiran terhadap konsep ini. Tetapi, sementara ini masih belum ada konsensus pendapat mengenainya.

E.E. Evans-Pritchard, misalnya, dalam bukunya *The Nuer* menggunakan konsep struktur sosial untuk merujuk kepada hubungan di antara kelompok-kelompok yang berkekalan, seperti negara, suku dan kelas yang mempunyai unsur-unsur persambungan dan identitas sebagai kelompok yang berlainan. Fortes dalam bukunya *Time and Social Structure* (1949) menganggap struktur sosial sebagai penyusunan yang teratur mengenai satu keseluruhan yang dapat dibedakan (*distinguishable wholes*), seperti institusi, kelompok, proses dan lain-lain. E. R. Leach pula dalam *Political System of Highland Burma* melihat struktur sosial sebagai satu set ide mengenai pembagian kuasa di antara individu-individu dan juga di antara kelompok-kelompok.

Radcliffe-Brown, seorang ahli antropologi sosial Inggris, juga membicarakan konsep struktur sosial dengan panjang lebar. Menurutnya, struktur sosial adalah satu jaringan hubungan sosial yang benar-benar ada. Radcliffe-Brown menggunakan istilah struktur dengan pengertian yang agak luas.

Baginya struktur sosial meliputi:

1. Segala hubungan sosial di antara individu-individu
2. Segala pembedaan individu-individu dan kelas menurut peranan sosial mereka.

Bagi Radcliffe-Brown, konsep struktur dan fungsi ini amat penting. Suatu aktivitas dianggap sudah diberikan uraian ketika aktivitas itu dibuktikan mempunyai fungsi atau pengaruh untuk memelihara suatu

Teori Sosial

struktur sosial.

Konsep struktur dan fungsi amat rapat hubungannya. Keduanya merupakan konsep utama dalam pendekatan fungsionalis atau struktur fungsional yang amat kuat pengaruhnya dalam bidang antropologi dan sosiologi. Namun, sehingga hari ini masih belum ada definisi tepat yang dapat diterima oleh semua ahli ilmu sosial mengenai kedua istilah ini. Tetapi, pada umumnya, begitu banyak sosiolog setuju bahwa istilah struktur digunakan untuk merujuk kepada satu set hubungan yang agak stabil dan berpola di antara unit-unit sosial sementara fungsi merujuk kepada pengaruh suatu aktivitas sosial terhadap pemeliharaan dan penyesuaian suatu struktur tertentu. Dengan kata lain, struktur merujuk kepada satu sistem yang mempunyai pola-pola yang agak langgeng dan fungsi adalah proses yang dinamis dalam struktur itu.

Begitu banyak sosiolog modern yang telah memberi sumbangan terhadap pembicaraan mengenai pendekatan struktur fungsional, seperti Talcott Parsons, Robert K. Merton dan Kingsley Davis. **Lihat Fungsi, Kebudayaan.**

Teori Sosiologi

Dalam bahasa yang paling umum, teori sosiologi adalah satu set anggapan mengenai masyarakat, fenomena social, dan perilaku manusia. R.K. Merton mendefinisikan teori sosiologi sebagai himpunan anggapan yang saling berkaitan secara logis, yang dengannya keseragaman empirik bisa dirumuskan.

Pada dasarnya, teori sosiologi menumpukan perhatian kepada penjelasan dan ramalan secara teratur mengenai sifat, pola-pola dan aspek-aspek lain komunikasi manusia dalam masyarakat. Teori sosiologi biasanya menyatukan hasil-hasil penelitian mengenai kehidupan sosial ke dalam satu pola yang padu.

Ide-ide mengenai masyarakat dan kehidupan sosial yang telah dikemukakan oleh tokoh sosiologi klasik seperti Durkheim, Marx, dan Weber biasanya dianggap sebagai bercorak teoretis karena sebagian besar

tulisan mereka berkisar di sekitar anggapan dan prinsip dasar mengenai masyarakat dan fenomena sosial, serta menjadi rangka dasar konseptual dalam pemikiran sosiologi modern.

Tiap-tiap ilmu terdiri dari dua bagian yang penting: bagian teoretis dan bagian empiris. Bagian teoretis merujuk kepada skema-skema konseptual seperti hukum, generalisasi, dan teori, sementara bagian empiris merupakan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dalam bentuk deskripsi, studi kasus, kajian umum, laporan statistik, dan eksperimentasi. Dibandingkan dengan bidang ilmu lain, dalam ilmu fisik, biasanya terdapat satu teori yang paling abstrak mengenai suatu fenomena atau beberapa teori yang saling berkaitan dan saling melengkapi yang diterima oleh pakar-pakar dalam bidang itu. Sebaliknya, sosiologi dicirikan oleh keadaan dua atau lebih teori yang bertentangan mengenai suatu fenomena. Walaupun begitu, kini nampak ada usaha-usaha untuk melakukan integrasi-integrasi teoretis.

Bottomore dalam bukunya *Sociology: A Guide to Problems and Literature*, mencoba meninjau kedudukan teori sosiologi dari aspek sejarah perkembangannya. Ia meninjau hal itu dari tiga segi: jenis generalisasi, konsep dasar dan skema pembagian, dan teori-teori yang bercorak penjelasan. Ia berpendapat bahwa apa yang tercapai oleh teori sosiologi dalam ketiga aspek tadi masih belum memuaskan. Teori sosiologi, katanya, masih menghadapi masalah pengkhususan ekstrem yang memisahkan teori dari penelitian.

Kurangnya sifat ilmiah dalam teori sosiologi merupakan perbedaan utama di antara teori sosiologi dengan teori lain dalam bidang ilmu. Percy Cohen telah menarik perhatian kita kepada masalah ini. Ia memberikan beberapa sebab mengapa teori sosiologi tidak ilmiah atau tidak memenuhi syarat-syarat ilmu, yaitu universal, empirik, dan bersifat kausalitas (sebab-akibat). Sebab pertama adalah kebanyakan teori sosiologi bercorak teori analisis yang mirip kepada *tautologi* yang tidak dapat diuji secara empirik.

Kedua, kebanyakan teori sosiologi bukan pernyataan yang universal atau pernyataan mengenai suatu fakta, dan seterusnya; hingga

teori tidak dapat diuji karena apa yang dinyatakan terlalu longgar untuk diuji sekeras-kerasnya (lihat Cohen, *Modern Social Theory*, 1968).

Teori sosiologi, seperti teori dalam bidang ilmu yang lain, mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Fungsi utama teori sosiologi adalah mendorong penelitian dalam bidang-bidang tertentu. Ini dapat dibuktikan oleh "teori anomie" R.K. Merton, yang telah menjadi dorongan dan rangsangan terhadap beberapa kajian mengenai kenakalan remaja (*delinquency*). Kedua, teori sosiologi mempunyai fungsi untuk merumuskan atau meringkaskan hasil-hasil beberapa kajian tertentu. Lebih penting dari ini, teori bisa dijadikan sebagai dasar penjelasan dan ramalan **Lihat Empirisisme.**

Tindakan Sosial

Tindakan sosial adalah konsep yang paling mendasar dalam bidang sosiologi. Tindakan sosial adalah segala perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif. Konsep tindakan sosial telah diberikan suatu definisi klasik oleh Max Weber. Menurut Weber, tindakan dikatakan sosial ketika tindakan itu berisi tiga unsur:

1. Perilaku itu mempunyai makna subjektif.
2. Perilaku itu mempengaruhi perilaku-perilaku pelaku lain.
3. Perilaku itu dipengaruhi oleh perilaku-perilaku pelaku lain.

Unsur yang ditekankan oleh Weber dalam pengertiannya adalah makna subjektif seorang pelaku. Tindakan sosial bagi Weber tidak semestinya terbatas kepada tindakan positif yang dapat diperhatikan secara langsung. Tindakan juga meliputi tindakan negatif seperti kegagalan melakukan sesuatu, atau penerimaan suatu situasi secara pasif. Weber seterusnya membedakan empat jenis tindakan:

1. Perbuatan *zweckrational* atau tindakan rasional yang berhubung dengan suatu cita-cita. Suatu tindakan dikatakan rasional kalau pelakunya mengandaikan bahwa penggunaan beberapa usaha tertentu perlu untuk mencapai suatu cita-cita. Tindakan *zweckrational* adalah bentuk tindakan rasional yang original, yang melibatkan pertimbangan secara rasional

mengenai hubungan di antara suatu cita-cita dengan usaha untuk mencapainya. Contoh pelakuan ini adalah tindakan seorang jurutera dalam pembangunan sebuah jambatan.

2. Tindakan *werirrational* atau tindakan rasional berhubung dengan suatu nilai. Ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak memandang bahaya atau kerugian semata-mata untuk mempertabahkan kehormatan seorang atau mencapai suatu nilai. Misalnya tindakan seorang kapten yang tidak mau melarikan diri ketika kapalnya mengalami kecelakaan.
3. Tindakan yang bercorak tradisi merupakan tindakan yang ditentukan oleh tradisi dan adat istiadat. Pelaku-pelaku melakukan sesuatu seperti yang ditentukan oleh tradisi tanpa memikirkan hubungan di antara cita-cita dengan usaha. Contoh tindakan bercorak tradisi adalah upacara agama.
4. Tindakan emosi atau afektual. Tindakan yang ada akibat reaksi emosi seseorang dalam keadaan tertentu. Perilaku refleksif adalah salah satu contoh tindakan emosi. Tindakan ini juga meliputi reaksi yang tidak terkontrol akibat suatu rangsangan (stimulus).

Bagi Weber hanya jenis tindakan yang pertama dan kedua dianggap rasional. Jenis yang ketiga dan keempat bukan rasional karena pelaku-pelaku tidak memikirkan hubungannya di antara cita-cita dengan usaha-usaha untuk mencapainya. Sebenarnya pembagian jenis perilaku kepada bentuk rasional dan bukan rasional yang dilakukan oleh Weber tidak tepat. Sebagai contoh tindakan yang bercorak tradisi yang dianggap oleh Weber sebagai bukan rasional, seperti upacara tukar-menukar hadiah di kalangan sebagian masyarakat primitif atau suatu upacara keagamaan, kerap kali mengandung unsur-unsur rasional bagi orang yang melakukannya, walaupun sifat rasional itu mungkin terpendam (*latent*).

Keempat kategori tindakan, menurut Weber, merupakan tipe ideal (*ideal type*) yang perlu dianggap sebagai alat penganalisan, yang benar-

benar ada. Perilaku yang benar-benar ada hanya mendekati tipe ideal atau bentuk original tadi.

Vilfredo Pareto, seperti Weber, juga membentuk satu skema yang agak terperinci tentang tindakan sosial. Pareto membagi tindakan sosial kepada dua kalangan besar, logis dan bukan logis. Tindakan logis didefinisikan oleh Pareto sebagai tindakan ketika ada hubungan logis antara cita-cita dan usaha (*means-end relations*). Suatu tindakan yang ada dalam pemikiran seorang pelaku juga ada dalam pernyataan objektif dan kedua hubungan itu, yang satu subjektif dan yang satu lagi objektif, mesti sejalan.

Tindakan bukan logis adalah tindakan yang tidak memenuhi syarat di atas. Dengan kata lain, seperti yang ditegaskan oleh Raymond Aron, tindakan logis ditentukan oleh pertimbangan yang teliti, sementara tindakan bukan logis dipengaruhi oleh sentimen.

Tindakan logis bagi Pareto lebih kurang sejalan dengan tindakan *zweckrational* bagi Max Weber, dan tindakan bukan logis bisa dibandingkan dengan tindakan bukan rasional. Tumpuan perhatian Pareto adalah pada tindakan bukan logis yang dibagi kepada empat kelompok besar. Kelompok pertama adalah tindakan yang hubungan cita-cita dengan usahanya, baik dalam pemikiran pelaku maupun dalam kenyataan, tidak ada. Kelompok kedua adalah tindakan yang memperlihatkan hubungan cita-cita dengan usaha ada secara subjektif, tetapi tidak secara objektif. Contohnya adalah upacara keagamaan. Kelompok ketiga adalah tindakan yang di dalamnya ada hubungan cita-cita usaha pada kenyataan tetapi tidak ada dalam pemikiran pelaku. Segala perilaku berkaitan dengan naluri tergolong ke dalam jenis tindakan ini. Kelompok keempat meliputi perilaku yang menggunakan usaha untuk menghasilkan pengaruh-pengaruh dalam kenyataan. Tetapi apa yang menjadi hasilnya itu, walaupun berkaitan secara logis dengan usaha yang digunakan, bukanlah sesuatu yang diinginkan.

Di samping pembagian yang dibuat oleh Weber dan Pareto, Talcott Parsons juga mengemukakan pembagian yang berlainan yaitu dengan membagi tindakan kepada dua kalangan besar ; instrumental, yang

ditujukan kepada cita-cita tertentu, dan ekspresif yang lebih melibatkan kepuasan yang didatangkan oleh perilaku itu.

Konsep tindakan sosial amat penting dalam bidang sosiologi karena tindakan merupakan suatu fenomena yang paling dasar dalam masyarakat. Banyak teori sosiologi bermula dari konsep tindakan. **Lihat Interaksi Sosial, Tipe Ideal.**

Tipe Ideal

Konsep ini diperkenalkan dalam sosiologi oleh Max Weber. Tipe ideal merupakan satu alat analisis untuk mengkaji dan membandingkan fenomena sosial. Sebagai sesuatu yang dipikirkan secara abstrak, tipe ideal ini tidak dapat ditemui dalam keadaan sebenarnya dan tidak pernah menepati kasus-kasus konkrit. Tipe ideal bukan bersifat sempurna dalam pengertian etika yaitu sebagai sesuatu yang sepatutnya ada tetapi berarti "*hipotetis*" atau bersifat "*logis*".

Menurut Weber, tipe ideal dibentuk dengan memberi ketamaan kepada beberapa sudut pandang tertentu, dan dengan suatu sintesis dari beberapa fenomena yang konkrit, yang disusun ke dalam suatu analisis konstruk yang bersatu.

Oleh karena tipe ideal hanya menumpukan perhatian kepada beberapa sifat fenomena yang tipikal (khas) dan bukannya suatu penjelasan mengenai kenyataan, maka yang unggul berbeda dengan jenis rata-rata (*average*). Konsep mengenai jenis rata-rata, seperti yang dikemukakan oleh Durkheim, berkaitan dengan jenis normal yang dibentuk dari fakta-fakta sosial yang konkrit. Jadi, tujuan Durkheim dalam menggunakan jenis rata-rata lebih bercorak deskriptif. Jenis rata-rata dibicarakan karena kesulitan untuk membicarakan tiap-tiap contoh empirik, dan jenis rata-rata dianggap sebagai cara yang paling sesuai untuk mencapai generalisasi. Bagi Weber, tipe ideal adalah suatu pembentukan yang berdasarkan kepada konsep (*conceptual construct*). Tujuannya adalah untuk memberi penjelasan, bukan deskripsi.

Tipe ideal perlu dalam semua bidang ilmu. Dalam ekonomi, contoh

tipe ideal adalah seperti pasar pertandingan sempurna model monopoli dan oligopoli. Contoh-contoh dalam ilmu politik adalah demokrasi dan kediktatoran. Dalam sosiologi Weber membedakan tiga bentuk tipe ideal yang bergantung kepada tingkat abstraknya. Jenis pertama adalah tipe ideal mengenai *historical particularities*, seperti "kapitalisme" dan "kota" dalam masyarakat Barat dan "Etika Protestant". Kesemuanya merupakan fenomena yang muncul dalam tingkatan sejarah dan dalam kawasan kebudayaan tertentu. Kedua, tipe ideal yang mewakili elemen-elemen abstrak mengenai suatu realitas sosial atau sejarah. Contohnya adalah birokrasi, feodalisme, otoritas dan jenis-jenis tindakan yang kesemuanya bisa dijumpai dalam berbagai bidang sejarah dan kebudayaan. Ketiga, tipe ideal yang dikenal oleh Raymond Aron sebagai *rationalizing reconstructions* (merasionalkan rekonstruksi) mengenai suatu jenis perilaku tertentu. Semua proposisi dalam teori ekonomi berhubungan dengan cara-cara bagaimana manusia bertindak ketika didorong oleh motif ekonomi yang original adalah di bawah kategori ini.

Contoh-contoh lain adalah *gemeinschaft* dan *gesellschaft*, *class in-itself* dan *class-for-itself*, dan lain-lain lagi. Lihat Birokrasi, Otoritas, Tindakan Sosial.

Variabel Pola

Variabel pola (*pattern variables*) ini merupakan salah satu sumbangan teori Talcott Parsons yang agak luas pengaruhnya. Ia terdiri dari lima pasangan atau dikotomi untuk tujuan pembedaan (*diferensiasi*) hubungan sosial. Tiap-tiap variabel pola menyediakan dua pilihan yang saling bertentangan satu sama lain, dan salah satu darinya perlu dipilih oleh seorang individu sebelum ia bertindak dalam suatu situasi sosial. Menurut Parsons, kelima variabel sosial merupakan dilema pokok yang dihadapi oleh seorang individu ketika dihadapkan dengan suatu situasi.

Variabel pola yang pertama, atau dilema pertama yang dihadapi oleh seorang individu adalah antara universalisme dan partikularisme (*universalism vs. particularism*). Setiap kali individu yang membuat pilihan

berkaitan dengan individu lain perlu bertanya kepada dirinya apakah ia mau bertindak berdasarkan standard yang diterima umum, atau berdasarkan hubungan khususnya dengan suatu kasus tertentu. Contoh universalisme adalah proses hukum dalam masyarakat modern, yang menganggap semua manusia sama rata tanpa pilih kasih. Dalam masyarakat feodal, hukum yang dikenakan oleh raja terhadap bangsawan dan rakyat biasanya berbeda. Keadaan demikian dikatakan sebagai partikularistik.

Dilema yang kedua adalah apakah individu itu mau mendapatkan kepuasan sekaligus atau menanggungkannya pada suatu masa yang lain. Individu itu sebenarnya memilih antara afektivitas dan kenetralan afektif (*affectivity-affective neutrality*).

Dilema yang ketiga adalah antara kekhususan dan penyebaran (*specificity-diffuseness*), yaitu apakah suatu hubungan didasarkan kepada satu kepentingan tertentu, atau beberapa kepentingan. Misalnya hubungan antara seorang pedagang dengan pelanggan dalam masyarakat kota biasanya bersifat khusus, sedangkan hubungan antara anggota suatu keluarga lebih bersifat menyebar (*diffuseness*).

Pattern variable lain dikenal sebagai asripsi-pencapaian (*ascription-achievement*). Di sini individu menumpukan perhatian pada sifat-sifat orang lain, atau pencapaian mereka. Ukuran asripsi di antaranya adalah jenis kelamin, bangsa, keturunan sedangkan ukuran pencapaian (*achievement*) meliputi kelayakan profesional dan akademik.

Dilema yang kelima adalah antara 'orientasi diri' dengan 'orientasi-kelompok' (*self-orientation - collectivity orientation*), yaitu apakah individu itu mengutamakan kepentingan dirinya atau kepentingan kelompoknya. Sebagai contoh, sekelompok buruh yang menerima wage restraint, yaitu tidak menuntut gaji yang lebih tinggi dianggap sebagai orientasi-kelompok sedangkan yang menuntut gaji yang lebih lumayan untuk diri dan keluarga mereka dianggap sebagai orientasi-diri.

Skema Parsons telah dikritik oleh sebagian sosiolog. Percy Cohen, dalam bukunya *Modern Social Theory*, misalnya, telah menyatakan, antara lain, bahwa variabel pola itu bukan benar-benar dilema anggota

TEORI SOSIAL

masyarakat; suatu penyelesaian atau pilihan mungkin mempunyai unsur-unsur dari dua alternatif yang diberikan itu; dan kelima pasangan itu tidak meliputi semua kemungkinan orientasi dalam interaksi sosial.

S.M. Lipset dalam *The First New Nation* (1964) telah menambah dua lagi variabel pola. Pertama *instrumental* dan *consummatory*, yaitu pilihan antara menumpukan perhatian pada usaha atau cita-cita. Kedua adalah egalitarian dan elitis. Yang satu menekankan kesamaan, menghormati orang lain karena mereka juga manusia, dan satu lagi menekankan kedudukan, baik melalui pencapaian ataupun pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adorno, T. et. al., *The Authoritarian Personality*, Harper & Row, New York, 1950.
- Allport, G.W., *The Nature of Prejudice*, Doubleday, New York, 1958.
- Aron, Raymond, *Main Currents in Sociological Thought 1*, Penguin Book, Harmondsworth, 1965.
- Aron, Raymond, *Main Currents in Sociological Thought 2*, Penguin Book, Harmondsworth, 1965.
- Bagley, Christopher, *The Dutch Plural Society: A Comparative Study in Race Relations*, Institute of Race Relation, London, 1973.
- Banton, Michael, *Roles. An introduction to the Study of Social Relations*, Tavistock, London, 1967.

- Banton, Michael, *Race Relations*, Tavistock, London, 1967.
- Becker, Howard S, *Outsiders: Studies in Sociology of Deviance*, Free Press, New York, 1963.
- Berry, Brewton, *Race and Ethnic Relations*, Houghton Mifflin, Boston, 1965.
- Beteille, Andre (ed), *Social Inequality*, Penguin Books, Hammonds worth, 1969.
- Blau, Peter, *Bureaucracy in Modern Society*, Random House, New York, 1958.
- Blau, Peter, *Exchange and Power in Social Life*, John Wiley, New York, 1964.
- Bogardus, E.S. "Measuring Social Distance", *Sociology and Social Research*, 1925, 9: 299-308.
- Bottomore, T.B., *Sociology: A Guide to Problems and Literature*, G. Allen & Unwin, London, 1962.
- Bottomore, T.B., *Elites and Society*, Peguin Book, Hammonds worth, 1966.
- Bottomore, T.B., *Classes in Modern Society*, Holt, Rinehart and Winston, London, 1971.
- Box, Steven, *Deviance, Reality and Society*, Holt, Rinehart and Winston, London, 1971.
- Brodbeck, M. (ed.), *Readings in the Philosophy of the Social Sciences*, Macmillan, New York, 1968.
- Brown, R., *Explanation in Social Science*, Aldine, Chicago, 1963.
- Clinard, M.B. (ed), *Anomie and Deviant Behaviour*, Free Press, New York, 1964.
- Cohen, Percy, *Modern Social Theory*, Heinemann, London 1968.
- Comte, A., *The Positive Philosophy*, Trubner, London, 1853.
- Coser, L., *The Functions of Social Conflict*, Routledge & Kegan Paul, London, 1956.
- Coser, Lewis & Rosenberg, Bernard (eds.), *Sociological Theory A Book of Readings*, Macmillan, New York, 1969.

- Coser, Lewis, *Masters of Sociological Thought*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1971.
- Coughlin, Richard, *Double Identity: The Chinese in Modern Thailand*, Hong Kong University Press, Hong Kong, 1960.
- Cox, O.C. *Caste, Class and Class and Race*, Montly Review Press, New York, 1959.
- Dahrendorf, R., *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Routledge & Kegan Paul, London, 1959.
- Demerath, N.J. & Peterson, R.A. (eds.), *System, Change and Conflict*, Free Press, New York, 1967.
- Dollard, John, *Caste and Class in a Southern Town*, Harper, New York, 1937.
- Durkheim, Emile, *The Rules of Sociological Method*, Free Press, New York, 1964.
- Durkheim, Emile, *The Division of Labour in Society*, Free Press, New York, 1964.
- Durkheim, Emile, *Suicide: A Study in Sociology*, Routledge & Kegan Paul, London, 1970.
- Furnivall, J.S., *Colonial Policy and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 1948.
- Gerth, H.H. & Mills, C. Wright (eds), *From Max Weber: Essays in Sociology*, Routledge & Kegan Paul, London, 1970.
- Gibbs, J.P. "The Study of Norm," *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. II, Macmillan & Free Press, New York, 1968.
- Giddens, A. (ed.), *Positivism and Sociology*. Heinemann, London, 1974.
- Glass, D.V. (ed.), *Positivism and Sociology*, Routledge & Kegan Paul, London, 1954.
- Goldthorpe, J.H. & Lockwood, D., et.al., *The Affluent Worker in the Class Structure*, Cambridge University Press, Cambridge,

1969.

- Gould, J & Kolb, W. (eds.), *A Dictionary of the Social Science*, Tavistock, London, 1964.
- Herskovits, M.J., *Cultural Anthropology*, Knopf, New York, 1955.
- Howard, A.M., *Caste: A Comparative Study*, Russel & Russell, New York, 1968.
- Horton, J. "The Dehumanization of Anomie and Alienation", *English Journal of Sociology*, XV, 4., 1964.
- Jones, J.M., *Prejudice and Racism*, Addison, Wesley, Reading, Massachusetts, 1972.
- Kornhauser, W., *The Politics of Mass Society*, Routledge & Kegan Paul, London, 1960
- Linton, Ralph, *The Study of Man*, Appleton Century, New York, 1936.
- Linton, R (ed.), *The Science of Man in the World Crisis*, Columbia University Press, New York, 1945.
- Lipset, S.M & Bendix, R., *Social Mobility in Industrial Society*, University of California Press, Berkeley, 1959.
- MacIver, R.M. & Page, D.H., *Society: An introductory Analysis*, Macmillan, New York, 1969
- Mannheim, Karl, *Ideology and Utopia*, Routledge & Kegan Paul, London, 1960.
- Marx, K & Engels, F., *The German Ideology*, International Publishers, New York, 1939.
- Marx, K. & Engels, F., *Manifesto of the Communist Party*, Progressive Publishers, Moscow, 1971.
- Matza, David, *Becoming Deviant*, Prentice-Hall, New Jersey, 1969.
- Merton, Robert K., "Social Structure and Anomie", *American Sociological Review*, 1938.
- Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, Free Press, New York, 1957.
- Miller, S.M. "Comparative Social Mobility", *Current Sociology*.

Vol. IX, No 1, 1960.

- Mills, C. Wright, *The Power Elite*, Oxford University Press, New York, 1956.
- Mosca, G., *The Ruling Class*, McGraw-Hill, New York, 1939.
- Myrdal, Gunnar, *An American Dilemma*, Harper, New York, 1944.
- Myrdal, Gunnar, *Values in Social Theory*, Routledge & Kegan Paul, London, 1960
- Myrdal, Gunnar, *Objectivity in Social Research*, Gerald Duckworth, London 1958.
- Nisbet, R.A., *The Sociological Tradition*, Heinemann, London, 1967.
- Pareto, Vilfredo, *The Mind and Society*, Dover, New York 1963.
- Parson, Talcott, *The Social System*, Routledge & Kegan Paul, London, 1951.
- Parsons, T & Shils, E., *Towards a General Theory of Action*, Harper, New York, 1962.
- Popper, Karl, *Poverty of Historicism*, Routledge & Kegan Paul, London, 1961.
- Prawer, J. & Eisenstadt, S.N. "Feudalism," *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. 5, Macmillan & Free Press, New York, 1968.
- Radcliffe Brown, A.R., *Structure and Function in Primitive Society*, Cohen & West, London, 1968.
- Rescher, N. "On Prediction and Explanation", *English Journal of the Philosophy of Science*, 8, hlm. 281-290, 1958.
- Rex, John, "The Plural Society in Sociological Theory", *English Journal of Sociology*, Vol. 10, No. 2, 1959.
- Rex, John, *Key Problems of Sociological Theory*, Routledge & Kegan Paul, London, 1961.
- Rex, John, *Race Relation in Sociological Theory*, Weidenfeld & Nicolson, London, 1970.
- Riesman, D. et.al., *The Lonely Crowd*, Yale, University Press, New

- Haven, 1950.
- Robertson, Roland (ed.), *Sociology of Religion*, Penguin Books, Harmondsworth, 1969.
- Runciman W.G., *Relative Deprivation and Social Justice*, Routledge & Kegan Paul, London, 1966.
- Seeman, M. "On The Meaning of Alienation", *American Sociological Review*, XXIV, 6., 1959.
- Seltiz, C. et.al., *Research Methods in Social Relations*, Holt Rinehart & Winston, New York, 1959.
- Sherif, Muzafer, *An Outline of Social Psychology*, Harper, New York, 1948.
- Shils, Edward (ed), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. 14, Macmillan & Free Press, New York, 1968.
- Simpson, G.E." Assimilation", *International Encyclopedia of the Social Science*, Vol. 1, Macmillan & Free Press, New York, 1968.
- Smith, H.E. "Towards A Clarification of the Concept of Social Institution", *Sociology and Social Research*, 1964.
- Smith, M.G., *The Plural Society in the English West Indies*, University of California Press, Berkeley, 1965.
- Srinivas, M.N., *Caste in Modern India and Other Essays*, Asia Publishing House, Bombay, 1962.
- Stouffer, S.A. et. al, *The American Soldier*, Princeton University Press, 1949.
- Summer, W.G., *Folkways*, Dover, New York, 1959.
- Thomas, W.I & Snieiecki, F., *The Polish Peasant in Europe and America*, Dover, New York, 1958.
- Thompson, K. & Tunstall. J. (eds), *Sociological Perspectives*, Penguin Books, Harmondsworth, 1971.
- Rimasheff, Nicholas, *Sociological Theory: Its Nature and Growth*, Random House, New York, 1967.
- Truzzi, Marcello (ed), *Verstehen: Subjective Understanding in the*

- Social Sciences*, Reading, Addison Wesley, Mass., 1974.
- Tylor, E.B., *Primitive Culture*, Murray, London 1929.
- Van den Berghe, P.L., *Race and Racism*, John Wiley, New York, 1967.
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization*, Free Press, New York, 1947.
- Weber, Max, *The Methodology of the Social Sciences*, Free Press New York, 1949.
- Wells, Alan (1970), *Social Institutions*, Heinemann, London, 1970.
- Williams, R.M. Jr. "The Concept of Norms", dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. 11, Macmillan & Free Press, New York, 1968.
- Wolff, K.H. "Social Control", dalam Gould & Kolb (eds), *A Dictionary of the Social Sciences*, Tacistock, London, 1964.

RIWAYAT HIDUP

Mohammad Taufiq Rahman dilahirkan di Tasikmalaya, 4 April 1973 dari pasangan H. Muzakir dan Hj. Dede Hamidah. Ia tinggal di Sumedang, beserta isteri Fauziah Fatma, di dan kedua anaknya, Iqbal Tibyan Rahman dan Fakhra Tabqiyah Rahman. Ia dapat diakses melalui email fikrakoe@yahoo.com

Pendidikan S-1-nya adalah Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Uululuddin IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (tamat tahun 1995), dilanjutkan pada program S-2 Islamic Studies, Leiden University, Belanda (tamat tahun 1999), dan S-3 di Department of Aqidah and Islamic Thought, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (tamat tahun 2010)

Selama menjadi mahasiswa ia seringkali aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan, terutama yang bersifat kajian dan publikasi. Ia termasuk

diantara mahasiswa yang aktif berdiskusi di berbagai lingkaran studi seperti Lembaga Studi Tafsir (LESTUTA), Forum Diskusi Al-Qalam, *Islamic Thought Forum*, Himmatul 'Alimin di Bandung, dan *Humanitair Actie Voor Indonesie* (Aksi Kemanusiaan Untuk Indonesia, AKUI) di Amsterdam, Belanda. Di bidang publikasi, ia pernah menerbitkan bulletin *Himmah* dan menjadi redaktur di *Suara Kampus (SUAKA)* IAIN SGD Bandung. Sebagai wartawan kampus ia pun sering bersilaturahmi dengan sesama jurnalis kampus baik dalam Forum Pers Mahasiswa Bandung (FPMB) maupun Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI).

Karir yang digelutinya yang pertama adalah guru, yaitu di antaranya mengajar di Madrasah Diniyah YPPI Tasikmalaya (1989-1991), Madrasah Diniyah Nurul Islam Ujung Berung Bandung (1991-1993), dan Madrasah Tsanawiyah di Pesantren Persis Lingsar Rancaekek Bandung (1992-1995). Kemudian juga pernah berkair di dunia pers dengan menjadi jurnalis di *Majalah Bulanan Islam RISALAH*, Bandung (1994-2003) dan menjadi kontributor di beberapa majalah dan koran seperti *Pani Masyarakat*, *Suara Muhammadiyah*, *Media Pembinaan*, *Harian Umum Media Indonesia* dan *Bandung Pos*. Untuk mengisi kekosongan, ia mempunyai hobi menerjemahkan buku-buku dan artikel-artikel berbahasa Inggris yang dirasa perlu untuk diterbitkan dalam versi Bahasa Indonesia. Di antaranya adalah *Islam Tanpa Kekerasan* (1999) yang diterbitkan oleh LKS Yogyakarta.

Terakhir, yang masih digelutinya adalah menjadi dosen di Fakultas Usuluddin UIN SGD Bandung (1997-sekarang) dan di Program Pascasarjana UIN SGD Bandung. Selain itu, ia pun masih menjadi peneliti pada *Institute for Religious and Institutional Studies (IRIS)*, Bandung (1999-sekarang). Dengan keahlian sebagai guru dan dosen yang rajin meng-up grade kemampuannya, ia kerap ikut mengisi training-training untuk para guru, kepala madrasah, dan para pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Dan dengan spesialisasinya di bidang Filsafat Sosial ia seringkali menjadi pembicara di kegiatan-kegiatan seminar atau *workshop*.